# KETERKAITAN PARPOL DENGAN PEMERINTAHAN DAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

DR. H. CECEP SURYANA, M.SI.
FARIZ FA, FATHIYYAH RA,
KHAIRUNNISA AF, LU'LU MF, M FIKRI,
MARYAM AS, MAYANG SP

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

# Keterkaitan Parpol dengan Pemerintah dan Kehidupan Masyarakat

H. Cecep Suryana
Fariz Farghan Atalla
Fathiyyah Raisah Amani
Khairunnisa Al Fajri
Lu'lu Mar'atul Farhah
M Fikri Saffa
Maryam Alhukmah Shabiyya
Mayang Sri Pertiwi

**Fakultas Dakwah dan Komunikasi**
**UIN Sunan Gunung Djati Bandung**

**Keterkaitan Parpol Dengan Pemerintah Dan Kehidupan Masyarakat**

**Penulis :**
H. Cecep Suryana
Fariz Farghan Atalla
Fathiyyah Raisah Amani
Khairunnisa Al Fajri
Lu'lu Mar'atul Farhah
M Fikri Saffa
Maryam Alhukmah Shabiyya
Mayang Sri Pertiwi

**ISBN:** 978-623-99506-7-5 (PDF)

**Editor:**
Asep Iwan Setiawan

**Penyunting :**
Khoiruddin Muchtar

**Desain Sampul dan Tata Letak:**
Ridwan Rustandi
Rahmat Ridwan

**Penerbit:**
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

**Redaksi:**
Gedung Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jl. AH. Nasution No. 105 Cipadung Cibiru Bandung
Telepon : 022-7810788
Fax : 0227810788
E-mail :fdk@uinsgd.ac.id
Website : https://fdk.uinsgd.ac.id/

Cetakan pertama, Juli 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

# KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya, segala kebaikan terwujud. Shalat serta salam bagi utusan pembawa rahmat ke semesta alam, serta bagi keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah, dengan menyebut Asma Allah yang Maha Besar dan Maha Penyayang, penulis bersyukur karena berkat karunia dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan dan menyusun Buku Keterkaitan Parpol Dengan Pemerintahan Dan Kehidupan Bermasyarakat hingga selesai.

Tujuan dalam pembuatan buku ini antara lain adalah semata-mata agar pembaca dapat mengetahui peranan partai politik baik dalam perintahan maupun dalam kehidupan bermasayarakat, dengan harapan agar dapat menambah wawasan serta pandangan bagi para pembaca pada umumnya. Selain itu, disusunnya buku ini untuk memenuhi suatu kewajiban sebagai syarat dalam menyelesaikan tugas mata kuliah Sispolindo.

Penulis mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkenan untuk membantu dalam proses penyusunan hingga buku ini dapat berhasil diselesaikan. Mudah-mudahan buku ini dapat menjadi suatu pembelajaran bagi kita semua dalam meningkatkan kompetensi mengenai sistem politik di Indonesia.

Dalam buku ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan baik dalam gaya Bahasa maupun teknik penulian. Oleh karena itu, penulis sangat senang jika para pembaca mau memberikan saran atau kritik, agar ke depannya buku ini dapat diperbaiki dengan sempurna.

Bandung, Juni 2022

Penulis

# UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan kasih karunia-Nya yang memberikan kesehatan dan kesempatan pada peneliti sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan baik.

Buku berjudul "Keterkaitan Parpol Dengan Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat" ini telah rampung dan diterbitkan. Terbitnya buku ini tidak lepas dari kerjasama tim dan beberapa pihak yang mendukung dan berpartisipasi dalam penyusunan buku ini. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih banyak kepada :

1. Bapak Dr. H. Cecep Suryanan M.Si selaku Dosen yang membimbing dalam proses pembuatan buku ini.
2. Kepada orangtua kami yang kami cintai dan hormati yang tak henti-hentinyamemberikan dukungan, doa, nasehat, dan motivasi hingga sampai detik ini
3. Kepada rekan-rekan kelompok yang turut andil dalam penyusunan buku ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih jauh darikesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf bila ada kesalahan dalampenulisan makalah ini. Kritik dan saran kami hargai demi penyempurnaan penulisanserupa dimasa yang akan datang. Besar harapan penulis, semoga makalah ini dapatbermanfaat dan dapat bernilai positif bagi semua pihak yang membutuhkan.

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** ..... **i**
**DAFTAR ISI** ..... **iii**
**BAB I PENGERTIAN DAN SEJARAH PARTAI POLITIK DI INDONESIA** ..... **1**
A. Pengertian Partai Politik ..... 1
B. Sejarah Partai Politik ..... 2
C. Macam-Macam Partai di Indonesia ..... 11
**BAB II PERAN DAN FUNGSI PARTAI POLITIK** ..... **17**
A. Fungsi Partai Politik ..... 17
B. Peran Penting Partai Politik ..... 21
C. Peran Partai Politik dalam Pemilu ..... 22
D. Peran Partai Politik dalam Demokrasi ..... 23
E. Peran Partai Politik dalam Ekonomi ..... 26
F. Peran Partai Politik dalam Pendidikan ..... 29
G. Peran Partai Politik dalam Menanggulangi Korupsi ..... 32
**BAB III DEMOKRASI DAN PARTAI POLITIK** ..... **35**
A. Pengertian Demokrasi ..... 35
B. Demokrasi dalam Perspektif Barat ..... 37
C. Konsep Syura dan Demokrasi dalam Islam ..... 41
D. Konsepsi Partai Politik ..... 46
**BAB IV POLITIK DAN PARTAI POLITIK** ..... **50**
A. Sistem Politik dan Partai Politik ..... 50
B. Kaitan Pemilu dan Partai Politik ..... 55
**BAB V PARTAI POLITIK DALAM KONTRIBUSI DI MASYARAKAT** ..... **61**
A. Peranan Partai Politik dalam penyerapan aspirasi masyarakat ..... 61
B. Peranan Partai Politik Menyerap Aspirasi Rakyat ..... 62
C. Partai Politik Dalam Proses Pembangunan ..... 64

A. Implementasi politik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. ..... 65
**BAB VI EKONOMI DAN PARTAI POLITIK ..... 70**
A. Pengertian Ekonomi Politik ..... 70
B. Sejarah Ekonomi Politik ..... 73
C. Pendekatan pada Ekonomi Politik ..... 103
D. Sikap Ekonomi Politik ..... 107
E. Perbedaan Ekonomi Politik Klasik dengan Ekonomi Politik Kontemporer ..... 109
F. Status Sosisal Ekonomi dan Kualitas Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik ..... 113
G. Gagasan Ekonomi Partai Politik ..... 114
H. Pengaruh Konsentrasi Partai Politik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah ..... 117
I. Peran Partai Politik dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan .... 119
**BAB VII PERANAN PARTAI POLITIK DALAM PENDIDIKAN ... 123**
A. Pendidikan di Indonesia ..... 123
**DAFTAR PUSTAKA ..... 139**
**BIOGRAFI PENULIS ..... 145**

# BAB I

# PENGERTIAN DAN SEJARAH PARTAI POLITIK DI INDONESIA

## A. Pengertian Partai Politik

Kelompok ideologis atau yang kerap disebut partai politik adalah esensial atau prasyarat atau pemenuhan suatu negara. Di negara berbasis popularitas, diperlukan kelompok ideologis yang bebas baik dalam proyek mereka maupun dalam kerangka kerja mereka. Sebuah kelompok ideologis adalah pertemuan terkoordinasi yang tujuannya adalahuntuk merebut atau bersaing dengan kekuatan politik di arena publik melalui keputusan.

Definisi Fungsional "Hubungan kumpulan warga yang memiliki perspektif dan minat yang hampir sama, yang berarti memegang kekuasaan dan pengaturan dampak, dan mengambil bagian dalam perlombaan sehari-hari untuk memperjuangkan perspektif, kepentingan, dan tujuan ini". Makna Undang-Undang “Perkumpulan politik yang dibentuk oleh perkumpulan penduduk Indonesia, dengan sengaja berdasarkan keseimbangan kehendak dan keyakinan, untuk memperjuangkan kepentingan pribadi, masyarakat, negara, dan negara melalui ras yang luas”.

Para ahli mendefinisikan kelompok ideologis sebagai berikut:

1. **Miriam Budiardjo :** Kelompok ideologis adalah pertemuan terkoordinasi yang individu- individunya memiliki arah, nilai, dan keyakinan yang sama yang bertekad untuk memperoleh kekuasaan politik dan memegang posisi politik (sebagai suatu peraturan) dengan cara yang dilindungi untuk melakukan pengaturan yang berbeda.
2. **Max Weber:** Faksi-faksi politik umumnya merupakan yayasan yang dipandang signifikandan sine qua non dalam kerangka aturan mayoritas yang maju. Kelompok ideologis berperan penting dalam menjaga pluralisme artikulasi politik dan memastikan kerjasama politik.
3. **J. A. Corry dan Henry J. Abraham:** Sebuah kelompok ideologis sebagai afiliasi yang berarti mengontrol jalannya otoritas publik dengan menempatkan individu-individunya padaposisi pemerintahan.
4. **R. H. Soltou :** Sebuah kelompok ideologis adalah kumpulan warga yang cukup terkoordinasi, yang berjalan sebagai unit politik dengan menggunakan kemampuan untuk memiliki pilihan untuk memilih dan berharap untuk mengontrol otoritas publik dan menyelesaikan keseluruhan strategi mereka.
5. **Carl J. Friedrich:** Sebuah kelompok ideologis adalah perkembangan

dari pertemuan manusia yang terus-menerus dikoordinasikan dengan niat penuh untuk memiliki pilihan untuk merebut atau mengikuti kendali otoritas publik untuk kepala partainya, dan dalam pandangan kontrol ini itu melengkapi individu partai dengan keuntungan ideal dan material.

6. **Sigmund Neumann:** Koalisi politik adalah beberapa asosiasi yang dibingkai oleh para aktivis politik yang dengan tulus berusaha untuk mengendalikan kekuasaan administrasi dan memenangkan bantuan yang terkenal berdasarkan persaingan terhadap kelompok-kelompok berbeda yang tidak sejalan.
7. **Macintosh Iver**: Kelompok ideologis adalah afiliasi yang dikoordinasikan untuk membantu pendekatan standar atau politik yang diupayakan melalui cara yang berbeda sesuai dengan konstitusi atau Konstitusi.
8. **Sri Sumantri:** Koalisi politik sebagai suatu susunan perkumpulan di mata publik berdasarkan keinginan khas dalam memperjuangkan mimpi dan misi politik, sesuai keinginan individu dalam menggarap gaya hidup di arena publik itu sendiri.
9. **Ramlan Surbakti:** Kelompok ideologis adalah kumpulan individu yang terkoordinasi dan stabil yang bergabung bersama dan dapat diilhami oleh filosofi tertentu, dan yang berusaha untuk memiliki pilihan untuk mencari dan mengikuti kekuasaan dalam suatu pemerintahanmelalui ras luas untuk memiliki pilihan untuk melakukan pendekatan umum elektif yang mereka rencanakan.
10. **Ranney dan Kendal:** Kelompok ideologis adalah perkumpulan atau perkumpulan yang memiliki tingkat kemandirian yang serius untuk menyebutkan dan mengambil bagian dalam perlombaan dengan harapan berurusan dengan organisasi dan pendekatan publik.

## B. Sejarah Partai Politik

### 1. Masa Kolonialisme

Menurut catatan sejarah, sistem kepartaian di Indonesia mulai muncul pada dekade-dekade awal abad ini di bawah pengaruh Politik Etis kolonial Belanda, lahirnya kelompok intelektual baru Indonesia dan membanjirnya pemikiran-pemikiran Islam baru dan gagasan-gagasan Eropa baru. . Dalam perputaran yang cepat pada tahun 1910-an dan 1920-an, gerakan-gerakan Islam, komunis, dan Nasionalis bangkit dan jatuh sebagai akibat dari permusuhan mereka terhadap Belanda dan permusuhan di antara

mereka sendiri. Partai- partai ini nantinya akan menjalankan fungsi penyerangan dan penyadaran aspirasi dan ideologi rakyat untuk mencapai kemerdekaan, serta menjalankan fungsi rekrutmen politik
yang melahirkan tokoh-tokoh nasional dan wakil rakyat yang menjadi anggota Volksraad. Dewan/semacam "Parlemen" pada zaman Kolonial).

*Indische Partij* merupakan partai politik pertama di Indonesia yang menjadi pionir munculnya organisasi politik di era pra kemerdekaan, baik organisasi politik ilegal maupunlegal. Mengingat pemikiran ekstrim partai ini saat itu, Indische Partij hanya bertahan 8 bulan, hal ini dikarenakan ketiga pemimpinnya diasingkan ke Kupang, Banda dan Bangka,kemudian diasingkan ke Belanda. Setelah beberapa tahun diasingkan, Ki Hajar Dewantara dan Dr. Setyabudi kembali ke Indonesia untuk mendirikan partai politik bernama National Indische Partij (NIP) pada tahun 1919 yang kemudian secara langsung mempelopori lahirnya beberapa partai politik lainnya, yaitu Indische Social Demokratische Verening ( ISDV), Partai Nasional Indonesia, Partai Indonesia dan Partai Indonesia Raya. Partai-partaipolitik yang ada sebelum kemerdekaan tidak semuanya mendapatkan status badan hukum dari zaman penjajahan Belanda. Nyatanya, partai-partai ini tidak bisa berjalan dengan damai dan lancar pada masa penjajahan Belanda. Oleh karena itu, partai-partai yang bergerak atau menentang pemerintah Belanda akan dilarang, dan para pemimpinnya akan ditangkap, dipenjarakan atau diasingkan.

Pertumbuhan partai politik di Indonesia mengalami pasang surut. Kehidupan partai politik hanya dapat ditelusuri kembali ke tahun 1908. Pada tahap awal, organisasi yang tumbuh pada waktu itu, seperti Budi Oetomo, belum dapat dikatakan sebagai partai politik dalam arti modern. Boedi Oetomo tidak bermaksud merebut posisi negara (kantor publik) dalam persaingan melalui Pemilihan Umum. Juga dalam arti organisasi yang berusaha mengontrol proses politik. Boedi Oetomo pada tahun-tahun itu tidak lebih dari sebuah gerakan budaya, untuk membangkitkan kesadaran masyarakat Jawa. Meski saat itu Budi Oetomo tidak bertujuan politik murni, namun keberadaan Boedi Oetomo telah diakui oleh para peneliti dan sejarawan Indonesia sebagai pelopor organisasi modern.

Partai dalam pengertian modern sebagai organisasi massa yang berupaya mempengaruhi proses politik, mengubah kebijakan dan mendidik para pemimpin serta mengejar anggota tambahan, baru lahir sejak berdirinya Sarekat Islam pada tahun 1912. Sejak itu partai dianggap sebagai kendaraan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan. nasionalis. Selang

beberapa bulan, lahirlah sebuah partai yang didirikan oleh Douwes Dekker, yaitu Indesce Partij, yang dilatarbelakangi oleh diskriminasi antara orang Indo Peranakan dan Belanda dalam hal gaji dan perlakuan lainnya yang menyebabkan gejolak mental di kalangan orang Indo. Kemudian mereka bertekad membentuk asosiasi radikal yang berusaha melebur dengan masyarakat adat. Apalagi ancaman yang sama, yaitu
penindasan kolonial. Kedua partai ini bisa dikatakan sebagai cikal bakal semua partai politikdalam arti sebenarnya yang kemudian berkembang di Indonesia.

**2. Masa Orde Lama**

Dalam rangkaian pengalamannya, sebelum Masyumi berubah menjadi kelompok ideologis di Indonesia. Sebelumnya merupakan hubungan paguyuban Islam pada masa Jepang menguasai Indonesia. Dalam suatu pertemuan, Angkatan Bersenjata Djapang mengizinkan Ulama, pada tanggal 4 September 1942, untuk memulihkan Madjlis Islam A'laIndonesia-MIAI yang telah berdiri pada tanggal 15 Rajab 1356-21 September 1937, dengan
W. Wondoamiseno sebagai pengurusnya (Suryanegara). , 2010: 38). Pada saat itu individu-individunya terdiri dari Persatuan Muhammadiyah, NU (Nahdatul Ulama), Persatuan Islam,dan Al-Irsyad dan asosiasi pendukung lainnya. Kemudian timbul hawa setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 3 November 1945 atas usul penguasa umum untuk membentuk kelompok-kelompok ideologis. Dengan cara ini, ada peluang bagi umat Islam untuk menyalurkan kerinduan dan perjuangan mereka untuk terus menjaga otonomi Indonesia. Khususnya untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam. Sejalan dengan itu,umat Islam merasa berkewajiban untuk menyortir solidaritas dan energi mereka dalam satu diskusi politik dengan tujuan agar mereka dapat menyelesaikan kewajiban mereka di bidangpolitik. Maka diselenggarakanlah Musyawarah Islam Indonesia di Yogyakarta pada tanggal7 dan 8 November 1945 yang dihadiri oleh hampir semua tokoh perhimpunan Islam yang berbeda dari masa sebelum Abdul Rahman/Masyumi dalam Tantangan Politik Permintaan Lama 161 konflik dan pendudukan Jepang. Kongres memilih memilih untuk menggelar Temu Syura fokal bagi umat Islam Indonesia (Noer, 2000: 10). Setelah berubah menjadi Partai Masyumi, Masyumi mendirikan koran Harian Abadi pada tahun 1947. Jelas, dasar tulisan ini memudahkan untuk menumbuhkan individu dan menyampaikan berbagai

data terkait kemajuan politik di Indonesia saat itu. Nahdatul Ulama (NU) merupakan salah satu ormas Islam yang berperan vital dalam perkembangan Masyumi. Seorang tokoh NU, K.H Hasyim Asy'arie, terpilih sebagai pemimpin Masyumi yang paling tinggi saat itu. Banyak tokoh NU lainnya yang duduk di pemerintahan Masyumi sehingga keterlibatan NU dalam isu politik sulit untuk dijauhi. Mengenai perkembangan Masyumi pada bulan November 1945, perlu diperhatikan terlebih dahulu bagaimana reaksi hangat dan bersemangat yang diberikan oleh seluruh rakyat Indonesia terhadap Dekrit Otonomi. Dengan melepaskan semua perbedaan, baik yang bersifat pribadi maupun ideologi, seakan tiap orang memberi bantuan kepada kemerdekaan yang diproklamasikan, dan oleh sebab itu, turut serta membelanya dengan berbagai cara. (Noer, 2000: 47)

Masyumi mempunyai dua macam anggota:

a. Perseorangan dan

b. Organisasi. Anggota perseorangan minimum berumur 18 tahun atau sudah kawin: ia tidak dibenarkan merangkap keanggotaan partai lain. Anggota Perseorangan mempunyai hak suara, sedangkan anggota Organisasi ( disebut anggota istimewa) mempunyai hak untuk memberi saran atau nasihat. Ide dualisme anggota ini didasari pertimbangan untuk memperbanyak anggota. Sebab lain, agar Masyumi dapat dilihat sebagai wakil ummat tanpaada yang merasa terwakili (Noer: 2000: 52).

Dalam area berikutnya, kita akan melihat bagaimana Masyumi telah mencapai perubahan untuk perbaikan politik di Indonesia. Perbaikan-perbaikan yang akan membawaMasyumi memainkan peran penting selama kerusuhan dan selama Permintaan Lama benar-benar berbalik seolah-olah Masyumi secara bertahap ditolak dari otoritas publik dan segeradilarang di Indonesia dengan polemik yang berbeda.

Menjelang berakhirnya solidaritas partai ini, latar belakang sejarah persoalan pemerintahan partai di Indonesia dihapuskan dari Partai Masyumi di panggung politik Indonesia melalui Deklarasi Resmi No. pertemuan oleh patriot umum dan sosialis berdasarkan aturan tiran. Pertarungan filosofis yang berlarut-larut antara dua perkumpulan dan dijunjung tinggi oleh para ahli membuat Masyumi tersingkir dari medan politik bukannya dicap sebagai partai terlarang. Masyumi mengalami persimpangan politik di sekitar awal kemerdekaan 1945-1950 dan 1950-1960. Bagaimanapun, Masyumi telah meninggalkan jejak moral berbasis suara di seluruh keberadaan kelompok ideologis di Indonesia, yang bagaimanapun akan dicatat sebagai modal untuk membangun kehidupan

politik yang sehat dan dapat diandalkan di kemudian hari.

**3. Masa Orde Baru**

Karena ada kelompok ideologis yang dibubarkan saat itu, ada pembicaraan dan diskusi yang berbeda tentang perlunya meletakkan mayoritas aturan pemerintah dan menyusun kerangka politik berbasis popularitas dan mendesain ulang konstruksi politik saatini. Kemudian, pada saat itu, kursus Militer II di Bandung diadakan pada tahun 1966 dengan makalah berjudul Keputusan Umum dan Permintaan Baru di mana makalah tersebut membahas ras, khususnya kerangka penggambaran yang adil dan kerangka lokal. Kemudian, pada saat itu, akibat dari pembahasan baik di Lokakarya Militer maupun di luar
kerangka daerah akhirnya dikenang pada rancangan peraturan ras politik yang diajukan ke parlemen pada tahun 1967 bersama RUU yang berbeda.

Pada tanggal 27 Juli 1967 pertemuan-pertemuan dan otoritas publik mencapaikesepakatan yang harus diselesaikan pada kerangka ras politik umum yang sesuai, namun untuk penyesuaian tertentu, antara lain, bahwa setiap lokal akan dipastikan tidak kurang dari satu kursi sehingga agen provinsi di luar Jawa akan setara dengan delegasi di Jawa dan kemudian mendapat kesepakatan bahwa 100 Orang dari parlemen dari jumlah 460 akan ditunjuk dari kelompok ABRI (75) dan non-ABRI (25) dengan ketentuan bahwa pertemuantaktis akan' t mempraktekkan hak mereka untuk memberikan suara dan dipilih. Berdasarkan kesepakatan tersebut, maka pada tanggal 8 Desember 1967 RUU tersebut diakui oleh parlemen dan persaingan politik umum Permintaan Baru akan diikuti oleh 10 kelompok ideologis yang diadakan pada tahun 1971. Sebelum sepuluh pertemuan termasuk Golkar, Presiden Soeharto memberikan pandangannya agar pertemuan akan berkumpul sendiri sehingga perlombaan politik secara keseluruhan akan lebih mudah. tanpa pihak kehilangan kepribadiannya. Gathering ini menggabungkan Public Gathering, Profound Gathering, dan Work Gathering. Namun, hal itu tidak mungkin terjadi dalam perlombaan 1971 yang diadakan dengan sembilan kelompok ideologis (NU, Parmusi, PNI, PSII, Parkindo, Katolik,Perti) dan Golkar.

Terbentuknya tiga arisan baru terjadi pada tahun 1973. Empat arisan, yaitu NahdatulUlama (NU), Partai Muslim Indonesia, Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) dan PersatuanTarbiyah Islamiyah (Perti) berubah menjadi Partai Persatuan Kemajuan (PPP). ). Kemudian dari lima kelompok ideologis khususnya Partai Publik Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, dan Partai Pendukung

Kemerdekaan Indonesia (IPKI) bergabung untuk berubah menjadi aliansi Kiri Indonesia (PDI). Kemudian, pada saatitu, dalam perlombaan politik umum 1977, tiga kelompok ideologis mengambil bagian, khususnya PDI, PPP, dan Golkar.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem pelantikan berubah dari kerangka kerja yang sesuai menjadi kerangka kerja wilayah di mana ada pengaturan ulang yang khas dari perkumpulan (tanpa paksaan) karena jumlah perkumpulan kecil akan berkurang, perkumpulan kecil akan didorong untuk membantu. kelompok ideologis lainnya.

Eksekusi pemusnahan kelompok ideologi tersebut menimbulkan kekecewaan masyarakat karena dinilai sebagai tindakan yang keras mengingat komponen paksaan dan ketiga kelompok ideologi yang ada juga dianggap kurang menikmati kesempatan bergabungdengan komponen yang berbeda sehingga setelah jatuhnya sistem Suharto, PPP dan PDI terpisah. Bagaimanapun, sekali lagi, dikatakan bahwa perbaikan partai telah membawa latar belakang sejarah Indonesia yang telah menciptakan kekuatan politik semi-serius. Dalam enam kali penunjukan Permohonan Baru, lebih dari 90% dari bangsa Indonesia yang memenuhi syarat untuk memilih mempraktekkan haknya untuk memberikan suara. Jadi bisa dikatakan bahwa ukuran konvensional adalah sejumlah besar individu daerah yang merasa ditangani melalui salah satu dari tiga kelompok ideologis.

Darurat moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan kekejian yang terjadi di kancah publik memaksa Suharto untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Setelah runtuhnya Zaman Permintaan Baru, kehidupan pesta di Indonesia menjadi lebih hidup. Halini ditandai dengan munculnya kelompok-kelompok yang muncul dan bersaing untuk memenangkan hati orang-orang dan tentu saja tujuan utamanya adalah untuk memperoleh kekuasaan melalui keputusan/pemilu.

**4. Masa Pasca Reformasi**

Darurat politik yang terjadi pada tahun 1998 merupakan akhir dari berbagai tatanan politik pemerintahan Permintaan Baru. Pengaturan politik yang berbeda yang diberikan olehpemerintah Permintaan Baru umumnya didasarkan pada penjelasan di balik pelaksanaan Pancasila sistem berbasis suara. Bagaimanapun, yang sebenarnya terjadi adalah mengikuti kekuatan Presiden Suharto dan rekan-rekannya. Ini menyiratkan bahwa sistem berbasis suara yang dilakukan oleh pemerintah Permintaan Baru bukanlah pemerintahan mayoritas yang sah, tetapi lebih merupakan pemerintahan

mayoritas yang dirancang. Dengan demikian, yang terjadi bukanlah sistem berbasis suara yang mengandung makna dari, oleh, dan untuk individu, melainkan sistem berbasis suara yang mengandung makna dari, oleh, dan untuk penguasa. Kehidupan politik hanya menguntungkan penguasa.

Selama periode Permintaan Baru, kehidupan politik sangat kejam. Ada banyak ketegangan yang kuat dari otoritas publik pada perlawanan atau individu yang berpikir secara fundamental. Kualitas kehidupan politik yang menindas, antara lain:

a. Setiap orang atau perkumpulan yang mencela pendekatan pemerintah disalahkan sebagai demonstrasi pemberontakan (melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia).
b. Eksekusi Lima Bundel Peraturan Politik yang melahirkan pemerintahan mayoritas semu atau sistem berbasis suara yang dirancang.
c. Terjadinya pencemaran, intrik, dan nepotisme (KKN) tidak terkendali dan daerah tidak memiliki kesempatan untuk mengendalikannya.
d. Pelaksanaan Kapasitas Ganda ABRI yang membatasi kesempatan setiap penduduk (warga negara biasa) untuk mengambil kepentingan dalam otoritas publik.
e. Pembuatan istilah resmi tanpa batas. Terlepas dari kenyataan bahwa Suharto dipilih sebagai presiden melalui Pertemuan Permusyawaratan Individu Secara Keseluruhan, perlombaan politik dirancang dan tidak demokratis.

Selama periode Permintaan Baru di bawah pemerintahan Suharto, energi yang dibutuhkan semua orang di Indonesia tampaknya telah habis tanpa bergema. Terlepas dari kenyataan bahwa pada saat itu tidak ada kerangka kerja partai tunggal yang diterapkan, mungkin sebuah partai tunggal sedang dieksekusi. Lawan politik Suharto yang lain dengan Golkarnya dihalangi secara serius. Pembayangan ini, misalnya, diakhiri dengan perbaikan partai untuk melemahkan saingan politiknya. Sekitar saat itu perkumpulan-perkumpulan itu dirangkai menjadi dua, yaitu yang berhaluan tegas dan yang berwawasan patriot. Demikian juga, dengan melarang perang salib hingga tingkat kota, pihak hanya diizinkan untuk bertempur hingga tingkat area. Dengan demikian, mayoritas di kota dapat digali oleh Golkar,dengan alasan Golkar bukan partai. Trik-trik ini masih dibangun oleh sebuah pemerintahanyang ditegakkan oleh militer, aktivitas yang kejam terhadap daerah setempat dan lebih jauhlagi kontrol media yang sangat ketat. Hal ini membuat Suharto dan Golkar memiliki pilihanuntuk tetap bertahan cukup lama di kursi kekuatan.

Dalam pengambilan keputusan di Indonesia sudah sangat lama. Kita bisa melihat keputusan politik 1955 yang biasa disebut-sebut sebagai keputusan politik paling adil yangpernah ada di Indonesia. Sekitar saat itu, masing-masing pihak memiliki filosofi yang jelas dan berjuang dengan penuh semangat untuk itu. Ada patriot, Islam, Sosialis, konservatisme, komunis, dll. Di mana di antara setiap sistem kepercayaan ini ada batasan yang jelas. Atau sebaliknya kita bisa melihat masa permintaan baru di mana kelompok ideologis dibatasi pada dua perkumpulan, yaitu PDI dan PPP yang mengusung patriotisme dan agama (Islam)dan Golkar, di mana segala sesuatunya harus berlandaskan Pancasila. .

Saat ini, kita dapat menemukan dalam keputusan politik 2009 lalu, yang diikuti oleh sejumlah besar kelompok ideologis, menjadi 38 kelompok ideologis tertentu. Ini adalah efekdari pemerintahan mayoritas yang dalam banyak kasus diproklamirkan setelah runtuhnya sistem Permintaan Baru. Sejak saat itu siapa pun dapat meletakkan kelompok ideologis di bawah tampilan sistem aturan mayoritas, meskipun mereka tidak siap dengan filosofi. Ini terlihat dari hanya 9 dari 38 pertemuan yang mendapat suara dari balapan resmi. Hal ini diharapkan, selain hal-hal lain, untuk lubang antara kuantitas pertemuan dengan filosofi
yang tidak jelas dan keberadaan politik bangsa Indonesia yang memiliki filosofi patriotisme,agama (Islam), dan sosialisme.

Yang terlihat saat ini hanyalah konflik antar kelompok ideologis yang berusaha saling menggulingkan. Hal inilah yang membuat banyak individu cemas saat ini yang melihat partai hanya sebagai instrumen untuk mengembangkan kekuasaan tanpa komitmenuntuk mengajari individunya untuk melihat lebih jauh tentang keadaan dan standar mereka. Padahal kelompok-kelompok ideologis berkewajiban untuk mengajari unit-unitnya agar memiliki pilihan untuk memahami tentang pertempuran yang harus diselesaikan.Masalahnya adalah banyak filosofi partai yang tidak jelas atau bahkan tidak memiliki sistem kepercayaan. Kelompok ideologis tanpa falsafah yang mengutamakan tujuan dan kepentingan individu bagaikan binatang tanpa ruh. Tujuan pertempuran tidak jelas. Kebetulan, sistem kepercayaan berbagai kelompok ideologis besar di negara ini praktis sangat mirip.

Kedaruratan watak dan ketiadaan falsafah sebagaimana dimaksud di atas merupakangambaran dari kelompok-kelompok ideologis di Indonesia saat ini. Sifat darurat dan kekurangan filosofi ini membuat jalannya pertemuan menjadi tidak jelas dan sulit untuk membedakan satu pihak

dengan pihak lain. Bahkan para pionir dan elit kelompok ideologispun tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada unit dan daerah. Mereka benar-benar sibuk tak henti-hentinya memperebutkan kekuasaan alih-alih menciptakan gagasan-gagasan elektif memikirkan bagaimana memperjuangkan negeri ini dengan tujuan agar bisa membina lebih baik, dan bagaimana mengurusi kepentingan negara.

**5. Masa Demokrasi Pemilihan Langsung**

Kata demokrasi itu sendiri telah ada sejak abad ke-16 dan berasal dari bahasa PrancisTengah dan Latin Pusat Lama. Ide sistem berbasis suara dibawa ke dunia dari Yunani kuno yang dilatih dalam kehidupan kenegaraan antara abad IV SM hingga abad VI SM. Sistem berbasis suara yang dipoles saat itu adalah mayoritas langsung memerintah pemerintah, menyiratkan bahwa individu yang tepat untuk memilih pilihan politik diselesaikan langsungoleh setiap individu atau penduduk.

Pasca kekalahan Suharto, berbagai komponen masyarakat meminta perubahan (perubahan) terhadap UUD 1945. Salah satunya adalah Pasal 7 tentang masa jabatanpresiden. Permintaan ini kemudian dijawab oleh Majelis Permusyawaratan Perorangan (MPR). Perubahan Pasal 7 dikenang untuk rencana I MPR yang diangkat secara khusus I MPR itu diperiksa pada tahun 1999 ke Badan Kerja yang akhirnya, Pasal 7 UUD 1945 secara

efektif dikoreksi dari bacaan sebelumnya: "Presiden dan Wakil Presiden berdiri teguh pada pijakannya untuk waktu lima tahun, dan setelah itu dapat diangkat kembali." menjadi "Presiden dan VP menjabat dalam waktu yang cukup lama, dan setelah itu dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan."

Mulai sekitar tahun 2004, Indonesia memiliki komponen lain untuk keputusan resmi. Dengan asumsi sebelumnya tidak ditentukan oleh perolehan suara para wakil rakyat di DPR/MPR, maka pada tahun itu, RI-1 dan RI masih unggul dengan perolehan suara langsung. Artinya, semua penduduk Indonesia berhak memilih ketuanya. Orang-orang yangberasal dari lingkaran keuangan, pemanggilan, dan distrik yang berbeda memiliki suara yangdiperhitungkan.

Dalam keputusan politik resmi langsung utama, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) menang. Mereka melewati dua fase pilihan, sebelum akhirnya memiliki pilihan untuk

mengalahkan lawan mereka. Ada lima pasangan yang mendekati saat itu. Mereka adalah: Wiranto-Salahuddin Wahid, Megawati Soekarnoputri-Ahmad Hasyim Muzadi, Amien Rais-Siswono Yudo Husodo, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dan Hamzah Haz-Agum Gumelar.

Indonesia sebagai negara besar dengan populasi 267 juta (proyeksi 2019) dan ada 20kelompok ideologis sebagai anggota pada 2019, untuk alasan apa dapat mengajukan 2 set pesaing. Selain itu, cara kelompok ideologis saat mengajukan pelamar otoritas mengambil banyak bukan dari partainya, cenderung disebut bahwa kelompok ideologis adalah pengedar produk organik sambil menjual mereka cenderung ke produk alam yang siap dan siap pakai,meskipun bukan dari pohonnya sendiri tetapi bukan dari berbagai pohon yang ada dan telahmelahirkannya. Ini adalah bukti nyata bahwa unit tidak bekerja dan selanjutnya membuat sapi jantan bertukar isu-isu pemerintahan seperti beberapa spesialis dari satu pihak dibeli oleh satu pihak lagi untuk mendapatkan suara.

## C. Macam-Macam Partai di Indonesia

Berikut ini adalah nama nama partai politik di Indonesia yang akan mengikuti pemilu 2019disusun berdasarkan nomor urutnya secara lengkap.

### 1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Nomor urut Pemilu 2019 : 1
Berdiri : 23 Juli 1998
Ideologi : Konservatisme, Pancasila, Pluralisme
Ketua umum :
Muhaimin Iskandar Sekretaris
jenderal :
Abdul Kadir KardingKetua
fraksi di DPR :
Helmy Faishal Zaini Perolehan
suara 2014 : 9,04
%
Jumlah kursi di DPR : 47 kursi

### 2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Nomor urut Pemilu 2019 : 2
Berdiri : 6 Februari 2008Ideologi : Pancasila
Ketua umum : Prabowo
Subianto Sekretaris

jenderal : Moekhlas
Sidik Ketua fraksi di
DPR : Ahmad Muzani
Perolehan suara di
Pemilu 2014 : 11,81 %
Jumlah kursi di DPR : 73
kursi

**3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)**

Nomor urut Pemilu 2019 : 3
Berdiri : 1 Februari 1999
Ideologi : Pancasila,
Marhaenisme Ketua
umum : Megawati
Soekarnoputri
Sekretaris jenderal :
Hasto Kristiyanto
Ketua fraksi di
DPR : Utut Adianto
Perolehan suara di
Pemilu 2014 : 18,95 %
Jumlah kursi di DPR :
109 kursi

**4. Partai Golongan Karya (Golkar)**

Nomor urut Pemilu 2019 : 4
Berdiri : 20 Oktober 1964Ideologi : Pancasila
Ketua umum : Airlangga Hartanto
Sekretaris jenderal : Lodewijk Freidrich Paulus
Ketua fraksi di DPR : Kahar Muzakir
Perolehan suara di Pemilu 2014 : 14,75
Jumlah kursi di DPR : 91 kursi

**5. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)**

Nomor urut Pemilu 2019 : 5
Berdiri : 26 Juli 2011Ideologi : Pancasila

Ketua umum : Surya Paloh
Sekretaris jenderal :
Johnny Gerald Plate
Ketua fraksi di DPR :
Johnny Gerald Plate
Perolehan suara di Pemilu
2014 : 6,72 % Jumlah
kursi di DPR : 36 kursi

**6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)**

Nomor urut Pemilu 2019 : 6
Berdiri : 16 April 2015Ideologi : Pancasila
Ketua umum : Ahmad
Ridha Sabana
Sekretaris jenderal :
Abdullah Mansuri
Status : Partai baru

**7. Partai Berkarya**

Nomor urut Pemilu 2019 : 7
Berdiri : 15 Juli 2016Ideologi : Pancasila
Ketua umum : Hutomo
Mandala Putra Sekretaris
jenderal : Badaruddin Andi
PicunangStatus : Partai baru

**8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)**

Nomor urut Pemilu 2019 : 8
Berdiri : 20 April 2002Ideologi : Islam
Ketua umum :
Mohamad Sohibul
ImanSekretaris
jenderal : Mustafa
Kamal
Ketua fraksi di DPR :
Jazuli Juwaini

Perolehan suara di
Pemilu 2014 : 6,79 %
Jumlah kursi di DPR :
40 kursi

**9. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)**

Nomor urut Pemilu 2019 : 9
Berdiri : 7 Februari 2015Ideologi : Pancasila
Ketua umum :
Hary
Tanoesoedibjo
Sekretaris jenderal
: Ahmad Rofiq
Status : Partai
baru

**10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)**

Nomor urut Pemilu 2019 : 10
Berdiri : 5 Januari 1973Ideologi : Islam
Ketua umum :
Muhammad
RomahurmuziySekretaris
jenderal : Arsul Sani
Ketua fraksi di DPR :
Reni Marlinawati
Perolehan suara di
Pemilu 2014 : 6,53 %
Jumlah kursi di DPR :
39 kursi

**11. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)**

Nomor urut Pemilu 2019 : 11
Berdiri : 16 November 2014 Ideologi : Pancasila, PluralismeKetua umum :
Grace Natalie
Sekretaris jenderal :
Raja Juli Antoni
Status : Partai baru

**12. Partai Amanat Nasional (PAN)**

Nomor urut Pemilu 2019 : 12
Berdiri : 23 Agustus 1998
Ideologi : Pancasila
Ketua umum :
Zulkifli Hasan
Sekretaris jenderal :
Eddy Suparno
Ketua fraksi di DPR :
Mulfachri Harahap
Perolehan suara di
Pemilu 2014 : 7,6 %
Jumlah kursi di DPR :
48 kursi

**13. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)**

Nomor urut Pemilu 2019 : 13
Berdiri : 14 November 2006Ideologi : Pancasila
Ketua umum : Oesman
Sapta Odang Sekretaris
jenderal : Herry Lontung
SiregarKetua fraksi di
DPR : Dossy Iskandar
Perolehan suara di Pemilu
2014 : 2,9 % Jumlah kursi
di DPR : 16 kursi

**14. Partai Demokrat**

Nomor urut Pemilu 2019 : 14
Berdiri : 9 September 2001Ideologi : Pancasila
Ketua umum : Susilo
Bambang Yudhoyono
Sekretaris jenderal : Hinca
Panjaitan
Ketua fraksi di DPR : Edhie
Baskoro YudhoyonoPerolehan

suara di Pemilu 2014 : 10,19 %
Jumlah kursi di DPR : 61 kursi

**15. Partai Bulan Bintang (PBB)**

Nomor urut Pemilu 2019 : 19 Berdiri : 17 Juli 1998
Ideologi : Islam
Ketua umum : Yusril Ihza Mahendra
Sekretaris jenderal : Jurhum Lontong
Status : Tidak dapat kursi di DPR

**16. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)**

Nomor urut Pemilu 2019 : 20
Berdiri : 9 September 2002Ideologi : Pancasila
Ketua umum : AM
Hendropriyono
Sekretaris jenderal :
Imam Anshori Saleh
Status : Tidak dapat
kursi di DPR.

# BAB II
# PERAN DAN FUNGSI PARTAI POLITIK

## A. Fungsi Partai Politik

Fungsi dapat diartikan sebagai suatu tugas atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok dengan menggolongkan ke dalam beberapa jenis sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi juga merupakan kekhususan dari suatu tugas tertentu. Dalam KBBI, fungsi diartikan sebagai (1) jabatan (pekerjaan) yang dilakukan, (2) faal (kerja suatu bagian tubuh), (3) besaran yang berhubungan, jika besaran yang satu berubah, besaran yang lain juga berubah; Matematika, (4) kegunaan suatu hal, (5) peran sebuah unsur bahasa dalam satuan sintaksis yang lebih luas (seperti nomina berfungsi sebagai subjek); Linguistik.

Partai politik merupakan suatu organisasi yang dibentuk sebagai usaha dalam mendapatkankekuasaan politik di pemerintahan suatu negara. Nantinya sesama calon dari berbagai partai politikakan bersaing di pemilihan umum yang diadakan di negara tersebut. Menurut Budiardjo (2000:161), partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemeritahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materil. Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisasikan sebagai suatu kesatuan politik dan memanfaatkan kekuasaannya untuk kebijakan umum yang mereka buat.

Partai politik juga diciptakan sebagai wadah bagi orang yang memiliki gagasan yang sama dan tentunya memiliki tujuan yang sama antar anggotanya. Akan tetapi partai politik tidak hanya berperan pada saat pemilu saja, melainkan masih banyak fungsi serta peranan lain yang terkait dengan berbagai aspek yang ada dan akan dibahas pada bab ini.

Fungsi pertama partai politik adalah sebagai pilar demokrasi. Dalam artian lain, dengan adanya partai-partai politik di dalam suatu negara dapat membuka permasalahan demokrasi. Contohnya, dalam merebutkan suatu jabatan di pemerintahan masyarakat dapat memperolehnya tanpa terkecuali melalui saluran politik

Perjalanan partai politik dan demokrasi pun sangatlah sejalan sehingga demokrasi dapat berjalan jika di dalamnya terdapat sistem kepartaian yang

mendukung adanya demokrasi positif. Akan tetapi, dengan banyaknya partai di suatu negara tidak menjamin bahwa negara tersebut memiliki demokrasi yang positif, karena tidak semua partai politik pun membawa demokrasi yang baik.

Dengan adanya partai politik menjadi suatu tolak ukur bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam dunia perpolitikan. Dalam politik masyarakat akan mempelajari caranya bertanggung jawab, hak serta kewajiban apa saja yang harus dilakukan dalam kehidupan bernegara sehingga dalam politiksendiri akan mempelajari perihal pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Fungsi-fungsi partai politik lainnya antara lain adalah sebagai wadah yang menjalankan pendidikan politik, menciptakan suasana demokrasi yang kondusif, sarana partisipasi masyarakat dalam dunia politik, narahubung spirasi masyarakat kepada pemerintah, pengendalian suatu konflik dan lainnya. Selain itu fungsi dari partai politik pun dijelaskan oleh para ahli diantaranyaialah Miriam Budiarjo (2001, hlm. 44). Menurutnya, fungsi partai politik terbagi menjadi enam, yaitu:

1. Komunikasi politik.

   Menurutnya arus informasi suatu negara bersifat dua arah yaitu, berjalan dari atas ke bawahdan sebaliknya. Maka dalam posisi inilah partai politik menjadi narahubung antara pemerintahan dan masyarakat.

2. Artikulasi kepentingan.

   Di dalam suatu masyarakat modern yang memiliki wilayah luas, pendapat dan aspirasi individu maupun kelompok akan hilang jika tidak ditampung atau disalurkan. Pendapat yang banyak dan beragam dari setiap orangnya perlu dilakukan perumusan. Perumusan inilah yang disebut dengan artikulasi kepentingan, yang dilakukan oleh partai politik.

3. Agregasi kepentingan.

   Sikap dan tuntunan dari berbagai kelompok yang membahas mengenai sesuatu hal yang sama atau memiliki makna yang sama akan disatukan. Proses penggabungan menjadi satu tersebut dinamakan sebagai agregasi kepentingan.Nantinya agregasi kepentingan dan artikulasi kepentingan dalam suatu sistem politik akan disampaikan kepada pihak berwenang seperti DPR, pemerintah dan lainnya sehingga akan diolah dan menghasilkan sebuah keputusan yang mengikat dalam bentuk kebijakan, UU dan semacamnya. Hal ini juga merupakan program partai.

4. Sosialisasi politik.

Proses dimana seseorang mendapatkan pandangan, orientasi dan pola pikir mengenai fenomena politik dari masyarakat di mana ia berada. Dalam proses ini juga masyarakat mewariskan norma-norma dan nilai-nilai untuk generasi selanjutnya dan kerap menghasilkan budaya politik suatu negara.

5. Rekrutmen Politik

Proses dimana suatu partai politik mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakatuntuk berpartisipasi dalam proses politik. Hal ini juga sering disebut kaderisasi.

6. Pengatur konflik.

Perbedaan pendapat maupun pandangan anatara sesama warga di suatu negara yangmenganut pemerintahan demokratis merupakan hal yang sudah biasa dan wajar. Akan tetapi, berbeda dengan masyarakat yang menganut heterogen. Perbedaan pendapat dalam hal yang menyangkut permasalahan agama, sosial, ekonomi dan semacamnya akan menimbulkan konflik bahkan pertikaian. Hal yang demikian dapat diatasi oleh partai politik dan diatur agar mengakibatkan efek negatif yang sangat sedikit. Tidak dipungkiri, terkadang di beberapa partai hal ini justru malah dijadikan bahan untuk memperkeruh suasana sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi partai politik tidak semua menghasilkan tingkat keberhasilan yang sama. Hal ini bergantung pada faktor politik maupun faktor lainnya seperti dukungan para masyarakat terhadap partainya.

Sedangkan menurut Ramlan Surbakti (2010. Hlm. 149) fungsi dari partai politik diantaranya adalah:

1. Sarana komunikasi politik

Proses penyampaian pesan mengenai politik dari pemerintah terhadap masyarakat. Dalam hal ini, partai politik bertugas sebagai narahubung antara pemerintah dan masyarakat yang tidak hanya menyampaikan suatu keputusan atau segala hal yang ingin disampaikan oleh pemerintah saja. Dalam hal ini partai politik juga menjadi narahubung yang menyampaikan aspirasi maupun gagasan dari masyarakat kepada pemerintah. Partai politik pun harus dapat mengemas segala aspirasi masyarakat dengan baik, agar kelak dapat mudah dimengerti oleh pemerintah dan dapat dijalankandengan sebaik mungkin. Maka dapat disimpulkan dalam fungsi ini, partai politik harusbisa mengefektifkan segala komunikasi yang terjadi antara masyarakat dan pemerintahan.

2. Sarana pemadu kepentingan

   Keadaan masyarakat saat ini sudah memasuki ranah modern dan semakin luas sehingga menghasilkan pendapat maupun gagasan yang sangat komplek dan juga beragam. Maka dibutuhkanlah suatu penggabungan kepentingan yang nantinya akan diolah dandirumuskan dalam bentuk yang lebih efektif juga efisien. Selanjutnya perumusan tersebut nantinya akan diperjuangkan oleh pihak partai dalam suatu rapat parlemen.

   Hal ini masih sangat berhubungan dengan komunikasi karena selain hal tersebut nantinya partai politik juga dituntut untuk bisa menyebarluaskan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

3. Sarana sosialisasi politik

   Fungsi ini menjadi suatu proses pembentukan sikap dan orientasi politik Masyarakat yang nantinya akan bisa memahami fenomena yang terjadi dalam politik. Proses ini berlaku seumur hidup dengan melalui pendidikan baik formal maupun non formal. Hal ini juga dapat diperoleh secara tidak sengaja seperti melalui pengalaman, kehidupan sehari-hari dan semacamnya.

4. Sarana rekrutmen politik

   Rekruitmen politik sendiri dapat diartikan sebagai proses penyeleksian atau pemilihan terhadap seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik. Fungsi ini melanjutkan fungsi lain yaitu sebagai upaya mempertahankan kekuasaan yang tentunya sangat penting dalam sebuah sistem politik.

5. Sarana pengendalian konflik

   Warga negara demokrasi tentunya dibebaskan untuk menyampaikan pendapatnya dantidak dibatasi atau dilarang oleh pihak manapun. Warga negaranya juga diperbolehkan untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya sehingga jarang sekali terjadi konflik berat mengenai perbedaan pendapat. Akan tetapi dalam suatu negara yang tidak menganut sistem demokrasi hal ini sangatlah bertentangan dan sering menimbulkan permasalahan.

   Oleh karena itu, sebagai pilar demokrasi partai politik harus bisa mengendalikan konflik-konflik yang terjadi di dalam masyarakat dengan menjadi orang tengah yang melerai masalah tersebut.Tentu hal ini dilakukan dengan baik-baik dan membawa permasalahan kepada

musyawarah badan perwakilan rakyat yang akan menghasilkan suatu penyelesaian masalah berupa keputusan politik.

6. Sarana partisipasi politik

   Dalam hal ini warga negara akan ikut serta dalam politik. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti pemilihan umum dalam menentukan perwakilan rakyat, mengikuti proses pembuatan dan pelaksanaan suatu keputusan politik, membayar pajak, mengikuti suatu partai politik, dan semacamnya. Mengikuti salah satu partai politik juga merupakan partisipasi dalam dunia politik, sehingga pada kesempatan ini suatu partai politik akan mengajak para anggotanya maupun masyarakat untuk ikut aktif dalam mempengaruhi proses perpolitikan.

7. Sarana kontrol politik

   Dalam suatu kebijakan maupun saat pelaksanaannya tentu tidak akan terlepas dari kesalahan, sehingga dalam kontrol politik ini akan dikemukakan kesalahan-kesalahan maupun penyimpangan dari suatu kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Nilai-nilai politik yang dianggap baik dan ideal nantinya akan menjadi tolak ukur dalam menentukan baik atau tidaknya suatu kebijakan yang telah dibuat dandilaksanakan. Kontrol politik ini dilakukan agar meluruskan kembali kebijakan tersebut. Pada fungsi control, partai politik harus bisa menggunakan tolak ukur yang sesuai dengan kesepakatan bersama.

## B. Peran Penting Partai Politik

Peran partai politik tidak hanya sebatas melancarkan misi terpenuhinya kepentingan politik, partai politik juga memiliki kepentingan penyebaran ideologi yang disepakati oleh partai tersebut. Partai politik bergerak sebagaimana ideologi yang disepakati, baik melalui program maupun propagandaterhadap masyarakat baik pada saat momentum politik maupun diluar dari pada itu. Tentu, demi tercapainya kepentingan-kepentingan suatu partai politik, keberpihakan terhadap rakyat adalah halyang penting diutamakan, karena mau bagaimanapun hubungan partai politik dengan rakyat harus mutualisme, simpati terhadap rakyat akan berbalik dukungan terhadap partai politik

Partai politik memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat maupun pemerintah sehingga partai politik dapat menjadi penghubung antara keduanya. Aspirasi-aspirasi masyarakat dapat ditampung oleh partai politik yang kemudian nanti dibicarakan pada rapat-rapat yang ada dan menghasilkan program, peraturan dan undang-undang bagi masyarakat.

Peran partai politik tidak hanya dibatasi dalam dunia perpolitikan atau pemerintahan namun lebihluas dari itu. Partai politik harus dapat berperan aktif juga dalam dunia pendidikan, ekonomi, demokrasi dan berbagai aspek lain yang berhubungan dengan masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan dengan banyaknya partai politik yang ada dapat semakin mudah aspirasi masyarakat tersampaikan.

## C. Peran Partai Politik dalam Pemilu

Pemilu adalah proses pengisian jabatan yang kosong di pemerintahan dengan melakukan pemilihan dan pengangkatan seseorang yang akan mengisi jabatan tersebut, sehingga pemilu merupakan salah satu instrumen penting yang wajib ada di dalam sistem politik suatu negara. Oleh karena itu, jabatan tersebut harus dilakukan dengan melalui pemilu. Sedangkan dalam KBBI, kata pemilu atau pemilihan umum diartikan sebagai pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara (untuk memilih wakil rakyat dansebagainya).

Dalam melaksanakan pemilu di Indonesia terdapat beberapa aturan yaitu pemilihan umumharus bersifat langsung, umum, bebas, jujur dana adil. Sedangkan dalam pelaksanaannya, pemilu sendiri diselenggarakan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang bekerja sama dengan pihak Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) serta pihak DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Masing-masing dari ketiga pihak di atas memiliki tugas yang sama yaitu berperan dalam penuntasan pelanggaran yang terjadi saat pemilu.

Jika dirincikan, ketiga pihak diatas memiliki perannya masing-masing dalam menjalankan pemilu. KPU adalah pihak yang menyelenggarakan pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, lalu Bawaslu bertugas sebagai pengawas dalam pelaksanaan pemilu diseluruhwilayah Indonesia. Sedangkan DKPP memiliki tugas sebagai pihak yang menangani pelanggaran kode etik di pelaksanaan pemilu.

Peranan partai politik sendiri di dalam pelaksanaan pemilu yaitu diantaranya adalah sebagai wadah bagi para calon-calon yang nantinya akan menduduki kursi jabatan, menyiapkan calon-calon tersebut. Dalam masyarakat, partai politik juga harus bisa menciptakan suasana pemilu yang kondusif agar tidak terjadi perpecahan dalam kesatuan bangsa. Hal itu dapat dilakukan dengan mengadakan sosialisasi terlebih dahulu kepada anggota partai maupun masyarakat. Selain itu, partai politik juga harus bisa meningkatkanpartisipasi masyarakat dan menumbuhkan kesadaran mereka akan pentingnya mengikuti pemilihan umum serta diharapkan dapat

mengurangi jumlah masyarakat yang memilih golput atau tidak melakukan pemilihan.

Partai politik juga harus bisa memberikan calon pejabat yang baik, dimana nantinya dapat mengayomi masyarakat, melahirkan wakil-wakil pejabat yang berkualitas, dapat menjadi panutan untuk masyarakat, berintegritas dan bekerja keras bukan hanya karena ingin memperkaya diri sendiri akan tetapi mensejahterakan masyarakatnya. Tentu dengan adanya peran partai politik ini dapat membantu KPU dalam melaksanakan pemilu yang aktif dan efektif.

## D. Peran Partai Politik dalam Demokrasi

Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana dalam suatu negara yang menganutnya, rakyat dapat mempunyai hak yang sama untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan. Dalam KBBI, demokrasi diartikan sebagai bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat; 2 gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

Di Indonesia, demokrasi saat ini dapat dikatakan belum sepenuhnya terjalankan dan mungkin berjalan hanya sebatas pemilu saja. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya pejabat-pejabat negeri yang lebih mengutamakan kekayaan dan kepentingan pribadinya. Belum lagi persoalan mengenai rezim yang sama-sama memiliki kepentingan tersendiri dan mereka dapat menguasai kursi-kursi pemerintahan dengan membeli aktor-aktor politik.Tentunya, dengan adanya partai politik sebagai wadah yang menghasilkan calon-calon pejabat nantinya harus bisa memberikan calon-calon yang berkualitas dan berdedikasi tinggi kepada masyarakat dan tidak melulu memikirkan kepentingannya sendiri.

Dalam aspek demokrasi, peran partai politik pun terkait dan tidak bisa dilepaskan dari pemilu. Adanya pemilu adalah salah satu cara masyarakat dapat mengikuti demokrasi, karena masyarakat terlibat saat pelaksanannya. Dapat dikatakan demokrasi karena pada saat pemilu rakyat diberikan kebebasan untuk menentukan siapa saja calon-calon wakil rakyat yang akan dipilihnya. Pelaksanaan pemilu yang bersifat demokratis pun merupakan syarat penting dalam pembetukan suatu negara, sehingga di dalamnya pemerintah tidak bisa memaksakan kehendak rakyatnya.

Menurut Muktie Fadjar pada tahun 2003 “Akan tetapi yang perlu diketahui, meskipun pemilu merupakan wujud nyata implementasi demokrasi, tidak selamanya pemilihanbersifat demokratis. Oleh karenanya,

pemilu sebagai salah satu aspek demokrasi juga harusdiselenggarakan secara demokratis. Pemilu yang demokratis bukan hanya sekedar lambang, tetapi pemilu yang demokratis haruslah kompetitif, berkala, inklusif dan definitif" (Muktie Fadjar: 2003). Oleh karena itu, pemilu dapat dikatakan demokratis jika di dalamnya terdapat nilai-nilai yang diantaranya yaitu:

1. Pemilu bersifat kompetitif, artinya dalam pelaksanaan pemilu harus bebas
2. Pemilu harus diselenggarakan dengan teratur
3. Pemilu harus dilakukan secara merata dan setiap rakyat Indonesia harus dapatmemiliki peluang yang sama dalam pelaksanaannya
4. Tidak memperlakukan suatu kelompok secara deskriminatif
5. Penyelenggara pemilu harus netral dan independen

Selain itu, menurut ketua Bawaslu Republik Indonesia yaitu Prof. Muhammad mengatakanbahwa terdapat lima syarat agar pemilu dikatakan demokratis dan berjalan sesuai rencanayaitu *Pertama*, regulasi yang jelas dan tegas. *Kedua*, peserta pemilu yang kompeten. *Ketiga*, pemilih yang cerdas. *Keempat*, birokrasi yang netral. *Kelima*, penyelenggara pemilu yang tidak memihak dan independen.

Adanya pemilu yang demokratis merupakan suatu harapan yang besar bagi rakyat Indonesia. Pemilihan umum dapat dikatakan demokratis jika saat pelaksanaannya warga negara dapat menentukan pilihannya secara LuBerJurDil yaitu langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Setiap warga negara memiliki satu hak suara untuk menentukan pilihannya.Satu hak suara warga negara Indonesia bernilai sama.

Makna dari kata langsung yaitu setiap warga negara Indonesia berhak memberikan suaranya tanpa perantara dan datang ke tempat pemilihan secara langsung atau tidak diwakilkan. Sedangkan makna umum yaitu bermaksud setiap warga negara Indonesia darisabang sampai merauke tanpa terkecuali memiliki kesempatan untuk mengikuti pemilu. Pemilu bersifat bebas bermakna bahwa setiap warga negara Indonesia dapat memilih pilihannya sesuai kemauannya sendiri tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun. Lalu, pemilu yang rahasia berarti ketika melakukan pemilihan hak suaranya tidak perlu diketahuioleh siapa pun. Sedangkan makna dari jujur yaitu dalam melakukan pemilihan umum setiap warga negara Indonesia hanya berhak menggunakan satu hak suaranya, tidak mewakilkanpilihannya dan jujur dalam segala tindakannya selama masa pemilu. Pemilu bersifat adil maka setiap warga negara Indonesia dan partai politik harus memiliki hak yang sama dan tentunya bebas dari kecurangan apapun.

Dalam perjalanan pelaksanaan pemilu, partai politik telah berpartisipasi

dan memberikan bukti yang signifikan, dimana partai politik dapat memberikan calon-calon yang akan naik mengisi kursi jabatan di pemerintahan. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa partai politik merupakan wadah penseleksian calon-calon pemimpin daerah bahkan nasional. Disisi lainnya, partai politik telah turut andil dalam mensosialisasikan pentingnya pemilu terhadap anggota-anggota partainya. Akan tetapi hal ini harus lebih ditingkatkan kepada masyarakat yang lebih luas agar pemahaman tersebut dapat diterima dan dimengerti oleh setiap warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Bukti bahwa partai politik telah berpartisipasi penuh, tidak hanya terjadi ketika pemilu saja akan tetapi kontribusi itu juga terasa dalam sistem perpolitikan nasional. Maka, jika kinerjapartai politik ditingkatkan secara terus menerus dan lebih baik lagi tentu akan berpengaruhbesar pada sistem politik dan demokrasi di negara ini.Oleh karena itu, partai politik harusdapat meningkatkannya dari aspek kualitas, kuantitas maupun cara kerjanya agar menuwujudkan aspirasi rakyat dan secara tidak langsung meningkatkan kualitas demokrasiitu sendiri.

Melihat realitasnya, ketidak maksimalan partai politik dalam penerimaan aspirasi masyarakat ini disebabkan oleh beberapa hambatan yang ada di dalam partai politik itu sendiri. Misalnya, karena partai politik tidak memiliki pendanaan yang memadai sehinggadalam pendanaan sangat bergantung pada dana yang diberikan oleh pemerintah, iuran anggota maupun pendanaan dari pihak lain baik pribadi maupun perusahaan.

Hal ini tentu sangat mengakibatkan dan menjadi faktor yang mendukung terhadap kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh partai politik sehingga terjadinya kemandirian partai politik dalam pencarian dana. Belum lagi permasalahan mengenai pengelolaan keuangan itu sendiri sehingga terjadinya laporan pertanggungjawaban yang tidak transparan. Akibat dari terjadinya hal ini, membuat partai politik menjadi sibuk mencari tambahan pendanaan dan melalaikan tugasnya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

Disisi lainnya, permasalahan yang kerap terjadi diantara partai politik adalah mengenai pertarungan antar kepentingan pemimpinnya sehingga kebanyakan partai politik cenderung sibuk berselisih diantara mereka, baik sesama anggota partai maupun dengan lawannya. Bahkan terkadang dari beberapa kasus mereka cenderung mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi sehingga dalam pengambilan suatu keputusannya. Hal itu diakibatkan oleh pertikaian yang terjadi serta mendahulukan kepentingan pribadi diatas

kepentingan partainya.

Maka sebetulnya, demokrasi bukanlah hanya sekedar teori atau ideologi semata namun lebih dari itu, Demokrasi merupakan suatu agenda nyata yang di dalamnya terkonsep mengenai aksi dan program yang akan menjawab kebutuhan-kebutuhan mendasar dari sistem politik yang demokratis, berkeadilan dalam ekonomi, sosial dan kultural. Di aspekinilah peran partai politik sangat penting untuk dilakukan.

## E. Peran Partai Politik dalam Ekonomi

Ekonomi dapat diartikan sebagai proses mengelola keuangan yang meliputi produksi, distribusi dan konsumsi barang maupun jasa. Dalam ekonomi juga seringkali membahas mengenai pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Menurut KBBI, ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang- barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan); pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga; tata kehidupan perekonomian (suatu negara); urusan keuangan rumah tangga (organisasi, negara).

Sebagai negara yang memiliki kepulauan yang banyak dengan berbagai keberagamannya dan juga kekayaan alamnya, Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi dengan berbagai potensi yang dimilikinya. Kekayaan alam serta keberagaman tersebut tentu dapat menjadi faktor yang bisa meningkatkan ekonomi negara Indonesia.

Melihat kenyataannya sekarang, Indonesia kini justru masih menjadi negara berkembang.Masyarakatnya sendiri pun cenderung jauh dari kata sejahtera dan hidup dalam kemiskinan. Selain itu pada aspek perekonomiannya pun belum merata, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, bukan hanya satu atau dua saja.

Faktor yang menyebabkan hal ini terjadi yaitu yang pertama adalah karena pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi dan terus bertambah sehingga membuat terjadinya kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk dapat menyebabkan faktor lainnya seperti meningkatnya angka pengganggguran yang mengakibatkan maraknya kemiskinan. Hal ini disebabkan karena orang-orang yang mencari pekerjaan lebih banyak daripada ketersediaan lapangan kerjanya. Selanjutnya yaitu faktor tidak meratanya pembangunan infrastruktur, dimana pembangunan hanya terjadi

di pusat-pusat kota atau wilayah tertentu saja sedangkan desa-desa terpelosok tidak tergarap sehingga terjadinya kesenjangan yangsangat jelas serta pembangunan yang tidak merata.

Faktor lainnya yaitu karena rendahnya kualitas hidup masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh penghasilan masyarakat yang rendah dan mengakibatkan mereka berfokus pada aspek pemenuhan kebutuhan pokok saja, tidak terpikirkan mengenai pendidikan,

kesehatan dan hal di luar itu. Adanya faktor ini membuat masyarakat semakin terbelakang dan menjadi alasan dari rendahnya kualitas hidup mereka.

Salah satu faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap rendahnya ekonomi Indonesia adalah karena masih banyaknya korupsi yang terjadi atau biasa disebut KKN (Korupsi, kolusi dan nepotisme). Sampai saat ini budaya tersebut belum bisa diatasi dengan baik karena jika melihat realitasnya banyak para pejabat yang melakukan korupsi namun tidak mendapat ganjaran yang tepat. Selain itu, kebiasaan kecil KKN ini juga harusnya dapat dihilangkan dari masyarakat seperti uang pelican atau pungutan liar sehingga hal-hal tersebutlah yang dapat menjadi faktor dalam meningkatkan kemiskinan masyarakat.

Lantas dalam mengurangi faktor tersebut tidaklah mudah jika diserahkan seluruhnya kepada pemerintah, banyak pula tugas yang dapat kita lakukan sebagai orang yang sadar untuk mengurangi hal tersebut. Selain itu dalam konteks ini, partai politik pun dapat turut andil untuk mengatasinya. Melihat realitasnya, politik dan ekonomi memiliki keterkaitan yang sangat erat bahkan dapat dikatakan jika kita dapat menguasai perekonomian maka seseorang itu dapat menguasai pula politik.

Pada penjelasan di halaman sebelumnya sudah dipaparkan bahwa peran partai politik tidakhanya terbatas di ranah pemilu saja melainkan juga pada aspek-aspek lain yang bersangkutan langsung dengan masyarakat, seperti ekonomi. Akan tetapi antara politik dan ekonomi sendiri terdapat keterkaitan yang sangat erat terlebih menjelang pemilu, isu-isu mengenai ekonomi kerap kali diperbincangkan. Selain itu pun, tentunya partai politik harusdapat berkontribusi kepada masyarakat dalam bidang ekonomi.

Partai politik harus bisa menjadikan sila kelima yaitu keadilan seluruh rakyat Indonesia benar-benar terjadi sehingga tidak ada lagi kesenjangan diantara masyarakat itu sendiri. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan partai politik pada aspek ini, antara lain yaitu mengadakan sosialisasi

terhadap masyarakat tentang pentingnya mengenyam pendidikan serta pentingnya memberantas kemiskinan.

Hal ini tentu dapat dilakukan melalui edukasi sedari dini kepada masyarakat mulai dari kalangan menengah hingga kalangan bawah. Akan tetapi tentu dalam menjalankannya akan terjadi banyak hambatan, terlebih lagi terkadang masyarakat bawah menganggap bahwa dirinya maupun keluarganya tidaklah bisa menjadi seseorang berpendidikan tinggi apalagi mengubah nasib menjadi orang kaya. Tentu hal ini dapat dilakukan dengan cara aksi nyata dengan memberikan contoh-contoh yang pasti bahwa ada dari kalangan bawahyang kini menjadi seorang dokter, polisi, dosen dan lainnya dengan mengenyam pendidikan.

Dalam menjalankan sosialisasi tersebut, tentu sebuah partai harus melakukannya tanpa sebatas omong kosong belaka. Dibutuhkan program nyata yang dapat mendukung sosialisasi tersebut agar dapat diterima oleh masyarakat. Misal, saat menjalankan sosialisasi mengenai pendidikan maka partai politik mengadakan juga program edukasi lain untuk mengatasi buta huruf yang dilakukan seminggu dua kali atau dengan melakukan edukasi mengenai minat bakat dari kalangan remajanya.

Hal tersebut tentu sebetulnya kurang diminati oleh kalangan bawah karena mereka akan berpikiran mengenai uang, sehingga jika ada kegiatan yang tidak berkaitan dengan uang atau bahkan menghambat mereka dari suatu yang menghasilkan uang maka merekacenderung menolaknya. Oleh karena itu dibutuhkanlah program yang nantinya membantu untuk mensejahterakan masyarakat yaitu dengan mengadakan pelatihan-pelatihan keterampilan yang nantinya dapat menjadi suatu hal yang menghasilkan.

Pada prakteknya tentu dibutuhkan analisis terlebih dahulu oleh tim partai politik dalam menjalankan program tersebut. Semisal di daerah tersebut terdapat ibu-ibu yang jago membuat kue maka diadakanlah pelatihan-pelatihan yang dapat membuat mereka terus berkembang. Di daerah lain programnya bisa membuat recycle dari bahan bekas yang nantinya menjadi barang berguna dan memiliki nilai tinggi. Hal-hal inilah yang nantinya dapat membatu masyarakat menjadi sejahtera secara perlahan.

Program-program seperti ini sangatlah penting karena dapat menaikan taraf hidup dari masyarakat itu sendiri. Selain itu dalam melakukan program ini, partai politik dapat berkolaborasi dengan komunitas, kelompok tertentu maupun lembaga lain yang dapat membantu

berjalannya program tersebut. Maka dalam pelaksanaan maupun pencarian dananya dapat dilakukan dengan bekerja sama.

Peran partai politik yang lainnya dalam bidang ekonomi adalah dengan menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Hal tersebut dapat mengurangi rantai kemiskinan, mengingat salah satu faktor yang dapat memperburuknya adalah pengangguran. DEngan adanya lapangan kerja yang banyak, masyarakat jadi lebih mudah untuk mencari penghasilan misalnya dengan membuka koperasi, toko-toko atau lapangan pekerjaan yang lain.

Program-program di atas merupakan peran partai politik yang dapat menjadi usaha dalam mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia dari dalam dirinya sendiri. Adapula hal-hal yang dapat dilakukan yaitu dengan pembuatan hokum-hukum yang pastinya dapatmenguntungkan bagi masyarakat dengan strata ekonomi manapun, terkhususnya masyarakat kalangan bawah.

Menurut Gus Ami yaitu ketua umum DPP PKB mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang diproduksi harus bersinggungan langsung dengan kondisi riil masyarakat. Di situlah sesungguhnya tanggungjawab besar eksistensi sebuah partai politik. Selain itu ia juga menambahkan bahwa sebuah arah baru politik kesejahteraan hanya bisa diwujudkandengan cara menggerakkan bandul pendulum kebijakan yang dilahirkan baik oleh pemerintah, parlemen, bahkan partai politik, ke arah perubahan terhadap kesejahteraan hidup masyarakat.

## F. Peran Partai Politik dalam Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu proses yang di dalamnya meliputi pembelajaran, pengajaran,pelatihan dan mendidik. Dalam pendidikan, hal yang biasa dipelajari yaitu mengenai pengetahuan dan keterampilan serta bisa juga mengenai penelitian. Sedangkan menurut KBBI, pendidikan diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran ataupun pelatihan.

Pendidikan merupakan sebuah usaha dalam mendidik seseorang untuk mengubah perilaku, pola pikir serta kebiasan kurang baik menjadi baik sehingga dalam tahapannya berkelanjutan dan dapat dikatakan tidak pernah berakhir. Dalam aspek kenegaraan, pendidikan sendiri berfungsi untuk mengurangi dan menghilangkan penderitaan rakyat dari kebodohan serta

mengembangkan kemampuannya untuk menjadi bangsa yang lebih baik lagi.

Adapula fungsi pendidikan yang lainnya adalah sebagai salah satu cara untukmengembangkan kehidupan masyarakat agar menghasilkan SDM yang berkualitas tinggi,sebagai alat kontrol sosial, pelestarian budaya yang dapat dilakukan dengan pembelajarankesenian, bahasa daerah, nilai dan norma dan lainnya, serta sebagai alat perubahan social yaitu salah satunya reproduksi budaya. Oleh karena itu tentu pendidikan sangatlah penting dilakukan karena jika melihat jauh ke depan, nantinya orang-orang yang berpendidikanlah yang dapat mengevaluasi maupun mengkritisi realita politik yang ada.

Peran partai politik dalam pendidikan diantaranya adalah membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan seminar, sosialisasi dan pelatihan seperti pembelajaran buta huruf, minat bakat dan lainnya.Akan tetapi, tidak hanya itu saja. Hal penting lainnya yang perlu dikembangkan dalam masyarakat yaitu pendidikan politik, karena merupakan kunci utama dari aspek perpolitikan.

Tak kalah penting, peran partai politik dalam pendidikan yaitu melaksanakan pendidikan politik itu sendiri. Menurut Alfian (dalam Kartono, 2000: 97), pendidikan politik (dalam arti yang lebih ketat) dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses pendidikan politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul-betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Hasil penghayatan ini akan melahirkan sikap dan tingkah laku politik baru yang mendukung sistem politik yang ideal itu bersamaan dengan itu lahir pulalah kebudayaan baru.

Pendidikan politik ini penting untuk dilakukan, terlebih lagi pendidikan politik bagimasyarakat kecil. Melihat realitanya, masih banyak pendidikan di desa-desa yang terbengkalai, entah karena fasilitas sekolahnya yang tidak layak pakai, pengajarnya yang tidak memadai, kurangnya tenaga pendidik, pengajar yang hanya digaji sebatas honorer atau bahkan ketidak mampuan orang tua dalam menyekolahkan anaknya akibat faktor ekonomi.

Seperti yang sudah dibahas pada halaman-halaman sebelumnya, Indonesia masih merupakan negara berkembang. Hal ini diakibatkan diantaranya oleh faktor ekonomi dan pendidikan. Kedua aspek ini sangat berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Banyaknya orang yang tidak

bisa melanjutkan pendidikan dan karena pendidikan yang rendah, akan mempengaruhi jalannya pendidikan politik bahkan pada aspek politik itu sendiri. Maka, peran politik dalam masalah ini yaitu dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menjalankan pendidikan dengan baik dan setinggi-tingginya. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengimplementasikan sila ke 5, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Seseorang yang mengikuti suatu partai politik dapat dikatakan bahwa ia telah berpartisipasi pada aspek politik dengan sukarela, namun bagi yang belum memahami politik maka dibutuhkanlah pendidikan politik yang di dalamnya meliputi pengajaran dan pemahaman terhadap kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga nantinya mereka akan bisa juga menjalani perpolitikan dan menjalankan demokrasi dengan baik.

Adanya pendidikan politik akan menghasilkan sikap baru dalam politik. Selain itu dengan adanya pendidikan politik, seseorang dapat memahami dan mengaitkan segala fenomena yang terjadi dalam dunia politik sehingga nantinya dapat meningkatkan kesadaran mengenai perpolitikan serta menjadi upaya dari usaha dalam mewujudkan masyarakat yang adil sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang.

Dalam pelaksanaannya, partai politik harus bisa untuk membagi pendidikan politik sesuai dengan target masyarakatnya. Misal dibagi sesuai golongan usia seperti generasi muda atau generasi tua. Dengan adanya pendidikan politik pun berguna untuk menjadikan negara yang lebih baik lagi serta tidak menimbulkan ketidak adilan untuk suatu golongan di masyarakat. Maka, setelah memahami pendidikan politik masyarakat diharapkan untuk bisa mengevaluasi program dan pelaksanaan yang dibuat oleh pemerintah serta tidak menyalahkan keputusan-keputusan pemerintah dengan cara yang kurang baik.

Keberhasilan pendidikan politik yang dilakukan oleh suatu partai politik dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam politik. Contoh kecilnya ketika pemilu, partai politik yang berhasil menerapkan pendidikan politik akan secara tidak langsung mampu membuat masyarakatnya ikut serta dalam pemilah umum dan sedikit yang tidak memilih (golput) atau bahkan sama sekali tidak ada yang golput.

Untuk mencapai keberhasilan tadi, dibutuhkan strategi yang tepat dalam pelaksaan pendidikan politik tersebut. Selain itu, dibutuhkan pendekatan-pendekatan yang efektif dan sesuai dengan target sehingga mampu menyentuh berbagai golongan tanpa terkecuali. Maka nantinya ketika masyarakat sudah paham, akan menghargai pemerintah dan memberikan

kritik terbaik jika pemerintah tersebut memang salah.

Dari hal sekecil ini saja perlahan bisa membuat Indonesia menjadi negara yang maju, karena salah satu syarat negara maju ialah negara yang dapat menjaga stabilitas politik dankeamanan negaranya. Untuk itu, diperlukan juga kesadaran dari masyarakat sendiri agar mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh partai politik sebagai usaha melakukan pendidikan politik seperti kegiatan-kegiatan yang sudah disebutkan di atas.

## G. Peran Partai Politik dalam Menanggulangi Korupsi

KKN atau merupakan singkatan dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Di Indonesia sendiri kata KKN ini bukanlah menjadi suatu kata yang asing dan malah sering terdengar di kalangan warga Indonesia. Dapat dikatakan bahwa KKN bukan lagi sebuah fenomena yang terjadi di Indonesia akan tetapi sebuah kebiasaan yang terjadi secara terus menerus. Hal inipun sangat akrab terdengar karena sudah mendarah daging di pemerintahan Indonesia. Masalah mengenai KKN ini seringkali menjadi perbincangan hangat diantara warga Indonesia sendiri karena tak henti-hentinya permasalahan KKN ini terus berulang setiap tahunnya walau pun sudah berganti kepengurusan.

Dengan adanya korupsi tentu membuat ekonomi Indonesia menjadi terhambat serta menyebabkan ketidakadilan yang terjadi di masyarakat sehingga Sumartana (1999; hlm 97-102) mengatakan bahwa Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) akhir-akhir ini dianggap sebagai wujud paling buruk dan paling ganas dari gejala kemerosotan moral darikehidupan masyarakat dan bernegara di negeri kita.

Adanya KKN juga dapat merugikan masyarakat dan negara karena dalam KKN hanya menguntungan pihak tertentu saja dan bahkan sangat merugikan masyarakat kecil. Oleh karena itu dibutuhkanlah tindakan-tindakan pencegahan dalam menghadapinya. Padaperiode pemerintah B.J Habibie, pengaturan mengenai KKN telah dibuat dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang menjelaskan mengenai “penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.”

Dalam Undang-undang tersebut KKN diartikan sebagai:

6. Korupsi

   Korupsi merupakan suatu tindak pidana yang merugikan dengan cara menyalah gunaanuang milik bersama (negara, organisasi, dan lainnya) untuk kepentingan

pribadi maupun kelompok tertentu.

7. Kolusi

   Kolusi yaitu kerja sama yang dilakukan dengan cara melawan hukum antarpenyelenggara negara.

8. Nepotisme

   Perbuatan penyelenggara negara yang melawan hokum dan menguntungkankepentingan pribadi dan keluarga di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Dari dulu hingga sekarang, tindakan korupsi di Indonesia masih banyak terjadi dan bukanlah suatu hal yang baru. Kasus korupsi pada negara Indonesia dapat dikatakan terbilang cukup banyak. Akan tetapi tidak dipungkiri, beberapa kasus korupsi di Indonesia memang sudah diberantas oleh KPK.

Pada permasalahan korupsi, partai politik juga memiliki perannya. Peran ini dapat dimulai dari dalam partai politiknya terlebih dulu dengan cara membuat komitmen antar anggotanya. Dalam pendanaan pun seharusnya tidak mengandalkan dari orang- orang yang duduk di kursi legislatif maupun eksekutif agar peran dalam pemberantasankorupsi ini dapat dilakukan dengan lancar, karena pejabat-pejabat tersebut tentu sudahmenikmati keuntungan politis.

Hal lain yang dapat dilakukan oleh partai politik adalah dengan cara menyaring calon- calon yang akan duduk di kursi pemerintahan nantinya. Tentunya hal yang seperti ini sangatlah susah untuk diatasi jika bukan dari keyakinan diri sendiri namun hal-hal kecil seperti inilah setidaknya yang dapat dicegah dan dilakukan oleh partai politik.

Peran lainnya yang dapat dilakukan oleh partai politik dalam pemberantasan korupsi adalah dengan menguatkan KPK dengan memberdayakan kadernya di legilatif. Jangansampai kasus korupsi itu sendiri banyak terjadi di kalangan partainya yang akan mengakibatkan KPK tersandera. Selain itu, partai politik pun harus bisa mendukung upaya-upaya KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pemberantasan korupsi ini juga harus dapat dipahami oleh masyarakat pada umumnya, maka sosialisasi terkait dengan hal tersebut dapat menjadi usaha untuk mengatasi maraknya korupsi, lalu tidak lupa juga sosialisasi ini dilakukan dalam partai politiknya. Dalam menjalankan peran untuk memberantas korupsi di masyarakat, partai politik bisa melakukannya dengan pemahaman mengenai korupsi yang kerap terjadi di masyarakat seperti pungutan liar. Hal-hal ini walaupun terlihat seperti

suatu tindakan yang kecil namun dapat membantu Indonesia dalam mengurangi maraknya kasus korupsi.

# BAB III
# DEMOKRASI DAN PARTAI POLITIK

## A. Pengertian Demokrasi

Demokrasi menjadi pembicaraan yang sedang aktual di akhir abad ke-20 ini. bukan hanya di kalangan akademisi dan praktisi politik saja, tetapi pers pun ikut membangun konsep demokrasi di Indonesia. Itulah sebabnya mengapa demokrasi menjadi kajian yang menarik baik di kampus, seminar diskusi maupun di kantor-kantor. Hal tersebut dapat mendorong tumbuhnya kesadaran tentang demokrasi secara bersamaan di kalangan masyarakat, atau dapat dikatakan bahwa telah terjadi kesadaran secara kolektif tentang demokratisasi.

Secara garis besar demokrasi adalah sebuah sistem sosial-politik modern yang paling baik dari sekian banyak sistem maupun ideologi yang ada dewasa ini. Menurut pakar hukum Moh.Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi dalam sistem bermasyarakat dan bernegara.Pertama, hampir semua Negara didunia menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental.kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan yang secara esensial telah memberikan arahan bagi peranan masyarakat yang menyelenggarakan Negara sebagai organisasi tertingginya. Karena itu, diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada masyarakat tentang demokrasi

Secara etimologis "demokrasi" terdiri atas dua kata "demos" yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan "cratein" atau "cratos" yang berarti kekuasaan, kedaulatan atau pemerintahan. Gabungan dari kedua kata tersebut memiliki arti suatu keadaan Negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Kartini Kantono yang mengemukakan bahwa "Demokrasi adalah kekuasaan rakyat yang berbentuk pemerintahan dengan semua tingkatan rakyat ikut mengambil alih bagian dalam pemerintahan". Demokrasi sebagai suatu gejala masyarakat yang berhubungan erat dengan perkembangan negara, mempunyai sifat yang berjenis-jenis. Masing masing seperti terlihat dari sudut kemasyarakatan yang ditinjaunya.

Kemudian Sukarna juga mengemukakan pendapatnya dalam buku Demokrasi Versus Kediktatoran sebagai berikut "Democracy is a form government in which the will of the governed executed (put into practice)

without causing any harm to human rights" Bila diterjemahkan demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang akan menjalankan pemerintahannya tanpa menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Pendapat di atas menunjukkan bahwa dalam negara demokrasi dikenal adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia. Demokrasi memberikan kebebasan sepenuhnya kepada setiap individu untuk merealisasikan diri dan mengaktualkan setiap gengsi dan bakatnya menjadi manusia utuh yang menyadari jati dirinya. Demokrasi memberikan kebebasan penuh untuk berkarya dan berpartisipasi dalam bidang sosial politik di tengah lingkungan sendiri sesuai dengan fungsi dan misi hidup setiap orang. Oleh karena itu demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang memungkinkan individu untuk hidup bebas dan bertanggung jawab.

Dalam demokrasi terkandung beberapa nilai yang ideal. Nilai-nilai demokrasi menurut Henry B. Mayo dalam bukunya Introduction to Democratic Theory yang dikutip Miriam Budiardjo" ... adalah nilai-nilai yang secara logika mengikuti atau timbul dari tindak tanduk sesungguhnya dari suatu sistem demokrasi". Sedangkan sistem demokrasi yang dimaksud di sini adalah sistem politik yang demokratis di mana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh setiap wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam keadaan terjaminnya kebebasan politik (A democratic political system is one in which public policies are made on majority basis, by representatives subject to effectif popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political freedom). Uraian di atas memperlihatkan asas asas demokrasi sebagai suatu sistem politik. Di samping itu demokrasi tidak hanya merupakan suatu sistem pemerintahan saja, tetapi juga suatu gaya hidup serta tata masyarakat yang karena itu juga mengandung unsur-unsur moril.

Pengertian demokrasi menurut para ahli yaitu:

1. Joseph A. Schmeter mengatakan demokrasi merupakan suatu perencanaan Institusional untuk mencapai keputusan politik. Dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.
2. Sidney Hook mengatakan demokrasi adalah bentuk pemerintahan. Keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung, didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

3. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl mengatakan demokrasi sebagai suatu systems pemerintahan dimana pemerintah diminta tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka diwilayah public oleh warga Negara.
4. Henry B. Mayo mengatakan demokrasi sebagai system politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.
5. Demokrasi menurut Anwar Ibrahim, adalah pemberian kebebasan kepada warga negara, sedangkan kegagalan atau keberhasilan ekonomi menyangkut sistem yang diterapkan.
6. Affan Gaffar (2000) memaknai demokrasi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara normatif (demokrasi normatif) dan empirik (demokrasi empirik). Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. Sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi yang dalam perwujudannya pada dunia politik praktis.

Dari beberapa pendapat di atas dapatlah disimpulkan bahwa sebagai suatu sistembermasyarakat dan bernegara hakikat demokrasi adalah peranan peran utama rakyat dalamproses social dan politik. Sebagai pemerintahan di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal yaitu:

1. Pemerintahan dari rakyat (government of the people)

Pemerintahan dari rakyat merupakan suatu pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintahanyang mendapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi.

2. Pemerintahan oleh rakyat (government by the people)

Pemerintahan oleh rakyat merupakan bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atasnama rakyat, bukan atas dorongan pribadi.

3. Pemerintahan untuk rakyat (government for the people)

Pemerintahan untuk rakyat merupakan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat.

**B. Demokrasi dalam Perspektif Barat**

Istilah demokrasi pertama kali diciptakan oleh sejarawan Yunani, Herodotus, pada abad ke-5 SM. *Satu*, Demokrasi berasal dari kata “demos” (masyarakat) dan “Krateria” (aturan atau kekuasaan). *Dua*, Menurut Lane dan Errsson, demokrasi berarti kekuasaan di tangan rakyat atau pemerintahan oleh

dan untuk mayoritas. *Tiga*, dalam tahun 431 SM, Pericles, seorang negarawan ternama dari Athena, mendefinisikan demokrasi dengan mengemukakan beberapa kriteria: (1) Pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi rakyat yang penuh dan langsung; (2) Kesamaan di depan hukum; (3) pluralisme, yaitu penghargaan atas semua bakat, minat, keinginan dan pandangan; (4) penghargaan terhadap suatu pemisahan dan wilayah pribadi untuk memenuhi dan mengekspresikan kepribadian individual. 4 Menurut Robert A. Dahl, demokrasi memberikan berbagai kesempatan kepada anggota masyarakat untuk:

1. Partisipasi Yang Efektif.
2. Persamaan Dalam Memberikan Suara.
3. Mendapatkan Pemahan Yang Jernih.
4. Melaksanakan Pengawasan Akhir Terhadap Agenda.
5. Pencakupan Orang Dewasa.

Adapun pengertian demokrasi dapat dilihat dari dua sisi, pengertian secara sempit dan pengertian secara luas. Secara sempit, menurut Lane dan Errsson, demokrasi dapat didefenisikan sebagai suatu jenis sistem pemerintahan. Sedangkan Arblaster berpendapat demokrasi adalah suatu aturan kelembagaan dalam rangka mengambil suatu keputusan politik yang mana masing-masing orang memiliki kekuatan untuk memutuskan dan berjuang secara kompetitif untuk memperoleh dukungan atau suara rakyat. Dalam pengertian lebih luas, menurut Levinger, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai suatu bentuk pemerintahan, tetapi lebih dari itu dimaknai juga sebagai undang-undang dasar, pemilihan umum, dan aturan hukum. Demokrasi juga menurut Nielsen dapat diartikan sebagai cara hidup, adanya keinginan untuk berkompromi, toleransi, dan kesediaan mendengar dan menerima pendapat orang lain.

Kalau kita mencermati pengertian di atas, pada dasarnya demokrasi adalah hal yang dapat memberikan peluang kepada masyarakat untuk senantiasa berjuang dan menyampaikan suara hatinya sehingga mendapatkan hak dan kewajiban dalam menjalani kehidupan. Artinya masyarakat mempunyai kebebasan dalam memperjuangkan hak-hak mereka dalam berbagai persoalan.

Ada berbagai macam perspektif yang dipahami tokoh barat mengenai demokrasi, yaitu liberal, komunitarian, dan kritis.7 menurut Gutex, demokrasi liberal didasarkan pada beberapa asumsi yaitu adanya kebebasan atau otonomi seseorang. Oleh karenanya pemerintah tidak boleh campur tangan terhadap kebebasan individu. Seseorang merasa bebas, mampu membentuk,

memperbaiki, dan meraih tujuannya. Persaingan antar individu wajar terjadi ketika masing masing orang berupaya meraih dan memenuhi kepentingannya. Dalam arena politik, kewarganegaraan merupakan instrumen untuk meraih tujuan non-politis dari pribadi-pribadi yang otonom dalam menentukan pilihannya, sementara aktivitas politik dikonseptualisasikan dalam rangka meletakkan aturan legal tentang hubungan sosial antar-individu dalam memperoleh kepentingan masing-masing.

Dalam perspektif liberal, kebebasan mensyaratkan tidak ada pemaksaan pemerintah, pembatasan peran pemerintah, dan kedaulatan individu. Demokrasi liberal memegang teguh prinsip otonomi individu. Oleh karenanya, negara tidak memiliki hak untuk mencampuri kehidupan warga negaranya, kecuali dalam keadaan tertentu. Peran pemerintah adalah menjaga hak fundamenal individu untuk hidup, kebebasan, dan hak milik. Jika pemerintah menyalahgunakan kekuasaan, rakyat memiliki hak untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintahan dan menggantikannya dengan pemerintahan baru yang dapat melindungi kebebasan mereka.

Dalam perspektif komunitarian, individu ditempatkan dalam konteks sejarah dan sosial. Kebebasan individu harus disinergikan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Cohen dan Arato, kesalehan publik diwujudkan dalam bentuk amal komunal warga negara yang seharusnya diintegrasikan dalam lembaga masyarakat di seluruh tingkatan dan menjadi perilaku keseharian, adat, dan sentimen moral dari setiap warga negara.

Komunitarianisme adalah paham yang berseberangan dengan individualisme yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: (a) tidak mereduksi hak-hak pribadi dan signifikansi hak bersama, lembaga, hubungan, nilai dan semacamnya; (b) penempatan nilai tidak hanya bagi individu saja namun juga secara sosial setiap individu dalam masyarakat.

Dalam perspektif kritis, menurut Giroux demokrasi dipandang sebagai pertarungan atau perjuangan ideologi yang digerakkan oleh konsep persaingan kekuasaan, politik, dan komunitas. Wilayah publik yang demokratis memberi peluang bagi kelompok marginal untuk berpartisipasi dalam membentuk, mempengaruhi, dan mengkritik opini publik. Demokrasi dapat tumbuh apabila ada jaminan terhadap kedaulatan masyarakat atau otonomi publik dan otonomi pribadi. Otonomi pribadi dapat diperoleh melalui otonomi publik, yang membentuk kedaulatan masyarakat (rakyat). Menurut Chamber, otonomi komunikatif berkaitan dengan otonomi individu, yang merujuk kepada kebebasan individu sebagai anggota masyarakat untuk

membentuk dan menetapkan norma-norma penting, makna, nilai, dan identitas melalui tindakan komunikasi.

Demokrasi mengandung dua elemen penting, yaitu kemerdekaan atau kebebasan, dan kesetaraan.8 Kebebasan oleh Roshwald diartikan sebagai suatu kemampuan untuk bertindak berdasarkan keinginan seseorang. Kebebasan individu meliputi kebebasan berbicara atau berekspresi, kebebasan beragama, bebas dari bahaya dan rasa takut, bebas dari kekurangan (kelaparan), bebas dalam berfikir, bebas berserikat, termasuk kebebasan bagi setiap individu untuk berpartisipasi dalam pembentukan pemerintahan sebagai hak dasar dari manusia. Kesetaraan memiliki berbagai bentuk. Setiap manusia yang memiliki latar belakang berbeda seperti ras, etnik, agama atau status ekonomi seharusnya memiliki hak yang sama; yaitu mereka harus diperlakukan secara adil di hadapan hukum.

Sementara itu, Rapar menyebutkan, Plato salah seorang pemikir Yunani, memberikan kritikan tajam terhadap sistem demokrasi (kebebasan) individu yang tanpa batas. Bagi Plato, demokrasi yang memberi tempat yang terlalu besar bagi kebebasan individu bukanlah bentuk idaman, bahkan ia menempatkan demokrasi diurutan keempat dari kemerosotan bentuk negara ideal atau dalam urutan kedua dari bentuk negara yang terpuruk.

Karena demokrasi memperjuangkan dan terlampau menyanjung persamaan derajat dalam hampir semua hal serta mendewa-dewakan kebebasan individual, maka plato mengatakan bawa negara demokrasi itu "penuh sesak dengan kemerdekaan dan kebebasan berbicara dan setiap orang dapat berbuat sesuka hatinya". Kebebasan yang seperti itulah yang membawa bencana bagi negara dan warganya, karena kebebasan yang demikian itu yang akan melahirkan anarki dan dari anarkilah tirani tercipta.

Plato memberi gambaran yang jelas bahwa demi persamaan derajat, demokrasi membuat negara penuh sesak dengan kebebasan. Segala sesuatu boleh dibuat oleh setiap orang demi kebebasan. Karena persamaan derajat dan kebebasan maka ada banyak hal yang tidak pantas akan terjadi. Orang-orang tua akan ketakutan terhadap anak-anak dan akan bersikap seperti anak-anak agar mereka dapat disebut sebagai orang yang tau menghargai persaaan derajat dan kebebasan. Anak pun akan kehilangan penghormatan terhadap orang tua mereka dan akan bersikap seperti orang tua demi persamaan derajat dan kebebasan. Para guru dan pembina akan ketakutan melihat murid mereka dan akan berusaha untuk menyenangkan murid demi meraih perkenan hati anakanak didik mereka itu. Murid pun lalu merendahkan guru dan pembina mereka atas nama persamaan derajat dan kebebasan. Akibatnya ialah

runtuhnya seluruh norma hidup dan standar moralitas. Segala sesuatu dihalalkan demi persamaan derajat dan kebebasan.

Sepertinya apa yang diperjuangkan dan dikembangkan oleh dunia barat dewasa ini adalah sistem demokrasi yang mendapat kritikan Plato, salah seorang tokoh pemikir Yunani yang telah penulis sebutkan di atas, bukan demokrasi yang benar dalam pandangan syariat. Buktinya banyak terjadi penyimpangan dalam masyarakat karena telah memberlakukan prinsip kebebasan, yang terkadang yang salah pun dibenarkan sementara yang benar dan baik tidak menjadi pilihan. Misalnya melakukan pembenaran terhadap suatu perkara yang salah demi kebebasan dan kepentingan pribadi (individu) dengan mengedepankan suara terbanyak.

Amerika Serikat, negara yang menganut sistem demokrasi ternyata juga tidak sepenuhnya menjalankan seperti apa yang mereka kampanyekan kepada masyarakat dunia khususnya umat Islam. Buktinya isu mengenai kesetaraan gender yang mereka kampanyekan dan meminta masyarakat dunia mengikutinya ternyata mereka sendiri tidak melakukannya. Ini dapat diketahui dari sangat sedikitnya keterlibatan perempuan dalam berpartisipasi menjadi pemimpin negara di Amerika Serikat. Dalam sejarahnya Amerika belum pernah memberi peluang kepada perempuan berpartisipasi untuk menjadi presiden. Menurut Sulaiman Tripa, sepanjang sejarah kepresidenan Amerika Serikat yang jumlahnya 43 presiden sejak presiden pertama, George Washington yang terpilih dua kali pada tahun 1789 dan 1792, belum ada satu pun presiden Amerika Serikat dari kaum wanita. 11 Padahal kalau diukur rentang waktu antara tahun 1789 ke 2012 (223 tahun) cukup lama.

## C. Konsep Syura dan Demokrasi dalam Islam

Istilah syura berasal dari kata kerja syawara - yusyawiru yang berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. 12 Ada bentuk-bentuk lain yang berasal dari kata kerja syawara adalah asyara (memberi isyarat), tasyawara (berunding, saling bertukar pendapat), syawir (meminta pendapat, musyawarah) dan mustasyir (meminta pendapat orang lain). Syura atau musyawarah adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara.13 Di dalam Alquran, mengenai pengertian ini terdapat pada tiga tempat, yaitu:

### 1. Surat al-Baqarah ayat 233:

ۖالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖلِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ ۚ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Baqarah: 233).

**2. Surat al-Syura ayat 38:**

وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka". (QS. al Syura: 38).

**3. Surat Ali-Imran ayat 159:**

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. 14 Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya". (QS. Ali Imran: 159).

Dari ketiga ayat yang telah disebutkan di atas, Allah Swt mengajarkan manusia untuk senantiasa mengedepankan musyawarah dalam segala urusan, dan bahkan Allah Swt memberi pujian kepada orang-orang yang menerima seruan Allah dan memberi nikmat bagi orang-orang yang melaksanakannya karena hal itu bernilai ibadah. Bermusyawarah merupakan sifat terpuji bagi orang yang melaksanakannya.

Menurut Abdul Qadir Audah yang disebutkan oleh A. Hasjmy bahwa kaidah yang menjadi asasnya syura ada lima, yang diringkas sebagai berikut:

1. Syura hak yang ditetapkan bagi pemerintah dan rakyat dalam hal ini kedua

pihak sama kedudukannya, tidak ada satu pihak yang berhak lebih dari yang lain. Sebagaimana halnya para pemimpin negara boleh kapan saja menyatakan pendapatnya dalam urusan-urusan pemerintahan, maka demikian pula rakyat atau wakil-wakil rakyat.

2. Kewajiban pemerintah bermusyawarah dengan rakyat dalam urusan-urusan negara, baik besar maupun kecil. Dan rakyat dapat menggunakan haknya kapan saja memberi nasihat kepada pemerintah atau mengajukan peraturanperaturan, dan dapat menuntut pemerintah untuk melaksanakan syari'at Islam.
3. Syura bersendikan ikhlas lillahi; cita syura haruslah dilaksanakan dengan ikhlas karena Allah untuk menegakkan kebenaran Islam, dengan tidak terpengaruh oleh warisan dan kepentingan pribadi, tidak pula oleh kepentingan golongan dan daerah.
4. Syura bukan kebulatan suara; tidak menjadi suatu kemestian, supaya semua orang (wakil wakil rakyat) bersepakat atas satu pendapat. Keputusan adalah pendapat terbanyak dari rakyat; setelah bertukar fikiran secara bebas, tanpa tekanan apapun.
5. Keharusan pelaksanakan keputusan oleh golongan sedikit; setelah bermusyawarah dengan bebas, maka semua golongan harus menjalankan keputusan itu, terutama oleh golongan kecil yang kalah suara. Mengenai hal ini, Rasulullah telah memberi contoh dalam perundingan perang Uhud, di mana Rasul tunduk kepada kehendak orang banyak yang ingin menyongsong musuh ke bukit Uhud, sedang nabi sendiri berpendapat lebih baik bertahan di Madinah. Setelah menjadi keputusan dengan suara terbanyak, maka Rasul segera memakai baju besinya dan keuar memimpin orang banyak menuju medan perang.

Menurut M. Quraish Shihab, secara subtansi antara demokrasi dan syura terdapat perbedaan. Tetapi ia juga menyebutkan adanya persamaan di antara keduanya. Persamaannya, persoalan persoalan masyarakat itu dikembalikan kepada kehendak masyarakat. Kehendak masyarakat itu dapat diketahui dengan bertanya kepada orang demi orang, bisa melalui perwakilan. Sedangkan perbedaanya, kalau demokrasi itu ada yang dikatakan kembali kepada rakyat, sementara dalam syura ada nilai-nilai yang tidak boleh dilanggar, nilai-nilai itu adalah nilai-nilai ditetapkan Allah Swt.

Dalam Islam, ada hal yang tidak boleh dimusyawarahkan. Misalnya, persoalan ibadah harus diterima sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam agama. Itu bukan wilayah musyawarah. Kita tidak bisa bermusawarah

berkaitan dengan jumlah rakaat shalat. Kita harus menerima ketentuan tersebut apa adanya.

Sementara itu, Ahmad Sudirman mengemukakan perbedaan yang paling mendasar antara konsep syura menurut Islam dan demokrasi menurut Barat, yaitu musyawarah menurut Islam merupakan sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan ulil amri dan segala urusan harus dikembalikan kepada dasar dan sumber hukum yang diturunkan Allah Swt dan dicontohkan Rasulullah saw. Adapun demokrasi adalah sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah baik melalui cara langsung seperti referendum maupun dengan cara tidak langsung melalui perantaraan wakilnya.

Jadi, konsep syura menurut Islam adalah sistem pemerintahan dimana Allah Swt yang berdaulat, sedangkan konsep demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana rakyat yang berdaulat. Karena itu konsep syura menurut Islam dan konsep demokrasi menurut Barat (Yunani) sangat jauh berbeda. Syura mendasarkan semua permasalahan harus dikembalikan kepada Alquran dan Sunnah, sedangkan demokrasi semua permasalahan dikembalikan kepada rakyat.

Dalam *syura*, aturan, hukum, undang-undang harus terlebih dahulu diacukan kepada dasar dan sumber hukum Allah Swt dan Sunnah Rasulullah Saw, sedangkan dalam demokrasi, itu aturan, hukum, undang-undang terus dibangun, dibentuk, ditetapkan berdasarkan apa yang dihasilkan oleh pemikiran rakyat baik secara langsung seperti referendum atau melalui wakil-wakilnya.

Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Swt di dalam surat An-Nisa ayat 59:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. al-Nisa: 59).

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah Swt memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kepada pemimpin yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Kemudian Allah Swt mengisyaratkan kepada orang-orang

beriman apabila terdapat perbedaan dalam suatu pekara, maka diprintahkan untuk mengembalikan kepada sumber dasarnya, yaitu Alquran dan Sunnah.

Jadi dalam konsep syura apapun masalah yang akan dibicarakan dalam majelis syura perlu terlebih dahulu diacukan kepada dasar dan sumber hukum Alquran dan Sunnah, dan apabila tidak ada nas-nya (dasar Alquran dan Sunnah) yang kuat, maka para anggota majelis syuro melakukan ijtihad untuk mencari hukum dengan membandingkan dan meneliti ayat-ayat dan hadishadis yang umum serta menyesuaikan dan mempertimbangkan dengan perkara yang sedang dibicarakan kemudian diqiyaskan dengan hukum yang sudah ada yang berdekatan dengan perkara yang sedang dibicarakan itu.

Dalam sistem syura, kebenaran tidak diketahui dengan mayoritas, tetapi dengan kesesuaian terhadap sumber hukum syariat. Sedangkan dalam sistem demokrasi, kebenaran adalah suara mayoritas walaupun menentang syariat Allah yang jelas. Selain itu juga ia mengatakan syura adalah salah satu wujud keimanan, karena dengan syura kita mengamalkan ajaran Islam. Sedangkan demokrasi adalah wujud kekufuran kepada Allah, karena jika mayoritas yang memutuskan perkara kekafiran maka itulah keputusan yang harus diikuti menurut mereka. Demikian juga kalau syura menghargai para ulama, sedangkan demokrasi menghargai orang orang kafir.

Menurut ketua dewan pakar ICMI, Ginandjar Kartasasmita, bagi negarawan Islam demokrasi yang cocok adalah demokrasi berlandaskan nilainilai keagamaan (religius). Sementara bila demokrasi diartikan sebagai kebebasan yang sebesar-besarnya sehingga melanggar ketenuan Allah Swt, maka yang demikian itu tidak dibenarkan dalam Islam.

Demokrasi yang sesuai dengan Islam mengandung ide dan lembaga demokratis yang dilandaskan pada prinsip atau nilai sebagai berikut: Pertama, kekuasaan tertinggi dan mutlak adalah milik Tuhan. Syura menjadi dasar prinsip kedaulatan Tuhan dan supremasi syari'ah. Kedua, kekuasaan tertinggi dan paling agung dalam negara Islam adalah kitab suci Alquran dan Sunnah, sedangkan kekuasaan mausia berada di bawah kekuasaan Tuhan. Ketiga, manusia di muka bumi mendapatkan kekuasaannya dari kekuasaan Tuhan menurut konsep kekhilafahan.

Menurut M. Quraish Shihab, Islam mengakui adanya demokrasi. Demokrasi yang diajarkan Islam lebih duluan lahir, dan lebih jelas dari pada demokrasi yang berasal dari Barat (Yunani Kuno). Islam bukan hanya mendukung, tapi bisa menjadikan prinsip ajaran dalam kehidupan bermasyarakat. Ini dapat dipahami bahwa yang dimaksudkan adalah demokrasi yang sesuai dengan Islam.

## D. Konsepsi Partai Politik

Keberadaan Partai Politik dalam kehidupan ketatanegaraan pertama kali dijumpai di Eropa Barat, yakni sejak adanya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang patut diperhitungkan serta diikut sertakan dalam proses politik, Dengan adanya gagasan untuk melibatkan rakyat dalam proses politik (kehidupan dan aktifitas ketatanegaraan), maka secara spontan Partai Politik berkembang menjadi penghubung antara rakyat disatu pihak dan pemerintah di pihak lain.

Dengan demikian dapat ditarik pengertian bahwa sebagai organisasi yang secara khusus dipakai sebagai penghubung antara rakyat dengan Pemerintah, keberadaan Partai Politik sejalan dengan munculnya pemikiran mengenai paham demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan.

Sudah banyak definisi yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai pengertian Partai Politik tersebut. Definisi-definisi tersebut antara lain :

1. **Carl J. Friedrich**: Sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin Partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota Partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materiil.
2. **R.H. Soltou**: Sekelompok warganegara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik, yang dengan memanfaatkan kekuasaan memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.
3. **Sigmund Neumann**: Organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan golongan atau golongan-golongan lain yang tidak sepaham.
4. **Miriam Budiardjo**: Suatu kelompok yang terorganisir yang anggotaanggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.
5. **Robert K. Carr**: Partai Politik adalah suatu organisasi yang berusaha untuk mencapai dan memelihara pengawasan terhadap pemerintah)
6. **Joseph Schumpeter** dalam bukunya Capitalism, Socialism, and Democracy berpendapat bahwa partai politik adalah kelompok yang anggotanya bertindak terutama dalam hal perjuangan mencapai kekuasaan. Partai dan para

politisinya merupakan contoh sederhana bagi tanggapan atas ketidakmampuan massa pemilih untuk bertindak selain dari ketidakrapian organisasinya, dan mereka secara nyata berusaha mengatur kompetisi politik layaknya praktik yang sama yang dilakukan oleh asosiasi perdagangan.

7. **La Palombara dan Anderson**: partai politik adalah setiap kelompok politik, yang memiliki label dan organisasi resmi yang menghubungkan antara pusat kekuasaan dengan lokalitas, yang hadir saat pemilihan umum, dan memiliki kemampuan untuk menempatkan kandidat pejabat publik melalui kegiatan pemilihan umum (baik bebas maupun tidak bebas).

Selain pendapat para ahli tersebut, Pengertian partai politik juga dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 2 Thhun 2011 Tentang Partai Politik, sebagai berikut: Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari sekian banyak konsep partai politik dari para ahli tersebut, kita bisa melihat bahwa setidak tidaknya pada partai politik terdapat unsur (i) Organisasi politik resmi, (2) Aktivis politik, (3) Aktivitas politik, (4) Tujuan politik.

Secara lebih lengkap dan jelas, Frank J. Sorou mengemukakan konsep partai politik yang terdiri dari unsur-unsur:

1. Mengembangkan organisasi dan mencapai tujuan melalui pemilihan umum
2. Organisasi bersifat inklusif dan mencakup berbagai kelompok masyarakat (ekstensif)
3. Perhatian utama pada panggung politik untuk mencapai tujuannya
4. Menunjukkan stabilitas dan berkelanjutan, serta bekerja sebagai suatu kesatuan dalam pembuatan keputusan dan loyalitas dari anggotaanggotanya.

Selain itu, berdasarkan pengertian partai politik dari para ahli tersebut Hafied Cangara juga menarik suatu pemahaman bahwa partai politik mempunyai tiga prinsip dasar, yaitu:

a. **Partai sebagai koalisi**, yakni membentuk koalisi dari berbagai kepentingan untuk membangun kekuatan mayoritas. partai yang dibentuk atas dasar koalisi di dalamnya terdapat faksi-faksi. Di dalam tubuh Partai Golkar misalnya ada faksi Kosgoro, MKGR, dan Korpri (sebelum tahun 1999), demikian pula dalam tubuh partai persaruan Pembangunan (PPP) terdapat faksi NU, Permusi, perti, dan pSII. Kehadiran faksi-faksi dalam partai besar sering

mengacaukan kesatuan partai karena satu sama lain berusaha untuk menjadi dominan dalam partai. Ketidakcocokan dalam partai terutama muncul dalam penetapan asas perjuangan, program, kepengurusan organisasi, dan pencalonan kandidat.

b. **Partai sebagai organisasi**, untuk menjadi sebuah institusi yang eksis, dinamis,dan berkelanjutan partai politik harus dikelola. partai harus dibina dan dibesarkan sehingga mampu menarik dan menjadi wadah perjuangan, sekaligus representasi dari sejumlah orang arau kelompok. Tirgasnya adalah mencalonkan anggota untuk pemilu dengan label partai, mengambil bagian dalam pemilu, mengajukan calon yang disepakati, mengumpulkan dana, dan membuat isu propaganda dalam kampanye. Untuk itu, partai politik melakukan mobilisasi kepada anggota-anggotanya untuk loyal kepada partai.

c. **Partai sebagai pembuat kebijakan (policy making).** Partai politik juga berbeda dengan kelompok sosial lainnya dalam hal pengambilan kebijakan. Partai politik mendukung secara konkret para calon yang mereka ajukan untuk menduduki jabatan-jabatan publik.

Dari posisi ini mereka memiliki kekuasaan untuk memengaruhi atau mengangkat petugas atau karyawan dalam lingkup kekuasaannya, bahkan turut memberi pengaruh dalam pengambilan kebijakan di kementerian di mana kader partai menduduki posisi yang sama melalui kolegitas partai.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas, kita dapat melihat adanya “benang merah” hubungan pengertian antara pendapat yang satu dengan yang lain, yaitu bahwa tujuan Partai Politik itu didirikan adalah untuk merebut ataupun mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan guna melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah digariskan oleh masing-masing Partai Politik. Untuk merebut dan mempertahankan penguasaannya di dalam Pemerintahan tentunya dilakukan secara konstitusional. Hal ini berarti keberadaan Partai Politik juga dimaksudkan sebagai sarana untuk meredam konflik kepentingan ataupun persaingan yang muncul di lingkungan masyarakat dalam mempengaruhi pemerintahan.

Oleh sebab itu, tidak ada salahnya jikalau Keberadaan partai Politik di negara modern dipergunakan untuk mewujudkan tatanan kehidupan kenegaraan yang lebih beradab. Hal ini mengingat sebelum dikenal adanya paham mengikut sertakan rakyat dalam sistem politik, perebutan kekuasaan selalu dilakukan dengan cara kekerasan. “Kasus Ken Arok” dalam sejarah Indonesia merupakan contoh yang dapat dipergunakan disini.

Menurut Miriam Budiardjo, partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan

cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Begitu juga menurut Carl J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan pengusaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan pada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat adil serta material. Sementara menurut Sigmund Neuman, partai politik adalah organisasi dan aktivisaktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Selanjutnya pakar ilmu politik lainnya, Giovani Sartori, berpendapat bahwa partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan caloncalonnya untuk menduduki jabatanjabatan politik.

Secara operasional lebih teknis, sebagaimana digambarkan oleh undang-undang (UU) Politik, yaitu UU No. 2/2008 tentang Partai Politik, menegaskan bahwa pengertian partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka pada hakikatnya Partai Politik adalah suatu kelompok manusia yang terorganisir secara teratur baik dalam hal pandangan, tujuan maupun tata cara rekruitmen keanggotaan, dengan tujuan pokok yakni menguasai, merebut ataupun mempertahankan kekuasaannya dalam pemerintahan secara konstitusional.

# BAB IV
# POLITIK DAN PARTAI POLITIK

## A. Sistem Politik dan Partai Politik

### 1. Pengerian Sistem Politik

Sistem politik adalah konsep yang berasal dari kata “sistem” dan “politik”. Sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa elemen atau komponen. Unsur atau bagian yang banyak ini saling berkaitan satu sama lain dengan kata lain bahwa disetiap unusur satu dengan lainnya ini ada hubungannya. Sedangkan pengertian politik adalah Fase di mana posisi dibangun atau didirikan untuk berperan sebagai pengambil keputusan mengenai situasi masyarakat. Politik merupakan pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang berwujud proses pembuatan keputusan, terkhusus pada negara. Pengertian Politik jika ditinjau dari kepentingan penggunanya dimana pengertian politik terbagi atas dua yaitu pengertian politik dalam arti kepentingan umum dan pengertian politik dalam arti kebijaksanaan..

Sistem politik merupakan salah satu sistem yang ada selain sistem-sistem lainnya di dalam lingkungan masyarakat. Ada salah satu tokoh politik yakni David Easton yang mana dia menganalisis kehidupan dan tingkahlaku politik dengan memakai pendekatan sistem.

Ada beberapa pengertian sistem politik yang dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya adalah:

a. Miriam Budiardjo

   Miriam mengungkapkan bahwa konsep “sistem” yang ia gunakan meminjam dari kata yang ada dalam ilmu biologi. Ia mengartikan bahwa sistem merupakan bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling bergantung dengan saling berinteraksi. Menurutnya konsep sistem politik pada dasrnya merupakan keperluan yang dipakai dalam analisis karena sistemnya yang bersifat abstrak dan terdiri dari beberapa variabel yang juga dapat diterapkan dalam situasi yang konkret, seperti negara, atau kesatuan yang lebih besar yang terdiri dari berbagai negara.

b. Gabriel Almond

   Gabriel mengemukakan bahwa sistem politik adalah sistem interaksi yang terdapat pada semua masyarakat merdeka yang menjalankan fungsi-fungsi integrasi dan adaptasi (baik di dalam masyarakatanya sendiri maupun menghadapi masyarakat lain) melalui penerapan atau ancaman penerapan daya paksa yang bersifat sah.

c. Rusadi Kantraprawira

   Menurut Rusadi yang dimaksud dengan sistem politik adalah

mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dengan berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langgeng.

Pada dasarnya sistem politik merupakan serangkaian struktur dan proses yang berkaitan satu sama lain yang menjalankan alokasi nilai-nilai kekuasaan secara sah (otoritatif).

Sistem politik sebagai satu kesatuan (kolektif) adalah seperangkat struktur politik dengan fungsi yang sesuai untuk mencapai tujuan negara. Pendekatan sistem politik bertujuan untuk memberikan penjelasan ilmiah terhadap fenomena politik. Pendekatan sistem politik juga dimaksudkan untuk menggantikan pendekatan klasik ilmu politik, yang pada tahun hanya didasarkan pada analisis negara dan kekuasaan. Pendekatan sistem politik terinspirasi oleh sistem yang bekerja pada makhluk hidup (dari bidang biologi).

Dalam pendekatan sistem politik, masyarakat merupakan konsep induk karena sistem politik hanyalah salah satu struktur sistem sosial, seperti sistem ekonomi, sistem sosial budaya, sistem kredit, dan sistem sosial, ambang batas, dan lain-lain. Sistem politik juga merupakan abstraksi (fakta yang diangkat ke hierarki konsep) dari distribusi nilai dalam masyarakat. Seperti yang telah kami jelaskan, masyarakat tidak hanya terdiri dari satu struktur (misalnya hanya sistem politik), tetapi dari beberapa struktur.

Sistem yang biasa dipelajari untuk kinerjanya adalah sistem politik, sistem ekonomi, sistem keagamaan, sistem sosial, atau sistem psiko-budaya. Berbagai jenis sistem memiliki persamaan dan perbedaan. Perbedaannya terletak pada dimensi ontologis, sedangkan persamaannya terletak pada konsep yang diukur dari sistem ke sistem.

**2. Ciri-ciri Sistem Politik**

Menurut Awad (1979; 5-8), menyebutkan bahwa ciri-ciri sistem meliputi :

**a.** Terbuka
**b.** Terdiri dari dua atau lebih subsistem
**c.** Saling ketergantungan
**d.** Kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya
**e.** Kemampuan untuk mengatur diri sendiri
**f.** Tujuan dan sasaran

Easton mengidentifikasi beberapa ciri sistem politik. Ciri-ciri tersebut adalah (1) unit-unit yang membentuk sistem dan sejauh mana sistem terpengaruh, (2) "input" dan "output" sistem tercermin dalam keputusan yang dibuat (output) dan proses keputusan. Pengambilan keputusan (input) dalam proses

pengambilan keputusan sistem, (3) jenis dan tingkat variasi dalam sistem, dan (4) tingkat integrasi sistem politik yang mencerminkan tingkat efektivitas atau efesiensi nya.

a. Unit-unit dalam sistem politik

Merupakan unsur yang membentuk sistem politik, yaitu tindakan politik yang membentuk peran politik dan kelompok politik. Sistem politik juga berbeda dengan lainnya karena memiliki batas-batas yang berbeda pula. Batas itu adalah setiap tindakan yang berhubungan langsung dengan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan masyarakat.

b. Adanya *Input* dan *Output*

Setiap sistem politik tentunya pasti mengeluarkan keputusan-keputusan yang penting bagi masyarakatnya. Untuk menghasilkan *output* tersebut sistem politik membutuhkan *input* secara *continue* atau berlanjut. Karena bila *input* itu tidak ada maka sebuah sistem politik tidak akan berjalan atau tidak berfungsi.

c. Deferensiasi dalam sistem

Jenis input dari lingkungan yang masuk ke dalam sistem politik tentunya bermacam-macam tidak hanya satu saja. *Input* yang masuk itu tidak mungkin juga hanya di *handle* atau di tangani oleh satu orang atau satu *group* saja yang ada di dalam sistem tersebut. Maka dari itu di dalam sistem politik itu ada deferensasinya agar sistem tersebut dapat bekerja dengan baik. Nantinya setiap orang atau kelompok yang ada di dalam sistem itu akan bekerja sesuai dengan keahliannya masing-masing.

d. Integrasi dalam sistem

Sudah dijelaskan bahwa sebuah sistem itu berfungsi sebagai pengolah *input* agar menghasilkan *output.* Walaupun sacara nyata ada deferensiasi dalam sistem, namun untuk keberlangsungan jalannya sebuah sistem maka diperlukan adanya integrasi atau keterpaduan antar berbagai orang maupun kelompok yang ada di dalam sistem tersebut. Jika tidak adanya kesatuan atau keterpaduan satu sama lain maka akan terjadi malfungsi atau disfungsi sistem, bahkan sistem tersebut dapat hancur nantinya.

**3. Sejarah Sistem Politik Indonesia Berkaitan dengan Partai Politik**

Seperti yang kita ketahui Indonesia sendiri memiliki sejarah dalam sistem politiknya, yaitu adalah :

a. Masa *Orla* (Orde Lama) atau Parlementer

Masa ini dimulai ketika tahun 1950-1959 disaat era kepemimpinan Presiden Soekarno yang menggunakan konstitusi UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara RI tahun 1950. Periode ini berlangsung mulai 17

Agustus 1950 hingga 6 Juli 1959.

Dasarnya adalah UUDS 50 bukan konstitusi RIS 49. Sistem pemerintahan yang dianut atau digunakan adalah parlementel kabinet dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu yang memiliki ciri-ciri :

1) Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat digugat
2) Menteri bertanggung jawab atas pemerintahan
3) Presiden memiliki hak membubarkan DPR
4) Perdana Menteri diangkat oleh Presiden

Presiden memiliki kekuasaan mutlak sehingga ia dapat menghapus kekuasaan yang menghalangi jalannya, sehingga nasib partai politik akan ditentukan oleh Presiden (10 partai politik diakui). Pada waktu itu tidak ada kebebasan berpendapat, semua lembaga yang ada dibubarkan oleh Presiden dan digantikan oleh orang yang dipilih oleh Presiden sendiri. Presiden Soekarno mendeklarasikan dirinya sebagai presiden seumur hidup. Akibatnya, ideologi Nasakom berkembang dan Indonesia keluar dari organisasi dunia, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berakhirnya pemerintahan demokratis pada tahun adalah pemberontakan PKI pada tahun 1965.

*b.* Masa Orde Baru (*Orba)*

Periode ini dimulai dengan kepemimpinan Presiden Soeharto sebagai presiden melalui *supersemar.* Saat orde baru ini pemerintah memiliki tekad untuk mengembalikan konstitusi UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Sistem yang diterapkan pada era ini adalah Demoktrasi Pancasila dengan sistem Presidensial. Presiden pada masa ini kekuasaan dan kepemimpinan nya sangat besar dalam mengatur segala urusan publik apalagi urusan politik.

Demokrasi tidak terlaksana, tidak ada rotasi kekuasaan eksekutif, pembatasan rekrutmen politik, dan KKN merajalela. Kepemimpinan Soeharto banyak sekali diwarnai dengan adanya lobi politik yang tidak sehat. Pada masa Soeharto, komunikasi antarpartai politik yang mendudukkan wakilnya di DPR/MPR tidak lagi bisa menampung aspirasi rakyat, kekuasaan politik Indonesia berpusat pada presiden.

Selain itu, badan legislatif tidak lagi berfungsi sebagai suara rakyat, tetapi hanya mendukung presiden. Kritik yang terlalu keras dilontarkan oleh anggota DPR/MPR berakhir dengan tuntutan seluruh massa (dimotori oleh mahasiswa) maka pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dan diganti oleh Wapres Prof. B.J. Habibie.

c. Hubungan Lembaga-lembaga Politik Orde Baru

Rezim orde baru memiliki ribuan cara untuk tetap mempertahankan kekuasaannya. Hampir tidak ada institusi politik yang tidak berada dibawah kekuasaan dan kontrol presiden. Pengendalian kelembagaan itu dapat digambarkan oleh presiden sebagai berikut.

1) Lembaga Kepresidenan yang Dominan

Ramlan Subarki menyebutkan ada 5 faktor yang mempengaruhi kenapa era kepemimpinan Presiden Soeharto menjadi kuat yakni, (1) Konstitusi, disini adalah UUD 1945 yang menempatkan eksekutif sangat kuat. (2) Budaya, dalam budaya suku jawa presiden dipandang sebagai raja. (3) Otoritas pribadi, karena pada zaman ini Presiden Soeharto memiliki kekuatan yang penuh atau *powerfull* dan memiliki otoritas lebih banyak di dalam ABRI karena ia adalah seorang Jenderal yang pernah memimpin banyak pasukan. (4) Sistem politik yang bercorak Birokratik Otoritarian, yang mana menjadikan presiden dapat dengan leluasa menguasai politik dan ekonomi. (5) Ekonomi, kinerja pemerintahan pada masa orba ini dalam pembangunan ekonomi memberikan kesempatan bagi masyarakat meningkatkan kesejahteraan.

2) Lembaga Peradilan yang Tidak Independen

Semua hakim agung, termasuk para deputi diangkat oleh presiden dari daftar calon yang diusulkan oleh DPR. Namun, Mahkamah Agung tidak memiliki otoritas yang cukup untuk menentukan apakah kebijakan pemerintah dan tindakannya sesuai dengan konstitusi atau tidak. Sementara itu, semua hakim di daerah ataupun di pengadilan tinggi adalah pegawai negeri, yang diangkat, dipromosikan, digaji, dan diawasi oleh Departemen Kehakiman. Anggaran mereka ditentukan oleh Sekretariat Negara. Dengan demikian, peradilan di Indonesia, termasuk Mahkamah Agung disusun sebagai bagian dari pemerintah daripada sebagai lembaga peradilan. Di kalangan pemerintah berkembang pemahaman bahwa "hukum harus dipakai dalam rangka pembangunan" sehingga tidak lagi memikirkan pentingnya sistem peradilan yang independen yang sebenarnya dibutuhkan untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

d. Hubungan Negara dengan Masyarakat

Selama masa Orde Baru negara sangat kuat. Tidak ada perubahan yang tidak dimulai dari negara. Masyarakat tidak memiliki ruang partisipasi politik. Masyarakat dimobilisasi oleh negara. Partisipasi bukan bermakna turut serta merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan pembangunan. Partisipasi berubah makna menjadi turut serta memberikan sumbangan dari proyek pemerintah yang dibiayanya kurang.

e. Praktik Negara Hegemonik

Dalam kerangka hegemony, pemerintah Orde Baru menggunakan ideologi Pancasila sebagai instrumen dalam berkuasa. Pada tahun 1978, pemerintah menyusun penafsiran Pancasila menjadi Eka Prastya Pancakarsa dan untuk kepentingan sosialisasi penafsiran itu, diselenggarakan penataran P4 untuk seluruh lapisan rakyat Indonesia, baik pegawai negeri maupun masyarakat biasa. Tahun 1983, pemerintah juga melakukan penunggulan azaz bagi organisasi sosial kemasyarakatan, keagaman ataupun politik.

f. Peran Militer, Partai Politik, dan Dampaknya terhadap HAM

Pada masa ini ABRI memiliki kekuasaan untuk mengatur atau mengintervensi politik sipil melalui doktrin dwifungsi. Bahkan tenaga militer atau yang sudah pensiun ditempatkan di bangku bangku "spesial" seperti di DPR, MPR, DPRD, Staff pemerintahan pusat maupun daerah. Disini ABRI juga mengontrol partai Golkar, mengawasi penduduk dengan komando territorial.

Sumbangsih nyata struktur birokrasi terhadap Golkar dapat dilihat dengan dikeluarkannya Peraturan Manteri Nomor 12 Tahun 1969 tentang larangan semua pegawai negeri sipil dan ABRI terlibat dalam kegiatan partai politik. Kebijakan ini memotong jaringan masuknya partai-partai membentuk basis di tingkat militer dan birokrasi sipil. Mengingat keberadaan Golkar tidak menyebut dirinya sebagai partai politik sehingga secara akontrario peraturan di atas memungkinkan militer dan birokrasi berafiliasi politik dengan Golkar

Dominasi Golkar yang sangat absolut yang berangkulan kuat dengan ABRI dan birokrasi mengakar kuat tanpa ada satupun kekuatan yang dapat menandinginya sehingga mampu memenangkan pemilu sejak 1971 hingga 1997, mengakibatkan kecenderungan para ahli dalam mengkategorikan sistem kepartaian. Ada yang menyebutnya sistem satu partai, adapula yang menyebutnya sistem satu partai otoritarian, kedua pandangan ini seakan menutup mata akan adanya eksistensi partai yang lain.

## B. Kaitan Pemilu dan Partai Politik

Pemilu dan partai politik merupakan satu kesatuan dalam sistem politik demokratis. Syamsuddin Haris menyebutkan pemilu dan parpol merupakan elemen terpenting bekerjanya sebuah sistem pemerintahan demokrasi. Parpol mewadahi pluralitas aaspirasi dan kepentingan masyarakat;pemilu menjadi areba kontestasi demokrasi bagi parpol dan kandidat dalam usaha memperoleh kepercayaan dan mandat politik publik. (Haris, 2014).

Pemilu adalah proses pengisian jabatan yang kosong di pemerintahan

dengan melakukan pemilihan dan pengangkatan seseorang yang akan mengisi jabatan tersebut, sehingga pemilu merupakan salah satu instrumen penting yang wajib ada di dalam sistem politik suatu negara. Oleh karena itu, jabatan tersebut harus dilakukan dengan melalui pemilu. Sedangkan dalam KBBI, kata pemilu atau pemilihan umum diartikan sebagai pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara (untuk memilih wakil rakyat dan sebagainya).

Menurut Indria Samego pemeilihan umum adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial antara peserta pemilihan umum (partai poltik), dan calon kepala daerah dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media massa cetak,audio (radio) maupun audio visual (televisi) serta media lainnya seperti, spanduk, selebaran, bahkan komunikasi antar pribadi yang berbetuk face to face (tatap muka) atau loby yang berisi penyampaian pesan menegnai program, platfrorm, asas, idiologi, serta janji–janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap saah satu partai poltik yang menjadi pserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legeslatif maupun eksekutif.

Sebagai tulang punggung demokrasi, peran partai politik dalam sistem politik nasional adalah **s**ebagai wadah pemilu. Pengalaman pemilihan massal pemimpin nasional dan daerah melalui pemilu menunjukkan keberhasilan partai politik sebagai pilar demokrasi. Pemilu 2004 dinilai sukses oleh banyak pihak, termasuk dunia internasional. Dengan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa sistem politik nasional mulai dikaitkan dengan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk organisasi partai politik.

Peran partai politik telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap sistem politik nasional, terutama dalam dinamika dan perubahan laju masyarakat Indonesia. Jika kapasitas dan kinerja partai politik dapat ditingkatkan, maka akan berdampak besar pada peningkatan kualitas demokrasi dan efisiensi operasional sistem politik. Oleh karena itu, peran partai politik perlu ditingkatkan kapasitas, kualitas dan efisiensi operasionalnya untuk mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat, serta meningkatkan kualitas demokrasi.

Partai politik diakui dan diterima sebagai salah satu wadah rakyat berpartisipasi dalam pemerintahan.Keberadaannya menjadi sarana penghubung untuk mengelola berbagai nilai dan kepentingan serta

memperjuangkannya masuk dalam sistem politik melalui wakil-wakilnya di pemerintahan. Posisi yang demikian strategis menempatkan partai politik sebagai kunci institusi demokrasi perwakilan (representative democracy)baik dalam proses pembentukan maupun penyelenggara pemerintahan negara.

1. **Pemilu arena kompetisi**

Pemilu sudah dipastikan sebagai arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian pemerintahan secara berkala dan damai. Bisa dikatakan juga bahwa pemilu adalah sarana pertarungan atau kompetisi aktor politik untuk meraih kekuasaan. Disini kata aktor berarti partai politik, karena partai politik merupakan "aktor yang sah" dan mempunyai keistimewaan dalam pertarungan memperebutkan kekuasaan dalam lembaga politik formal.

Partai politik dalam pemilu sangat dianjurkan dalam ranah demokrasi. Oleh karena itu dalam sistem politik demokrasi pemilu benar-benar menjadi wadah bagi terlaksananya kompetisi antar partai politik secara bebas dan adil. Partai politik akan saling bersaing dalam rangka memperoleh *suara* dari masyarakat agar mereka mampu menang dan mendapatkan kekuasaan dalam lembaga politik formal. Karena nya setiap parpol akan berjuang *mati-matian* dalam kompetisi yang dikemas dalam acara "pemilu". Mereka akan mengerahkan segala kekuatan, strategi yang mereka miliki dalam meyakinkan masyarakat.

Pemilu juga menjadi arena pergantian atau rotasi kekuasaan secara berkala dan damai. Nantinya pejabat yang terpilih dalam pemilu ini harus pro terhadap masyarakat pemilih. Masuk akalnya seorang politisi harus bisa menjadi politisi yang baik dimanapun mereka nantinya di tempatkan baik itu di parlemen atau di lembaga eksekutif.

**2. Partai politik dan Parlemen**

Partai politik memiliki peran dalam mengusulkan sejumlah kandidat (kader) yang akan diikutsertakan dalam pertarungan merebutkan jabatan di parlemen. Ini sesuai dengan fungsi partai politik yakni melakukan rekrutmen politik dalam proses pengisisan jabatan politik. Namun dalam pelaksanaannya terpilihnya seorang kandidat ataupun tidak terpilihnya yang di usung oleh partai politik ini ditentukan oleh konstituen.

Partai politik menempatkan kadernya dalam lembaga parlemen. Kadernya duduk di parlemen tentunya menjadi wakil partai politik yang mengusungnya. Karenanya di dalam parlemen ada yang dinamakan fraksi. Fraksi merupakan representasi dari parpol itu sendiri. Seharusnya seorang

kader yang berada di parlemen yang berkuasa harus bnar-benar mewakili masyarakat. Seorang pejabat atau kader yang terpilih di parlemen sudah semestinya memiliki kedekatan dengan masyarakat pemilih.

Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Dengan kata lain partai politik adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik - (biasanya) dengan cara konstitusionil untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Partai politik adalah sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingankepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang political development sebagai suprastruktur politik. Friedrich menjelaskan bahwa partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisasikan secara stabil dengan tujuan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan kekuasaan tersebut akan memberikan kegunaan materil dan idil kepada para anggotanya.

Selanjutnya, Soltau juga menjelaskan bahwa partai politik sebagai kelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasikan, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat. Persoalan yang dihadapi dalam sistem kepartaian di Indonesia adalah belum berjalannya secara maksimal fungsi yang dimiliki oleh partai politik, baik fungsi partai politik terhadap negara maupun fungsi partai politik untuk rakyat.

Dalam hal ini fungsi partai politik bagi negara adalah menciptakan pemerintahan yang efektif dan adanya partisipasi politik terhadap pemerintahan yang berkuasa dan fungsi partai politik terhadap rakyat.

### 3. Sistem kepartaian multipartai

Partai politik berperan penting dalam kelancaran proses demokratisasi. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik berperan penting dalam penyaluran kepentingan mayarakat terhadap pemerintah (intermediate actor). Selain itu, partai politik juga memiliki peran penting untuk mengaitkan antara Rakyat dan Pemerintah.

Sistem multi partai memang menjadi ciri khas dari sistem

pemerintahan saat ini yaitu Presidensial. Saat ini, peran partai politik dalam mempengaruhi situasi politik nasional sangat menonjol. Baik tidaknya pengaruh yang diberikan oleh partai politik terhadap situasi nasional tergantung bagaimana partai politik tersebut menjalankan fungsinya sebagai sebuah partai politik. Pengaruhnya jika suatu negara menganut sistem multi partai, maka potensi terjadinya konflik akan lebih besar. Apalagi dengan jumlah partai yang cukup banyak, maka konflik konflik kepentingan akan terjadi dan menimbulkan tidak stabilitasnya keadaan nasional, yang juga dapat menghambat efektivitas kineja pada pemerintah.

Ada 3 (tiga) hal yang menjadi aspek dalam stabilitas pada suatu negara, yaitu stabilitas hukum, stabilitas ekonomi, dan stabilitas politik. Tetapi, sentralnya adalah stabilitas politik. Stabilitas politik yang diwakilkan melalui partai politik dan berada dalam sistem multi partai ini menjadi urgensi dikarenakan apabila stabilitas politik dapat terjadi, maka stabilitas hukum dan juga stabilitas ekonomi pun akan mengikuti. Hal ini disebabkan, apabila suatu konsensus dalam pemerintahan yang di dalamnya terdapat beberapa politic actor yang berasal dari konteks atau latar belakang berbeda dapat secara tidak banyak konflik, maka suatu kebijakan baik baik berupa produk hukum maupun yang lainnya akan menciptakan stabilitas nasional.

Namun dilain sisi jika terdapat banyak konflik yang disebabkan karena sistem multi partai, yang di dalamnya terdapat banyak partai dan politic actors, maka yang akan terjadi ialah stabilitas nasional sulit untuk terjadi bahkan akan mengganggu efektivitas dalam pemerintahan. Stabilitas nasional berkaitan dengan menciptakan kondisi dalam negeri yang stabil secara politik, ekonomi, dan sosial dengan peran aktif pemerintah dalam melakukan mobilisasi atas sumber daya manusia dan alamnya yang dapat mendukung modernisasi dan perkembangan politik dan ekonomi serta kontrol pemerintah atas setiap individu untuk menciptakan keamanan dan ketertiban bersama. Selain itu, stabilitas nasional mengharuskan elit atau rezim yang berkuasa untuk memberikan pengaruh kepada massa baik melalui cara koersif, maupun simbolis untuk menciptakan suatu tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman tanpa konflik dan seimbang sama rata, Hal ini menjadikan stabilitas nasional memegang peranan penting bagi negara karena merupakan salah satu faktor bagi pembentukan integrasi bangsa.

Sistem multipartai dengan sistem presidensiil dianggap kombinasi yang tidak sesuai. Sistem multi partai dalam pemerintahan presidensiil berakibat pada rendahnya keberlanjutan stabilitas demokrasi.

Indonesia mempunyai sejarah panjang dengan berbagai jenis sistem

multipartai, sistem ini telah melalui beberapa tahap dengan bobot kompetitif yang berbeda-beda. Mulai 1989 indonesia berupaya untuk mendirikan suatu sistem multipartai yang mengambil unsur-unsur positif dari pengalaman masa lalu, sambil menghindari unsur negatifnya.

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa sistem kepartaian berpengaruh terhadap efektifitas penyelenggaraan sistem pamerintahan. Untuk menganalisis pamerintahan presidensial yang ideal di Indonesia perlu kiranya kita melihat kembali pengalaman sejarah berlakunya sistem pamerintahan dan kepartaian masa lalu. Dengan mengetahui pengalaman kepartaian dan sistem dan sistem pamerintahan yang pernah berlaku di Indonesia diharapkan mampu menemukan sistem pamerintahan sistem apa yang cocok di terapkan di Indonesia.

Dalam melaksanakan pemilu di Indonesia terdapat beberapa aturan yaitu pemilihan umum harus bersifat langsung, umum, bebas, jujur dana adil. Sedangkan dalam pelaksanaannya, pemilu sendiri diselenggarakan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang bekerja sama dengan pihak Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) serta pihak DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Masing-masing dari ketiga pihak di atas memiliki tugas yang sama yaitu berperan dalam penuntasan pelanggaran yang terjadi saat pemilu. Jika dirincikan, ketiga pihak diatas memiliki perannya masing-masing dalam menjalankan pemilu. KPU adalah pihak yang menyelenggarakan pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, lalu Bawaslu bertugas sebagai pengawas dalam pelaksanaan pemilu diseluruh wilayah Indonesia. Sedangkan DKPP memiliki tugas sebagai pihak yang menangani pelanggaran kode etik di pelaksanaan pemilu.

Peranan partai politik sendiri di dalam pelaksanaan pemilu yaitu diantaranya adalah sebagai wadah bagi para calon-calon yang nantinya akan menduduki kursi jabatan, menyiapkan calon calon tersebut. Dalam masyarakat, partai politik juga harus bisa menciptakan suasana pemilu yang kondusif agar tidak terjadi perpecahan dalam kesatuan bangsa. Hal itu dapat dilakukan dengan mengadakan sosialisasi terlebih dahulu kepada anggota partai maupun masyarakat. Selain itu, partai politik juga harus bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dan menumbuhkan kesadaran mereka akan pentingnya mengikuti pemilihan umum serta diharapkan dapat mengurangi jumlah masyarakat yang memilih golput atau tidak melakukan pemilihan.

# BAB V
# PARTAI POLITIK DALAM KONTRIBUSI DI MASYARAKAT

## A. Peranan Partai Politik dalam penyerapan aspirasi masyarakat

Dalam negara demokrasi di Indonesia, keberadaan suatu partai politik adalah suatu hal yang semsetinya ada. Kehidupan suatu partai politik dapat terpelihara dengan iklim yang kondusif. Perwujudan negara demokrasi yakni dilakukan melalui ajang pemilu atau Pemilihan umum. Dalam konteks Pemilu inilah partai politik memiliki peran menjadi kontestan pemilu bagi masyrakat. Pembatasan yang sangat ketat terhadap keikutsertaan pemilu hanya disebabkan karena, Pertama,pemerintah yang memiliki siafat otoriter. Kedua, jumlah parlai politik yang terlalu banyak sehingga tidak bisa dihindarkan adanya pengetatan terhadap jumlah partai politik yang ideal. Terlepas dari jumlah partai politik yang ideal secara substansial demokrasi adalah kebebasan. Tanpa kebebasan tidak ada ruang untuk mendirikan partai politik. Kebebasan itulah hanya mungkin terdapat di negara dcmokrasi bukan di negara yang otoriter.

Tak ada satupun partai politik pun yang tidak tergantung kepada masyarakat. Tanpa masyarakat, partai politik tidak memiliki arti apa apa. Dukungan yang kuat dari masyarakat terhadap partai politik menjadikan partai politik memiliki kekuatan. Sangat terasa sekali manakala dalam pemilu paltai politik tidak mendapat dukungan dari masyarakat, mengakibatkan perolehan suara menjadi terlihat kecil. Perolehan suara yang kecil dalam pemilu memiliki pengaruh terhadap suatu perolehan jumlah kursi di lembaga legislative.

Maka itulah sebabnya masyarakat menjadi faktor penentu kuat tidak adanya atau kemajuan maju mundllrtlya partai politik. Rendahnya perolehan suara dalam pemilihan umum mempengaruhi jumlah kursi di DPR. Inilah sebabnya mengapa orang merupakan penentu kuat apakah partai politik akan bertarung atau tidak. Oleh karena itu, di situlah parpol menyerap kehendak rakyat, untuk kepentingan masyarakat dan parpol itu sendiri. Dalam kerangka pembangunan bangsa, aspirasi pembangunan di masyarakat harus menjadi inspirasi bagi partai politik yang dirasakan oleh masyarakat.

Akses partai politik kepada masyarakat terbuka lebar ketika demokrasi terbuka dan bebas. Penyerapan keinginan rakyat jika adanya keterbukaan dan kebebasan dikembangkan dengan baik. Partai-partai politik tidak mungkin menerima kehendak rakyat jika iklim terbuka dan kebebasan tertutup. Karena keterbukaan dan kebebasan harus dihidupkan agar partai politik tetap eksis. begitu penyerapan aspirasi sosial lakukan. Masyarakat sebagai basis partai

politik membutuhkan komunikasi timbal balik yang dibutuhkan setiap orang. Partai politik didirikan oleh rakyat dan sebaliknya partai politik pun harus menyerap aspirasi rakyat untuk kepentingan seluruh aspek pembangunan bangsa dan negara.

Kemampuan menyerap aspirasi memiliki arti dapat mengeksplorasi dan menerjamahkan informasi mengenai apa yang dirasakan oleh masyarakat tentang konflik problematika yang dihadapi masyarakat. Hak untuk menyerap inforamsai telah diatur dalam konstitusi di pasal 28 f UUD 1945 yang menyebutkan “Setiap orang berhak untuk berkamunikasi dan memperoleh inJormasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sasialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan inJormasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Hak menyerap dan menghimpun informasi sebagai aspirasi masyrakat dapat digunakan untuk merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan negara. Partai politik memiliki fungsi untuk menentukan perannya melaksanakan fungsi yang ditentukan dalam pasal 7 bucir c tersebut.

Makna mengenai fungsi dari partai politik merupakan salah satu dimensi pemahaman saja karena dalam kalangan akademis masih memiliki spektrum makna yang lebih meluas dan beragam. Biasanya deskripsi mengenai fungsi dari partai politik itu sendiri lebih terlihat jika dikaitkan dengan suatu keberadaan partai politik. Hal itu penting dikarenakan dalam pemerintahan otoriter partai politik tidak terlalu berfungsi. Fungsi partai politik hanya bisa tumbuh dan berperan sesuai dengan fungsinya di bawah pemerintahan yang demokratis. Kebebasan berpolitik merllpakan kllnci utama bagaimana partai politik bisa memainkan perannya. Di era reformasi sekarang kecendrungan demokrasi politik yang relatif baik dan be bas telah membllka peillang bagi partai politik llntllk meningkatkan peran tnenyerap. menghitnplln dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Jika tidak. maka partai politik hanya sekedar tempat singgah bagi mereka yang ingin sekedar bertllalang tanpa idealisme kejllangan yang berpihak kepada rakyat. bangsa dan negara. Pettualangan tersebt mungkin hanya untuk kepentingan mobilitas vertikal seseorang saja. Padahal partai politik haruslah meenjadi wadah bagi perjuangan mencapai cita-cita membangun masyarakat lebih baik**.**

**B. Peranan Partai Politik Menyerap Aspirasi Rakyat**

Suatu peranan harus dikaitkan dengan fungsi. Berdasarkan fungsi itu partai politik menentukan apa yang harus dilakukan dan tidak. Kontribusi apa yang hendak diberikan, itulah peranan. Peranan itu akan terhenti jika iklim demokrasi tidak ada. Fungsi adalah Konsepsi. Peranan adalah aksi. Konsepsi

itu tidak menjadi fungsional jika aksi mengalami keterkungkungan. Oleh karena itu aksi Illemerlukan ruang dan kesempatan. Ruang dan kesempatan itu harus pula didukung program, pelaksana dan dana. Namun faktor semangat dan idealismepun tak kalah pentingnya dalam memainkan peranan partai politik menyerap aspirasi masyarakat. Menyerap aspirasi masyarakat dapat diartikan dalam dua gagasan. Pertama : Aspirasi masyarakat dalam konteks perumusan kebijakan Kedua : Aspirasi masyarakat dalam konteks pemenuhan kaebutuhan masyarakat.

Disinilah terdapat kolerasi antara keinginan dan kenyataan. Jika hanya memperbanyak rumusan keinginan maka akan menjadi NATO *(No Action Talk Only)*. Keinginan haruslah dapat diilllplementasikan melalui kebijakan pembangunan. Disini, partai politik dapat berperan sebagai penghubung aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, peranan partai politik menyerap dan merullluskan keinginan masyarakat mestilah dapat mengimplikasikan fungsi partai politik. Secara akademis fungsi partai politik yang menenentukan peranan partai politik itu akan lebih terlihat di negara demokratis karena faktor ruang kebebasan dan penghargaan terhadap hak-hak politik. Prof. Miriam Budiardjo mengemukakan, bahwa dalam negara demokratis partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi:

1. Partai sebagai sarana komunikasi partai politik

   Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dari masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga dalap terjaado kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang.

2. Partai sebagai sarana sosialisai politik

   Partai politik juga berperan sebagai sarana sosialisasi politik *(Instrument of Political Socialization)*. Dalam konteks ini, partai politik harus mampu mensosialisasikan visi dan misinya terhadap masyarakat dan berusaha membangun *"image"* bahwa partai politik memperjuangkan kepentingan umum.

3. Partai politik sebagai sarana *recruitment* politik

   Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiet

4. Partai politik sebagai saran pengatur konflik

   Apabila terdapat konflik, partai politik berusaha untuk dapat mengatasinhya. Tak jauh berbeda dengan Prof. Miriam Budiardjo, Sigmund Neumann mengemukakan pula empat fungsi partai politik, yaitu:

   1. Mengatur kehendak umum yang kacau.
   2. Mendidik warga negara untuk bertanggungjawab secara politik.

3. Penghubung antara pemerintah dan pendapat umum.
4. Menyeleksi para pemimpin.

Partai politik mel1liliki hak untuk melakukan aktifitas meningkatkan peran yang konstruktif baik dalam menyerap aspirasi masyarakat maupun melakukan kontrol atau kritik terhadap penyelenggaraan kekuasaan. Hal itu merupakan konsekuensi logis dari negara hukum yang menjamin dan melindungi roda demokrasi berjalan secara wajar. Demokrasi yang diidealkan haruslah diletakkan dalam koridor hukum. Tanpa hukum demokrasi justru akan berkembang kea rah yang keliru karena hukum dapat ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa atas nama demokrasi. Dengan kata lain, hukum harus menjadi dasar bagi peningkatan peran partai politik. Demokrasi akan bukan saja disalah tafsirkan tetapi juga disalahgunakan. Dalam rangka meningkatkan peranan parti politik menyerap, menghimpun dan merumuskan aspirasi masyarakat dalam proses pembangunan tak dapat dinafikan sejauh mana tingkat partisipasi politik dari partai politik dalam proses pembangunan itu.

## C. Partai Politik Dalam Proses Pembangunan

Peranan dari partai politik menyerap aspirasi masyarakat dengan tujuan apapun Namanya, tidak mungkin maksimal hasil jika tingkat partisipasi l partai politik rendah dan pasif. Partisipasi politik dalam negara yang memiliki iklim demokrasi lebih membuka peluang bagi partai untuk dapat melakukan pendekatan pendekatan terhadap masyarakat. Dengan pendekatan yang humanistik, rasional dan elegan. partai politik akan mendapat simpati ditengah-tengah masyarakat. Paradigma partisipasi partai politik dalam negara nasional *(national state)* adalah wawasan nasionalisme. Partai politik yang berdasarkan suku dan kedaerahan teramat sempit dan dapat menimbulkan konflik sosial. Perbenturan suku-suku di Papua karena semangat nasionalismenya masih rendah. Jikalau semangat kebangsaan dan nasionalismenya kental dan solid tentu rumus perang suku tidak akan terjadi lagi.

Partisipasi politik partai politik bermakna keterlibatan intensif partai politik dalam berbagai kegiatan politik mulai dari rekruitmen anggota, rapat rap at politik, kampanye, pemilihan pengurus, pemberian suara dalam pcmilihan umum dan kontrol terhadap kekuasaan. Partisipasi masyarakat berarti keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan politik. Keterlibatan masyrakat dalam politik merupakan konsekuensi logis dari demokrasi politik.

Keterlibatan masyarakat dalam politik merupakan konsekuensi dari adanya demokrasi politik. Partisipasi politik masyarakat merupakan suatu implementasi dari hak politik yang dilindungi oleh konstitusi. Prof. Miriam

Budiardjo menyebut bahwa : "Partisipasi politik merupakan suatu pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat". Kekuasaan formal dipilih oleh rakyat. Tanpa partisipasi partai politik dan rakyat tidak mungkin kekuasaan formal terbentuk.

Dalam proses pemilihan umum misalnya, partisipasi partai politik dan setiap individu "Involved" dalam menentllkan siapa yang akan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-lIndang Nomor 12 tahun 2003 Tentang Pemilihan Umllm menyebutkan : "Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR. DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota adalah partai politik". Pada ayat (2) nya menyebutkan : "Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan". Dengan demikian, partisipasi politik partai politik dan perseorangan sangat menentukan komposisi politik. Hal ini menllntut partisipasi partai politik bukan saja menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga mensosialisasikan gagasan-gagasan dan program-program partai politik terhadap masyarakat.

Dalam konteks peranan partai politik pad a tingkat kecamatan misalnya mestilah memahami anatomi masyarakat baik struktural mulai dari tingkat RT, RW dan Kelurahan/Desa sampai Kecamatan maupun substansial. Artinya, memahami apa yang diinginkan dan dirasakan masyarakat. Hal itulah yang perlu diserap. Dengan demikian partai politik merupak mediator gagasan dan dengan demikian jelas apa yang harus diperjuangkan partai politik untuk masyarakat.

## A. Implementasi politik dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Hukum politik merupakan himpunan kaidah yang mengatur demokrasi politik, Kaidah yang mengatur hal ini mencakup hak politik warga negara, partisipasi politik dan peranan partai politik baik dalam memajukan masyarakat maupun dalam proses pembangunan bangsa dan negara. Hukum politik nasional didasarkan kepada UUO 1945 dan seluruh perundang undangan yang berkaitan dengan politik. Misalnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dan lainnya. Hukum politik ini harus menjadi dasar dalam pelaksanaan demokrasi politik.

Demokrasi politik sangat menentukan proses kepemimpinan bangsa dan negara. Misalnya dalam pemilihan umum, dapat menentukan siapa yang menjadi wakil rakyat dan siapa yang menjadi Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati dan sebagainya. Oleh karena itu, demokrasi politik harus sehat. Jika

tidak maka proses rekruitmen dan regenerasi kepemimpinan bangsa akan menjadi kacaul. Paling tidak cacat karena bisa saja terjadi penyimpangan terhadap hllkum politik yang berlaku.

Penyimpangan terhadap hukum politik telah pernah terjadi dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Paling tidak di zaman pemerintahan Soekarno misalnya:

1. Ketetapan MPRS No. 11/1960 tentang sebutan "Pemimpin Besar Revolusi" tanpa batas waktu terhadap Presiden. Yang tidak ada disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
2. Sehubungan dengan Ketetapan MPRS No. 1/1960, MPRS membuat Ketetapan MPRS lagi No. III/1963, untuk mengangkat Presiden Republik Indonesia sebagai Presiden untuk seumur hidup.

Kedua hal ini bertentangan dengan hukum politik berdasarkan UUD 1945. Karena pengangkatan Presiden seumur hidup tidak dikenal baik menurut hukum Tata Negara Indonesia maupun menurut konvensi ketatanegaraan. Di zaman orde baru pun, sebagian dari pelaksanaan demokrasi politik bersifat semantik. Bahkan bertentangan dengan UUD 1945. Juga misalnya pada tahun 1985 undang undang yang lahir menunjukan pelaksanaan demokrasi politik bersifat semantik yang dalam hal ini hanya dijadikan “lipstick demokrasi” oleh kekuasaan.

Karena peranan partai politik melalui wakil-wakil rakyat di DPR-Iah Indonesia memiliki undang-undang politik yang lebih demokratis, transparan dan bernuansa kebebasan. Hal ini berarti pelaksanaan hukum politik di negeri ini tidak lagi semantik. Mlldah-mlldahan seterusnya seperti itu. Kalau tidak sejarah akan berulang. Memang sudah saatnya meneiptakan hukum politik yang tidak semantik. Namun, hal itu tak mungkin dilakukan jika paradigma hukum politik tidak berllbah. Untuk itu reformasi hukum politik perlu diteruskan. Hukum politik lama memang slldah direformasi. Reformasi tersebut belum berhenti. Roda reformasi hukum politik harus terus berputar sampai tereipta iklim yang sangat kondusif. Dengan demikian partisipasi politik warga negara dan partai politik semakin hidup dan berkembang seeara sehat.

Jadi, dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan setelah Indonesia merdeka hukum politik terkadang eidera. Namun hal ini dapat diperbaiki jika ada kemauan dan keberanian untuk memperbaikinya. Namun dalam perspektif akademis, untllk menentukan apakah hukum politik telah eidera, memang memerlukan peneiitian. Dari sisi lain, peranan partai politik pun tidak kalah pentingnya ketika partai politik mau menyerap aspirasi rakyat bukan

saja dalam konteks merumuskan kontribusi untuk perbaikan hukum politik, bahkan meluas sampai ke dimensi pembangunan lainnya. Peranan partai poiitik tampak membaik di era reformasi.

Dengan banyaknya jumlah partai politik akibat demokrasi politik yang semakin terbuka, kebebasan menyerap aspirasi rakyat semakin mungkin untuk dilakukan. Karena peranan partai politik melalui wakil-wakil rakyat di DPR-Iah Indonesia memiliki undang-undang politik yang lebih demokratis, transparan dan bernuansa kebebasan. Hal ini berarti pelaksanaan hukum politik di negeri ini tidak lagi semantic. Kalau tidak sejarah akan berulang. Memang slldah saatnya meneiptakan hukum politik yang tidak semantik. Namun, hal itu tak mungkin dilakukan jika paradigma hukum politik tidak berubah. Untuk itu reformasi hukum politik perlu diteruskan. Hukum politik lama memang sudah direformasi. Reformasi tersebut belum berhenti. Roda reformasi hukum politik harus terus berputar sampai tereipta iklim yang sangat kondusif. Dengan demikian partisipasi politik warga negara dan partai politik semakin hidup dan berkembang secara sehat.

Pengetahuan politik akan membawa seseorang pada tingkat partisipasi tertentu, pengetahuan politik yang mumpuni akan membuat seseorang dapat lebih aktif dalam bidang politik begitu pun sebaliknya.Dalam sistem politik tidak cukup hanya berdimensi pengetahuan, tetapi lebih merupakan paduan antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dikembangkan bersama-sama. Ketiga hal tersebutlah yang dianggap sebagai nyawa dari melek politik warga negara.

Indikasi melek politik dilihat dari tiga aspek yang merupakan hasil dari Pendidikan politik. Dari aspek pengetahuan, seseorang dikatakan melek politik apabila sekurang-kurangnya menguasai tentang:

1. Informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan, dari mana uang berasal, bagaimana sebuah institusi bekerja.
2. Bagaimana melibatkan diri secara aktif dalam memanfaatkan pengetahuan.
3. Kemampuan memprediksi secara efektif bagaimana cara memutuskan sebuah isu,
4. Kemampuan mengenal tujuan kebijakan secara baik yang dapat dicapai ketika isu (masalah) talah terpecahkan,
5. Kemampuan memahami pandangan orang lain dan pembenahan mereka tentang tindakan dirinya sendiri.

Politik hukum mampu mengarahkan negara untuk mewujudkan cita cita bernegara untuk menjadi negara yang mampu melindungi hak-hak warga

negara dan menjadikan negara mampu mewujudkan kedamaian dan ketertiban dunia. Politik hukum berlatar belakang dari:

1. Adanya tuntutan pembaharuan atau penggantian hukum dari jaman penjajah kolonial Belanda menuju ke jaman kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan telah membawa perubahan bagi bangsa Indonesia pada realitas hukum yang diwujudkan dalam membentukan dan penetapan hukum berdasarkan kesepakatan para pendiri bangsa.
2. Adanya tuntutan untuk merubah struktur sosial setelah Indonesia merdeka, akan membawa politik hukum yang mengarahkan pada struktur sosial baru. Hal ini menjadikan hukumpun berubah karena fungsinya untuk melayani masyarakat.
3. Adanya tuntutan perubahan tujuan negara dari tujuan penjajah kolonial yang menjajah negara Indonesia menjadi tujuan pemerintah Indonesia yang merdeka. Sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alenia IV, yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan diikrarkan.
4. Pendiri bangsa yang berkehendak untuk menuntut adanya konsekuensi untuk merubah hukum positif dan segala ketentuan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai Pancasila.
5. Politik hukum memberikan inspirasi untuk membuat dan membentuk hukum yang sesuai dengan landasan filosofis Pancasila.
6. Adanya semangat pemerintah untuk mengseleksi berlakunya hukum, dimana hukum yang masih tetap dipakai karena mengandung nilai universal, yang mana hukum yang tidak bisa dipakai karena bertentangan dengan nilai Pancasila.
7. Adanya tuntutan reformasi pada pemerintahan, yang memandang hukum sebagai salah satu alat untuk menyelesaikan sautu permasalahan dalam negara, sekaligus merevisi hukum yang bertentangan dengan Pancasila atau (yudicial review).

Kehidupan masyarakat yang demokratis yang kekuasaan negara berada di tangan rakyat dan dilakukan dengan sistem perwakilan, dan adanya peran aktif masyarakat dapat memberikan manfaat bagi perkembangan bangsa, negara, masyarakat. Manfaat demokrasi adalah sebagai berikut.

1. Kesetaraan sebagai warga negara memiliki prinsip kesetaraan tidak hanya menuntut bahwa kepentingan. Setiap orang harus diperlakukan sama dan sederajat dalam kebijakan pemerintah, tetapi juga menuntut perlakuan yang sama terhadap pandangan atau pendapat dan pilihan setiap warga negara.

2. Memenuhi kebutuhan umum. Dibandingkan dengan pemerintahan tipe lain seperti sosialis dan fasis, pemerintahan yang demokratis mungkin lebih memenuhi kebutuhan rakyat biasa. Rakyat biasalah yang merasakan pengaruh kebijakan pemerintah dalam praktiknya.
   Sebaliknya, kebijakan pemerintah mencerminkan keinginan rakyat hanya jika ada saluran pengaruh dan tekanan yang konsisten dan efektif dari bawah.
3. Pluralisme Demokrasi mengandalkan debat terbuka, persuasi, dan kompromi. Penekanan demokrasi pada debat tidak hanya mengasumsikan adanya perbedaan pendapat dan kepentingan pada sebagian besar masalah kebijakan, tetapi juga menghendaki bahwa perbedaan-perbedaan itu harus dikemukakan dan didengarkan. Dengan demikian, demokrasi mengisyaratkan kebhinekaan dan kemajemukan dalam masyarakat ataupun kesamaan kedudukan di antara para warga negara.
4. Menjamin hak-hak pada dasar Demokrasi. Diskusi terbuka sebagai metode mengungkapkan dan mengatasi masalah-masalah perbedaan dalam kehidupan sosial tidak dapat terwujud tanpa kebebasan yang ditetapkan dalam konvensi tentang hak-hak sipil dan politis: hak kebebasan berbicara dan berekspresi, hak berserikat dan berkumpul, hak bergerak, dan hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan diri.
5. Pembaruan kehidupan sosial memberi penghapusan kebijakan yang telah usang secara rutin dan penggantian para politisi dilakukan dengan cara santun dan damai, menjadikan sistem demokrasi mampu menjamin pembaruan kehidupan sosial

# BAB VI
# EKONOMI DAN PARTAI POLITIK

## A. Pengertian Ekonomi Politik

Ilmu Ekonomi Politik merupakan bagian dari ilmu sosial yang didasarkan pada dua subdisiplin ilmu, yaitu ekonomi serta politik. Ilmu Ekonomi Politik adalah disiplin ilmu interdisiplin yang menggabungkan ilmu ekonomi dan ilmu politik sehingga bisa dipergunakan dalam menganalisis ilmu-ilmu sosial lainnya dengan menggunakan beberapa isu yang relevan atau berhubungan dengan masalah ekonomi politik. Salah satu contoh masalah yang bisa dianalisis dengan menggunakan pendekatan ekonomi politik adalah korupsi.

Ilmu ini mempelajari dua jenis ilmu yaitu ilmu politik serta ilmu ekonomi yang disatukan menjadi kajian ilmu ekonomi politik. Dalam penggunaan secara tradisional, istilah ekonomi politik digunakan menjadi sebuah sinonim atau nama lainnya dari istilah ilmu ekonomi (Rothschild, 1989).

Ekonomi atau perekonomian ialah sekumpulan besar aktivitas produksi serta konsumsi yang saling berkaitan dalam membantu untuk menentukan bagaimana cara mengalokasikan sumber daya yang langka. Produksi dan konsumsi barang dan jasa dipergunakan dalam memenuhi kebutuhan orang-orang yang hidup serta beroperasi pada suatu perekonomian, yang juga dikenal menjadi sistem ekonomi.

Ekonomi merupakan ilmu sosial yang mengkaji perilaku manusia dalam mengurus sumber daya yang langka kemudian mendistribusikannya kepada individu atau kelompok yg berbeda dalam suatu masyarakat. Kata"ekonomi" berasal dari bahasa Yunani, yakni (oikos) yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan (nomos) yang berarti "peraturan, hukum, aturan".

Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai "peraturan rumah tangga" atau "manajemen rumah tangga". Ahli ekonomi atau ekonom adalah seseorang yang memakai konsep sertadata ekonomi dalam pekerjaannya.

Perekonomian mencakup seluruh kegiatan yang terlibat dalam suatu produksi,konsumsi, serta perdagangan barang dan jasa pada suatu daerah. Ekonomi berlaku bagi seluruh masyarakat di mulai dari individu sampai organisasi seperti perusahaan, bisnis dan juga pemerintah. Perekonomian suatu negara atau daerah tertentu diatur oleh suatubudaya, hukum, sejarah, serta geografi, diantara faktor lainnya, dan berkembang sesuai kebutuhan. Karena alasan inilah tidak ada dua perekonomian yang persis sama

Sementara itu, politik merupakan seni serta ilmu dalam memperoleh kekuasaan secara konstitusional juga non-konstitusional. Asal kata politik dari Bahasa Belanda yaitu ‘politiek’ serta ‘politic’ dalam Bahasa Inggris, yang keduanya berasal dari Bahasa Yunani (politika - berhubungandengan suatu negara) yang memiliki akar kata (polites – warga negara) serta (polis – negara kota).Secara etimologi ‘politik’ masih berkaitan dengan politis, kebijakan. Kata ‘politis’ artinya hal- hal yang berkaitan dengan politik. Sedangkan orang-orang yang terlibat dalam politik disebut dengan istilah ‘politisi’. Secara terminologis, politik dapat dipahami sebagai:

1. Mengarah kepada satu segi kehidupan manusia dan masyarakat. Lebih condong pada politik sebagai upaya dalam meraih kekuasaan, memperbesar dan mempertahankankekuasaan (politics).
   Misal : kejahatan politik, hak-hak politik, dan kegiatan politik.
2. Mengacu pada “seperangkat tujuan yang ingin dicapai” atau “cara atau arah kegiatan tertentudalam mencapai tujuan tertentu”. Lebih condong pada kebijakan (policy).
   Misal : politik pada dalam negeri, politik luar negeri, serta politik keuangan.

Mengarah pada pengaturan urusan masyarakat pada semua aspek kehidupan. Pemerintah mengatur urusan warga, warga mengoreksi pemerintah dalam melaksanakan fungsinya (siyasah). Tentu saja dari ketiga definisi tadi, definisi yang pertama lebih mempunyai konotasi negatif daripadadefinisi yang kedua serta ketiga. Memang, yang pertama berorientasi pada politik kekuasaan, dalam mencapai serta mempertahankan kekuasaan yang bisa dicapai dengan cara apapun baik atau buruk, dapat dibenarkan dengan cara apapun, dan lebih diarahkan pada kepentingan pemimpin atau elit penguasa. Sementara itu yang kedua serta ketiga lebih berorientasi pada politik pelayanan kepada masyarakat, dimana posisi pemimpin adalah pelayan bagi masyarakat bukan pemilik dari aset-aset strategis.

Jadi, ekonomi politik secara singkat mengacu pada saran para ekonom kepada pemerintah mengenai kebijakan ekonomi umum atau tentang beberapa proposal spesifik tertentu yang dirancangoleh politisi. Ekonomi politik adalah teori sosial mendasar yang menggambarkan hubungan antara ekonomi dan politik. Dimana keduanya saling bergantung dan saling menguntungkan satu sama lain.

Ekonomi politik juga merupakan ilmu kekayaan dan berafiliasi dengan upaya manusia dalam memenuhi hasrat dan memuaskan impian. Sedangkan jika dipahami dalam arti sempit, ekonomi politik adalah ilmu yang mempelajari hubungan sosial, khususnya hubungan kekuasaan yang secara bersama-sama membentuk produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya atau sumber daya komunikasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ekonomi politik ialah ilmu yang menelaah dua disiplin ilmu yang tidak sama, yaitu ekonomi dan politik, dimana bisa diklaim juga menjadi politik ekonomi atau kebijakan ekonomi yang juga merupakan cara atau tindakan pemerintah (politik) di bidang ekonomi agar tercapainya kemakmuran masyarakat.

Bagi Marx, sebagaimana dijelaskan dalam bab pertama The Oxford Handbook of Political Economy oleh Barry dan Donald Wittman, ekonomi politik didefinisikan oleh Marx sebagai kepemilikan alat produksi yang bergantung pada proses sejarah. Berdasarkan pemikiran Adam Smith, ekonomi politik artinya branch of science of a statesman or legislator serta merupakan pedoman untuk mengatur perekonomian nasional (Gilpin, 1987). Menurut Mochtar Mas'oed, ekonomi politik adalah studi yang mengkaji keterkaitan antara kenyataan politik dengan ekonomi, antara negara dan pasar, antara lingkungan domestik serta internasional, dan juga antara pemerintah dengan warganya (Mas'oed, 2008).

Menurut Balaam, ekonomi politik adalah disiplin intelektual yang mempelajari hubungan antara ekonomi dan politik. Berdasarkan pemikiran P. Todaro, ekonomi politik berkaitan dengan hubungan ekonomi dan politik dengan fokus pada peran kekuasaan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pakar lainnya memakai kata ekonomi politik untuk merujuk pada masalah yang diciptakan dari interaksi kegiatan ekonomi serta politik. Dengan demikian, ekonomi politik mengungkapkan dan menjelaskan hukum-hukum produksi kekayaan ditaraf dunia.

Kajian ekonomi politik menitikberatkan pada fenomena ekonomi secara umum dan dikaji secara lebih spesifik; yaitu secara khusus menyoroti hubungan timbal balik antara faktor ekonomi dan politik. Tetapi, pada perkembangan selanjutnya, kata ekonomi politik selalu mengacu pada interaksi antara aspek ekonomi dan aspek politik.

Berikut adalah contoh dari ekonomi politik yang biasanya ditetapkan

oleh suatunegara, diantaranya:

1. Penetapan Harga Maksimum

   Contoh ekonomi politik salah satunya adalah penetapan harga maksimum. Pada penetapan harga maksimum dapat dilakukan pada banyak sektor termasukperdagangan, kesehatan, dan transportasi. Misalnya seperti menetapkan harga obat-obatan di apotek, harga BBM, tarif bus, kereta api dan sebagainya.

2. Penetapan Upah Minimum Regional (UMR)

   Selain penetapan harga maksimum, penetapan UMR pula merupakan contoh dari ekonomi politik. UMR adalah penetapan upah minimum yang merupakan standar pengupahan yang berlaku untuk semua kabupaten atau kota di provinsi yang sama.

## B. Sejarah Ekonomi Politik

Ilmu ekonomi politik baru diajarkan pada dua dasawarsa terakhir di Indonesia. Namun, bila diperhatikan berdasarkan sejarahnya, ilmu ekonomi politik ini faktanya telah sangat tua. Sebenarnyasejak zaman Aristoteles yang merupakan seorang filsuf dari Yunani kuno, ilmu ekonomi politik ini sudah dibahas. Ilmu ekonomi politik terus berkembang dan berlanjut. Mulai dari zaman ekonomi klasik, neoklasik, sosialis hingga sampai pada zaman sekarang ini.

Berdasarkan pemikiran Deliarnov (2006:2) di zaman klasik, antara ilmu ekonomi serta ilmu politik masih bersatu. Namun, di perkembangannya pada masa neoklasik, ilmu ekonomi serta ilmu politik dipisahkan serta bukan lagi menjadi suatu kesatuan. Ilmu ekonomi berkembang dengan didukung oleh ilmu-ilmu lain contohnya statistik serta kalkulus yang menyebabkan ilmuekonomi dan ilmu politik terpecah.

Pada zaman klasik, ekonomi yang baik yang kita lihat adalah ekonomi yang terjadi dengan sendirinya secara natural. Bapak ekonomi klasik yang populer seperti Adam Smith anti sekali jika ada campur tangan pemerintah. Perekonomian diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar, lalu di zaman klasik ini dikenal juga istilah ‘invisible hand’.

Di zaman neoklasik, dipisahkannya ilmu ekonomi serta ilmu politik. Namun pada kenyataannya pada tahun 60 dan 70-an, terdapat

beberapa peristiwa yang memaksa ilmu ekonomi dan ilmu politik untuk bersatu lagi. Hal ini muncul sebab adanya fakta perilaku "kalap rente" atau sangat akrab disebut dengan rent-seeker yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Peristiwa penghapusan standaremas di Amerika terjadi pada tahun 70-an. Selain itu, ekonomi Jepang yang meroket mengharuskan negara-negara harus tahu hubungan ekonomi serta politik dalam menata ekonomi Internasional.

Menurut Clark dalam Yustika (2013:98), keluarnya teori ekonomi bisa ditinjau dari abad ke-14 serta ke-16 dan disebut sebagai great transformation di Eropa Barat, dimana pada hal ini menyisihkan sistem ekonomi feodal yang dengan adanya pasar ekonomi baru menimbulkan peluang dalam memberikan ekspresi untuk individu yang tadinya ditekan oleh lembaga gereja, negara, serta komunitas.

Pada abad ke-18 datang Abad Pencerahan (enlightenment), di abad ke-18 ini peristiwa revolusiindustry terjadi di Prancis. Yang memiliki tujuan atau inti dari gerakan ini yaitu untuk mengadakan otonomi individu serta eksplanasi terhadap kapasitas manusia.

Sebenarnya yang menjadi dasar dari ekonomi politik adalah dari abad pencerahaan ini. Tetapi kata ekonomi politik ini awal kali muncul saat abad ke-16 dari penulis Prancis yang bernamaAntoyne de Montcheitien (1575-1621) dalam bukunya yg memiliki judul Treatise on Political Economy. Para pakar ekonomi politik mengembangkan ide dan menyebarkan pandangan barunya perihal perlunya peran negara buat menstimulasi aktivitas ekonomi, dimana pasar belumberkembang pada waktu itu di abad 16. Sehingga negara dapat menjalankan perannya untuk dapat membuka daerah baru perdagangan, memberikan proteksi, serta menyediakan supervisi untuk produk yg bermutu. Namun diakhir abad ke-18, lambat laun pandangan tersebut mulai berubah serta ditentang, karena pemerintah dianggap bukan menjadi agen yg baik dalam mengatur aktivitas ekonomi, namun pemerintah malah merintangi usaha untuk mendapatkankesejahteraan.

Setelah terdapat perubahan pandangan yang terjadi di abad ke-18, timbullah berberapa aliran padatradisi pemikiran ekonomi politik, hingga dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yakni:

1. Aliran ekonomi politik konservatif yang dipelopori oleh Edmund

Burke.

2. Aliran ekonomi politik klasik oleh Adam Smith, Thomas Malthus, David Ricardo, Nassau, dll.
3. Aliran ekonomi politik radikal yang telah di propagandakan oleh William Godwin, Thomas Paine,Condorcet, dan Karl Marx.

**C. Pendekatan pada Ekonomi Politik**

1. Pendekatan Pilihan Publik

Pilihan publik merupakan suatu perilaku individu untuk menentukan secara rasional yangmereka pilih. Pada ekonomi politik, analisisnya ditujukan kepada aktor. Aktor disebut sebagai pelaku yang melakukan aktivitas ekonomi serta politik, kemudianindividualisme metodologis yang menjadi landasan dasar pada asumsinya, yang menempatkan perilaku rasional individu pada institusi non-pasar. Pendekatanpilihan publik bisa dipergunakan dalam mempelajari sikap aktor politik serta dapat juga dipergunakan menjadi sebuah petunjuk untuk pengambilan kebijakanpublik yang efektif. Tetapi, berhubung sifatnya yang longitudinal, maka yang akan dikeluarkan oleh model-model yang menjadi pilihan publik akan berbeda-beda antara negara satu dengan negara yang lainnya.

2. Pendekatan Neo-Marxis

Ekonomi politik pada pendekatan neo-marxis, menitikberatkan pada sifat holistik yaitu analisis dengan cara menyeluruh, tentang betapa pentingnya aspek-aspek ekonomi makro dari suatu sistem ekonomi dan sistem politik. Kemudian pendekatan ini mempunyai model yang memiliki aspek komparatif, yaitu upaya dalam membandingkan secara eksplisit. Pendekatan ini juga memfokuskan serta memodelkan beberapa perbedaan antar-negara dalam bidang kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan ketergantungan kelas sosial di warga.

Dalam pendekatan Ekonomi Politik, persoalan yang dihadapi yaitu mencakup variabel- variabel politik, variabel ekonomi serta variabel sosial budaya. Dengan demikian, faktor- faktor yang berpengaruh mencakup:

a. Intervensi pemerintah, perubahan kebijakan, dan tindakan politik ekonomi.
b. Naiknya harga pada pasar.

c. Merosotnya daya beli rakyat.
d. Langkanya sumber daya.
e. Revolusi sosial, transformasi industrial.Revolusi dan kemajuan ilmu, pengetahuan, teknologi, komunikasi, serta info.
f. Keterkaitan antara Politik dengan Ekonomi

Politik serta ekonomi merupakan entitas yang tidak mampu dipisahkan, karena satu dengan yanglainnya saling mempengaruhi. Dinamika keterkaitan antara politik dengan ekonomi sudah jadi perhatian bagi peneliti-peneliti di dunia. Berubahnya politik akan mempengaruhi dalam kehidupan ekonomi. Kebalikannya, kehidupan ekonomi akan mempengaruhi dalam kehidupan politik (Persson serta Tabellini, 2006).

Keberhasilan suatu gagasan atau suatu ideologi ekonomi untuk menciptakan sistem perekonomian dan dijadikan nilai (value) dan dibawa oleh ide atau gagasan maupun sebuah ideologi ekonomi hinggadijadikan menjadi fondasi utama ditentukan oleh pemahaman yang bagus dalam proses serta mekanisme politik. Prof Zubair Hasan yang merupakan seorang pemenang penghargaan IDB Prize pada bidang ekonomi Islam pada tahun 2009, pada berberapa kesempatan menyampaikan bahwa setiap pemerintah (negara-negara anggota OKI/Organisasi Konferensi Islam) menjalankan ekonomi Islam menjadi dasar dari kebijakan perekonomian mereka, sehingga perkembangan ekonomi Islam belum akan bisa untuk bersaing dengan ekonomi konvensional.

Maka dari itu, dia memberi penegasan akan pentingnya dalam mendorong keberpihakankekuasaan dalam pengembangan ekonomi Islam secara keseluruhan, jadi dominasi ekonomi yang berbasis riba bisa diminimalisasi. Secara tidak langsung, perkataan Prof Zubair Hasan tadi pula memiliki arti bahwa keputusan politik negara mempunyai efek yang kuat sekali pada keadaan suatu perekonomian bangsa.

Paras serta kinerja ekonomi suatu negara, dipengaruhi sekali oleh mekanisme dan juga prosesmenentukan keputusan politik yang dijalankan serta disetujui oleh warga di suatu negara. Matangnya berpolitik suatu negara sangat berkaitan erat dengan majunya perkonomian negara tersebut. Majunya perkonomian mendukung

terwujudnya situasi serta kondisi politik yang seimbang, sebaliknya kondisi politik yang seimbang akan membantu mewujudkan kehidupan berekonomi yang maju serta menjadikannya sejahtera. Oleh sebab itu, kalau keadaan politik kondusif, maka bisnis seta perekonomian bisa berjalan sangat lancar.

Dari segi pasar saham, keadaan politik yang kondusif bisa membentuk harga saham naik. Sebaliknya, kalau keadaan politik tidak stabil, jadi akan menyebabkan ketidakpastian di dalam bisnis. Perubahan suhu politik akibat dari suatu perbuatan ataupun kebijakan politik pada negara tertentu bisa memberi dampak yang besar bagi perekonomian negara tadi. Biasanya risiko politik berhubungan dengan pemerintahan dan keadaan politik serta keamanan pada suatu negara.

Dalam konteks tersebut, kinerja sistem ekonomi-politik satu dengan yang lain telah berinteraksi, hingga mengakibatkan setiap insiden ekonomi-politik tidak dibatasi lagi dengan batas-batas tertentu. Contohnya, IDB (Islamic Development Bank), IMF (International Monetary Fund), atau Bank dunia (World Bank), bahkan hingga investor-investor asing sering memikirkan insiden politik nasional serta memperhitungkan risikonya secara ekonomi serta bisnis.

Pola politik pula selalu berhubungan erat dengan perkembangan bisnis. Sebaliknyapola bisnis pula berhubungan erat dengan politik. Budaya adalah keyakinan atau perilaku yang mempengaruhi kebijakan serta administrasi publik pada negara tertentu, yang di dalamnya terdapat pola yang berhubungan menggunakan dengan kebijakan ekonomi atau sikap bisnis. Pada konteks fungsi politik kepada ekonomi dan bisnis, ada sistem politik yang dibuat agar pemerintah ikut campur tangan pada bidang perekonomian, yakni sistemliberal.

Terdapat pula sistem politik yang secara penuh memiliki sifat intervensionis kepadaperekonomian dan bisnis. Terdapat juga sistem politik yang cenderung memberikan arahan supaya pemerintah ikut terlibat serta ikut campur tangan pada bidang ekonomi bisnis. Negara Indonesia lebih cenderung berada di pola terakhir, yaitu adanya keterlibatan pemerintah atau pemerintah turut ikut campur pada

ekonomi dan bisnis. Hal tersebut bisa ditinjau pada hukum ataupun beberapa kebijakan yang dibuat pemerintah sehingga mendukung perekonomian serta bisnis. Kebijakan pemerintah RI memberikan pengaruh yang siginifikan kepada perkembangan ekonomi serta bisnis.

Studi tentang Ekonomi Politik

Studi perihal ekonomi politik ditentukan oleh teori permainan, sebab melibatkan aneka macamkelompok yang saling bersaing agar mendapatkan sumber daya serta kekuasaan yang langka yang menilai kebijakan manakah yang akan menyampaikan hasil yang paling menguntungkan bagi masyarakat. Hal tersebut juga berhubungan dengan kemampuan ekonomi dalam mencapai yang hasil yang diinginkan.

Studi mengenai ekonomi politik memiliki fokus pada tiga bidang yang utama, yaitu:

Studi Interdisipliner

Menurut pandangan interdisipliner, ekonomi politik memiliki fokus pada ekonomi, sosiologi, serta ilmu politik agar paham bagaimana antara sistem ekonomi, institusi politik, serta lingkungan saling mempengaruhi satu sama lain.

Tiga bidang studi interdisipliner yang di dalamnya terdapat model ekonomi dari proses politik, ekonomi politik internasional serta bagaimana dalam memberikan pengaruh pada hubungan internasional, serta mengalokasikan sumber daya pada sistem ekonomi yg tidak sama.

Politik Ekonomi Baru

Pada bidang ekonomi politik baru, menjadikan kebijakan ekonomi menjadi keyakinan atau tindakan yang wajib dibicarakan lebih lanjut daripada dijadikan menjadi kerangka kerja yang harus dianalisis. Ini memadukan antara ideologi ekonomi klasik serta kemajuan baru pada bidang politik serta ekonomi. Pendekatan ini tidak menyetujui cita-cita lama mengenai agensi serta kepentingan negara dan juga pasar yang memiliki tujuan agar dapat mendorong perdebatan politik mengenai impian serta kebutuhan warga negara.

Politik Ekonomi Internasional

Mempelajari ekonomi politik internasional, pula disebut juga sebagai

ekonomi politik dunia,menganalisis keterkaitan antara ekonomi serta hubungan internasional. Ini memakai gagasan- gagasan dari ekonomi, sosiologi, serta ilmu politik. Ekonomi politik internasional memiliki fokus pada bagaimana antara negara serta institusi dalam memakai interaksi ekonomi global dalam membuat sistem politik.

## D. Sikap Ekonomi Politik

Politik Ekonomi tertarik sekali dengan keuntungan dan juga kerugian yang muncul dari penerapan kebijakan tertentu. Ini memberikan mereka ilustrasi mengenai kelompok mana yang setuju dengan kebijakan serta kelompok mana yang menolak kebijakan tersebut. Mereka juga menyelidiki bagaimana individu dalam menaikkan utilitas mereka degan cara berpartisipasi pada aktivitas politik. Modal serta tenaga kerja dipergunakan dalam mempengaruhi proses politik hingga menghasilkan kebijakan yang manfaatnya paling besar. Sikap politik pada perekonomian tertentu dibentuk dengan:

1. Minat

Minat sangat penting karena minat dapat mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh kelompok yang bisa memakai kekuasaannya. Individu pada suatu pemerintahan cenderung mempromosikan kepentingan ekonom serta politik mereka sendiri yang dapat menolong merekadalam mempertahankan kekuasaannya. Masyarakat yang berada di luar pemerintahan cenderung lebih peduli pada hasil kebijakan ekonomi yang telah diterapkan.

2. Ide

Ide juga diklaim memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap kebijakan, selain dari kepentingan ekonom serta politik. Diasumsikan jika individu tidak dapat memberi penilaian darihasil pilihan-pilihan yang sudah tersedia untuk mereka karena mereka mencari ide yang lebih rasional.

Ideologi memungkinkan seseorang dalam memutuskan apa yang seharusnya mereka lakukan supaya tetap konsisten dari nilai serta keyakinan mendasar mereka. Memasukkanideologi pada model ekonomi memiliki kemungkinan tindakan-tindakan politik dijalankan oleh faktor selain dari kepentingan diri sendiri. Orang-orang yang ingin membuatperubahan di dunia sangat ingin masuk ke

dalam politik.

3. Lembaga

Terdapat aturan politik yang mencakup Konstitusi serta mengungkapkan bagaimana seorang pemimpin dipilih serta bagaimana kebijakan yang baru bisa diterapkan. Lembaga membantu dalam menyusun insentif yang dihadapi individu serta kelompok di dalam perekonomian.

4. Teori Politik Ekonomi

Teori ekonomi modern dipisahkan menjadi tiga ideologi, yaitu:

a. Liberalisme

Ideologi liberal berasal dari konsep kerja serta penggunaan tanah, tenaga kerja, serta modal agar dapat menghasilkan barang yang tahan lama. Seorang ekonom liberal mempercayai jika seorang ekonom bisa menguntungkan bagi banyak orang serta masyarakat bisa maju dengan meningkatkan standar hidup.

Mereka memiliki pikiran jika suatu keinginan suatu kelompok lebih penting daripada keinginan individu dalam pengambilan keputusan. Mereka pula mempercayai pada kesempatan yang sama untuk semua orang serta peduli pada struktur masyarakat sipil.

b. Marxisme

Marxisme mengungkapkan jika ketidaksetaraan itu buruk, serta kekayaan didapatkan dari kerja serta pertukaran. Beliau tidak menyetujuikepemilikan pribadi dari sumber daya, yang diyakininya akan mengarah kepada ketidaksetaraan serta hanya menyetujui kebutuhan elit dan bukan masyarakat seluruhnya.

c. Nasionalisme ekonomi

Ini merupakan keyakinan jika negara mempunyai seluruh kekuasaan serta jika individu wajib bekerja agar dapat memanfaatkan keuntungan ekonomi. Ideologi tadi mengatakan jika pemerintah wajib mengontrol seluruh sumber daya serta jika beberapa individu yang terbelakang yang tidak bisa menciptakan rakyat yang kohesif tanpa negara yang kuat. Oleh karena itu, ekonom politik memberi kita

pemahaman perihal bagaimana suatu negara serta rumah tangga dikelola serta diatur dengan cara mempertimbangkan faktor politik dan juga ekonomi yang saling berhubungan satu sama lain.

## E. Perbedaan Ekonomi Politik Klasik dengan Ekonomi Politik Kontemporer

Lord Robbins merupakan seorang ekonom Inggris, dan mantan pimpinan The London School ofEconomics, yang memiliki nama lengkap Lord Lionel Robbins, lahir di Middlesex dan pada tahun 1898 serta meninggal di London tahun 1984), di dalam buku karya dirinya yang memiliki judul "Political Economy : Past and Present : A Review of Leading Theories of Economy Policy"(yang telah terbit pada tahun 1976), menjelaskan jika Ekonomi Politik itu bisa bedakan menjadi Ekonomi Politik Lama (atau sering diklaim menjadi Ekonomi Politik Klasik) serta Ekonomi Politik Baru (atau tak jarang disebut dengan Ekonomi Politik Modern atau punEkonomi Politik Kontemporer).

Baik pada teori Ekonomi Politik Klasik ataupun pada Ekonomi Politik Kontemporer menggambarkan adanya keterkaitan antara ekonomi serta politik pada suatu negara. Baik pada Ekonomi Politik Klasik yang dipelopori oleh ekonom klasik yaitu Adam Smith dan juga David Ricardo, ataupun di Ekonom Politik kontemporer yang berdasarkan teori ekonomi politik yang dicetuskan oleh Karl Marx, negara diklaim memiliki peran tertentudalam memberi respons agar dapat menggeser keseimbangan pasar.

Adam Smith serta David Ricardo adalah tokoh teori ekonomi klasik dan menjadi dasar dari pendekatan teori Ekonomi Politik Klasik. Teori Ekonomi PolitikKlasik di dalamnya menyatakan jika pasar mempunyai kekuatan dalam mengelola diri sendiri (artinya kuat atau strong sense). Pandangan seperti ini tak jarang dijadikan dasar untuk menjalankan kebijakan pasar bebas. Bahkan ekonom-ekonom klasik ini ialah yang pertama kali melihat perekonomian menjadi suatu sistem yg secara prinsip terpisah dari politik serta rumah tangga. Menurut mereka, segala bentuk investasi wajib terdapathasil yang nyata (return of investment).

Berdasarkan pendapat dari ekonom-ekonom klasik ini, siapa saja termasuk negara sekalipun jika melakukan investasi wajib berpikir dulu berapa yang akan didapatkan dari investasi yang akan ditanamkan tersebut. Return of investmentini sudah menjadi pondasi dalam melakukan investasi. Ekonom-ekonom klasik dengan kukuh mengangggap jika politik merupakan sesuatu yang penting, tetapi segala tindakan yg berkaitan dengan politik jangan selalu mengintervensi pasar, biarkan pasar berjalandengan natural, jadi laba akan didapatkan dari pasar yang bekerja secara alami ini.

Jika mekanisme pasar berjalan secara natural dimana perekonomian dipasrahkan kepada pasar dengan tidak ada intervensi politik sehingga akan memberikan dampak dalam tumbuh serta berkembangnya perekonomian secara makro. Teori ekonomiklasik menyatakan bahwa sebenarnya fungsi pemerintah terbatas hanya pada soal penegakan hukum, keamanan yang terjaga serta pembangunan infrastruktur.

Para pengikut aliran teori ekonomi klasik memberi saran mengenai konsep pasar yang mengatur dirinya sendiri, sebab mereka menganggap jika sistem pasar ialah sebuahrealita yang akan terwujud secara natural tanpa adanya ikut campur pemerintah, karena pasar mempunyai hubungan dengan negara, namun bukan berarti pasar adalah institusi bawahandari suatu negara. Campur tangan negara baru dibutuhkan jika ditemukan adanya ketidakseimbangan atau ketidaksempurnaan pasar. Permintaan (demand) serta penawaran (supply) sangat menentukan sempurna atau tidak sempurnanya pasar. Pengikut teori ekonomi klasik juga mengatakan jikalau pasar mempunyai kemampuan dalam bekerja sendiri.

Inilah yang disebut dengan ekonomi liberal karena pasar bebasnya. Akibat dari pandangan teori ekonomi klasik ini menjadikan pengertian Ekonomi Politik menjadi kurang jelas. Teori inimenyarankan pokok pemikiran jika ekonomi tidak bersifat politik.

Ekonomi Politik Klasik adalah cabang dari ilmu ekonomi yang di dalamnya membahasadanya campur tangan negara (politik) yang bersifat tidak lama dalam mewujudkan keseimbangan (equilibrium) ataupun kesempurnaan (perfectness) pasar. Sempurnanya pasar ditentukan melalui tarik-menariknya antara penawaran (supply) serta

permintaan (demand). Namun, pada faktanya, hukum pasar tidak terlaksana dengan sempurna. Bahkan konflik sering ridak terhindarkan antara pelaku pasar kelas besar dengan pelaku pasar kelas kecil, karena pelaku pasar kelas besar cenderung mengalahkan pelakupasar kelas kecil.

Lord Lionel Robbins di dalam buku karyanya yang berjudul "Political Economy : Past and Present : A Review of Leading Theories of Economy Policy" menyebutkan pengertian Ekonomi Politik Klasik adalah suatu kesatuan yang menyeluruh dari suatu pembahasan mulai dari ilmu ekonomi murni hingga beberapa teori mengenai kebijakan murni yang di dalamnya terdapat analisis dari berjalannya ekonomi pasar, cara lain sistem kebijakan serta beberapa prinsipkeuangan negara.

Ekonomi Politik Klasik membahas hubungan antara beberapa aspek, proses, serta institusi politik dengan aktivitas ekonomi meliputi berbagai aktivitas produksi, investasi, pembentukan harga, perdagangan, konsumsi, serta lainnya. Ekonomi Politik Klasik mempercayai, jika strukturkekuasaan akan memberi pengaruh pada pencapaian ekonomi. Pendekatan Ekonomi Politik Klasik beranggapan bahwa struktur kekuasaan yang terdapat pada rakyat artinya telah given.

Ekonomi Politik Kontemporer

Ekonomi Politik Kontemporer merupakan ekonomi politik yang membicarakan mengenai bagaimana sistem ekonomi itu berjalan, dapat berjalan, wajib dibuat berjalan, serta memungkinkan dirinya berjalan.walau begitu, Ekonomi Politik Kontemporer bukan merupakan sciencetivic economics yang adalah himpunan dari value free generalization mengenai berbagai cara sistemekonomi itu dapat bekerja. Di sini ekonomi politik mengungkapkan berbagai prinsip umum pada bidang ekonomi.

Ekonomi Politik Kontemporer berpijak kepada sebuah teori yaitu teori Karl Marx, yang mengatakan jika ekonomi itu akan bersifat politik selamanya. Beberapa faktor politik ini diakibatkan oleh dinamika yang berasal dari proses ekonomi kapitalis, kemudian proses tersebut memberi warna pada beberapa pertarungan politik yang memiliki skala besar pada sejarah.

Dalam membuktikan jika cara kerja perekonomian kapitalis akan memberi dampak politik, Marx mengusulkan kritik pada pandangan ekonomi klasik mengenai pasar yang meregulasi dirinya sendiri. Karl Marx mengajukan kritik ini tidak bertujuan untuk membenarkan dari konsep kapitalisme yang dikendalikan oleh negara, tetapi bertujuan untuk memperlihatkan jika kapitalisme hidupnya tidak akan bertahan lama.

Kegagalan pasar diberi definisi dengan memakai konsep pilihan pribadi serta penggunaan sumber daya dengan efisien. Berdasarkan pemikiran kaum neo klasik, "ekonomi" merupakan segala transaksi swasta yang dilakukan agar memaksimalkan kegunaan yang didapat oleh individu, sedangkan "politik" ialah pemakaian wewenang publik agar tercapai tujuan yang sama pula.

Ekonomi Politik Kontemporer adalah studi tentang suatu sistem ekonomi sebagai cara dalam mengatasi permasalahan ekonomi fundamental secara praktis serta yg menerapkan berbagai seni dari ekonomi praktis. Ekonomi Politik Kontemporer sering membicarakan masalah ketidak-adilan pada sistem ekonomi internasional mengenai masalah pemerataan pendapatan, kemiskinan, pertumbuhan, hingga struktur sosial lainnya.

Ekonomi Politik Kontemporer mempelajari tentang variable-variabel sosial lainnya, menentukan serta berpengaruh khususnya pada kegiatan perekonomianyang terjadi di masyarakat tradisional terutama pada dunia ketiga, termasuk analisis yang dilakukan oleh aliran radikal dan juga Neo Marxist.

Ekonomi Politik Kontemporer mengacu pada manajemen permasalahan ekonomi negara, yang menghubungkan antara tujuan negara (public ends) dan kepentingan pribadi (private interests). Ekonomi Politik Kontemporer adalah studi mengenai mekanisme yg bisa dipergunakan warga dalam menjalankan perekonomian sosialnya, yang di dalamnya terdapat peralatan (tools), lembaga (institutions), sumber daya manusia yang bisa menciptakan barang (goods) serta jasa (services).

## F. Status Sosisal Ekonomi dan Kualitas Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik

Menurut Muhammad Yahya Arwiyah (2012:91) menyatakan bahwa status sosial ekonomiberperan untuk meningkatkan partisipasi politik meskipun belum signifikan. Hal tersebut dikarenakan masih ada pemilih yang memiliki pendidikan tinggi serta pendapatan banyakyang kurang mempercayai pada partai politik serta pemilih yang mempunyai pendidikan serta pedapatan redah serta pekerjaan yg kurang mapan lebih cenderung akan memenuhi kebutuhan ekonominya terlebih dahulu daripada kehidupan berpolitik.

Kualitas dari partai politik yang terdiri dari pendidikan politik kognitif, pendidikan afektif,ideologi partai, serta pola kepemimpinan sangat berperan dalam meningkatkan partisipasi politik pada suatu daerah.

Status sosial ekonomi serta kualitas partai memiliki peran yang sangat berarti secara simultan untuk meningkatkan partisipasi politik pada pemilu, maka dari itu, diperlukan peningkatan dalam status sosial ekonomi serta kualitas partai secara simultan. Untuk pemerintah pusat serta pemda harus melakukan kebijakan secara menyeluruh tentang peningkatan partisipasi politik masyarakat yg didukung oleh pendidikan politik baik secara jalur formal ataupun nonformal.

Agar parpol menjalankan peran serta fungsinya sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada undang-undang agar partai mempunyai kualitas serta berperan aktif berusaha meningkatkan partisipasi masyarakat, bisa melakukan upaya sebagai berikut:

Parpol harus melakukan pendidikan politik dari aspek kognitif serta sikap secara berkala, tidak hanya saat akan menjelang pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah saja yang setelah masyarakat memberian suaranya, pendidikan politiknya berhenti begitu saja.

Ideologi parpol yang dianut oleh partai politik masing-masing atau dianut oleh setiap masyarakat (caleg serta pemilih) itu wajib berdasarkan dari ideologi Pancasila serta konsisten pada satu ideologi yang dipergunakan.

Pola kepemimpinan papol diusahakan setiap partai mempunyai ciri khas walaupun berpola demokrasi, jadi masyarakat lebih yakin untuk

memutuskan pilihan partai serta pilihan calon-calon yang diajukan dari partai.

Adanya kesepakatan supaya partai politik tidak melakukan pembodohan serta penipuan kepada masyarakat, misalnya money politic serta adanya shadow state.

Tidak menyampaikan janji-janji diluar batas kemampuan agar bisa dipenuhi janji yangdisampaikan.

Meningkatkan kredibilitas sehingga tidak membuat para pemilih bersikap secara apatis, sebab tersebut ini bisa membuat rusaknya nasionalisme, cinta tanah air Indonesia, serta ada gilirannya mengancam kepentingan nasional.

## G. Gagasan Ekonomi Partai Politik

Pada konteks demokrasi, akhir dari proses politik pemilu itu yaitu kemenangan suara yg didapatkan dari akumulasi produksi gagasan, soliditas organisasi, dan juga kapasitas modal (untuk kepentingan kampanye, iklan, serta yang lainnya). Untuk orang awam, yang nampak dari kegiatan partai politik sampai hari ini hanya sekadar berusaha untukmemperkuat soliditas organisasi tertentu serta mengumpulkan modal demi kepentingan pemilu dengan cara yang beragam. Publik hampir tak pernah mendengarkan ide yang akan dijual partai politik, khususnya gagasan tentang pengelolaan ekonomi nasional.

Ide ekonomi partai politik begitu penting untuk disampaikan secara rinci sebab dua hal utamaberikut ini:

1. Meskipun bukan segalanya, kehidupan ekonomi adalah indikator yang paling mudah dirasakan serta diukur sebab menyangkut kehidupan masyarakat. Bahkan, untuk separuh kelompok masyarakat (terutama di pedesaan serta berpendidikan rendah), pembangunan diklaim sebangun dengan capaian ekonomi, terutama kecukupan makanan dan juga pakaian.
2. Pasca-reformasi ekonomi, banyak kalangan yang melihat arah pembangunan ekonomi yang tidakjelas (bahkan, banyak ekonom yang mengklaim kompas dari ekonomi jadi menyimpang dari cita-cita konstitusi) dan juga terjadi sistematis yang memburuk dari indikator-indikator ekonomi yang berkaitan dengan kesinambungan kesejahteraan warga, contohnya telah hancur

kepemilikan aset produktif serta ketimpangan penghasilan yang meningkat.

Partai politik sampai saat ini tidak pernah berpikir platform ekonomi menjadi suatu hal yangserius dan perlu diperjuangkan sebab memiliki asumsi bahwa hal tersebut tidak terlalu memberi pengaruh para pemilih. Menurut pengurus-pengurus partai politik, pemilih di Indonesia lebih banyak memilih preferensi politik berdasarkan figur, uang, serta ikatan primordial. Tetapi, jika melihat perkembangan ekonomi ygan semakin mengkhawatirkan serta pemilih yang menjadi melek informasi, dugaan tersebut tidak selamanya benar.

Sadarnya publik akan kenestapaan ekonomi negara jadi membuncah, jadi partai politik yangmempunyai gagasan asli dalam mewujudkan ekonomi bangsa yang berjaya memiliki potensi dibeli oleh pemilih. Partai politik harus jeli dalam melihat pergeseran ini Bila tidak ingin ketinggalan dari kereta perubahan, apalagi Ketika sebagian rakyat semakin apatis dalam melihatperkembangan partai politik. Di titik ini, ide ekonomi partai politik dijadikan medium transaksi dalam menarik pemilih serta sekaligus mengemballikan kepercayaan terhadap partai politik.

Bila sekilas melihat aspirasi ekonomi yang berkembang dari partai politik yang pernah dicatatsebagai sejarah perjalanan bangsa, setidaknya ada dua gagasan yang hingga saat ini masih hidup, yaitu:

1. Spirit sosialisme

Kelompok yang percaya jika spirit ekonomi Indonesia itu merupakan sosialisme sebagaimana yang tersirat pada beberapa pasal ekonomi konstitusi.Implikasinya, dibutuhkan peran negara yang kuat dalam memikul perintah untuk mematuhi konstitusi, seperti membentuk kesejahteraan umum, membuka lapangan kerja yang layak, serta memberi santunan kepada golongan ekonomi yang lemah.

Kelompok yang menganut developmentalisme yang berorientasi pada pencapaian target- target ekonomi yang pragmatis, seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, serta modernisasi ekonomi; tanpa terlalu dibebani oleh ideologi yang ketat.

Kelompok yang ingin menyatukan ekonomi nasional dengan gaya ekonomi internasional supaya tujuan perluasan ekonomi tercapai.

Aliran modal, barang dan jasa, manusia, serta yang lain harus dibuka. Maka dari itu, kegiatan ekonomi jadi tidak memiliki bendera.

Walaupun sedikit samar serta masih cenderung sloganistik, senarnya sebagian (kecil) partaipolitik telah menyampaikan platform ekonominya, terkhusus mengenai rumor kemandirian/kedaulatan ekonomi serta pengelolaan SDA. Sampai- sampai terdapat partai politik yang menyatakan diri sebagai green party.

Tetapi, belum terdapat satu pun partai politik yang sampai saat ini membentuk naskah ekonomisecara utuh serta menyampaikanya kepada publik. Sebagian besar partai politik lebih terkesan tidak mempunyai gagasan ekonomi sama sekali. Akibatnya warga hanya mengetahui sebatas bersaing perebutan ketua umum, menentukan calon anggota legislatif, dan juga kampanye pilkada yang meriah.

Oleh sebab itu, memaksa partai politik agar cepat- cepat membuat serta memberitahukan gagasan ekonominya untuk instrument transaksi kepada pemilih. Secara lebih substantif, platform ekonomi harusnya dijadikan salah satu tiang penyangga koalisi, jadi saat partai politik telah berkuasa tidak terjadinya bentrokan formulasikebijakan ekonomi.

2. Isu strategis

Untuk langkah awal, isu-isu strategis ekonomi yang harus ditelusuri juga sebagai pemberbeda antarparpol yaitu:

Penyebaran aset produktif (modal serta lahan/reforma agraria).

Kebijakan pajak serta pengelolaan APBN.

Kepemilikan serta pengelolaan SDA.

Pembagian peran antarpelaku ekonomi, terutama BUMN serta koperasi.

Liberalisasi ekonomi (pada sektor perdagangan, investasi, keuangan, dan lainsebagainya).

Setiap parpol harus memperlihatkan jati dirinya dengan jelas dan tegas terhadap isu-isu tersebut, supaya seluruh rakyat memiliki pemahaman yang sama saat membacanya. Melaui jalaninilah, partai politik mempunyai instrumen dalam menemukan konstituen, warga memiliki pilihan dalam memilih preferensi politiknya, serta parlemen mempunyai instrumen dalam mengawasi(koalisi) partai politik yang merebut kekuasaan (eksekutif). Mekanisme tersebut menjadikan

kehidupan politik lebih sehat sebab setiap kebohongan dapat dipandang dengan jelas.

## H. Pengaruh Konsentrasi Partai Politik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pada dinamika demokrasi Indonesia, mekanisme multipartai adalah salah satu cara dalam mengatur aspirasi. mekanisme ini didukung oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang desentralisasi fiskal dan dinamika perubahannya. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung juga ikut mendukung mekanisme demokrasi disuatu wilayah. Parpol yang menang dalam pilkada dapat memengaruhi pola alokasi anggaran daerah yang nantinya dapat berdampak pada efektifitas pengeluaran pemerintah.

Pada proses demokratisasi, memposisikan Indonesia menjadi negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Demokrasi sudah memberi ruang kebebasan yang lebih besar termasuk di bidang ekonomi.

Oleh sebab itu, para ekonom mulai memperhatikan bagaimana kaitannya antara demokrasi dengan pertumbuhan ekonomi. Amartya Sen (1996), seseorang yang meraih Nobel Ekonomi tahun 1998, menanyakan keterkaitan kausal antara rezim pemerintahan yang otoriter dengankemajuan ekonomi. Sen (1996) berkata bahwa dari data statistik seratus negara telah terbukti jika dampak positif dari rezim pemerintahan yang otoriter kepada pertumbuhan ekonomi sangat kecil. Artinya, negara yang menggunakan sistem demokrasi cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Argumen Sen tadi hamper sama dengan argument Barro (1996), jika munculnya kebebasan pada negara-negara otoriter akan menghidupkan ekonomi, maka tingkat demokrasi tercapai, pertumbuhan ekonomi di beberapa negara otoriter itu alami kemunduran. pada era demokrasi ini, mulai ada permintaan tambahan pembelanjaan kesejahteraan sosial dari rakyat, sedangkan negara otoriter pada umumnya tidak mempunyai mekanisme demokratis dalam mengatur aspirasi tersebut.

Beberapa studi empiris lain, terutama oleh para ekonom, memberi kesimpulan jika demokrasibukanlah penentu utama prestasi

ekonomi (Barro, 1999; Boediono, 2008). berdasarkan pandangan para ahli ini, terutama bagi beberapa negara yang memiliki penghasilan rendah, kinerja ekonomi lebih ditentukan oleh aturan hukum daripada demokrasisemata. Jika kesimpulan ini benar, maka beberapa negara yang memiliki penghasilan rendah bisa memacu pertumbuhan ekonominya, walaupun mereka belum siap untuk menerapkan demokrasi, asalkan mereka bisa memperbaiki aturan hukum (rule of law).

Oleh sebab itu, masih harus mencari bukti empiris bagaimana sebenarnya hubungsn antarabentuk rezim pemerintahan (otoriter vs demokrasi) terhadap kinerja ekonomi (contohnya, pertumbuhan ekonomi). Pada dinamika demokrasi di Indonesia, mekanisme multipartai adalah salah satu cara dalam mengatur aspirasi. mekanisme ini pun telah didukung UU No. 22 Tahun 1999 perihal Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 mengenai PerimbanganKeuangan Antara pusat dan wilayah. Pilkada secara langsung juga ikut mendukung mekanisme demokrasi terutama pada tingkat daerah sesudah disahkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

Perekonomian daerah setelah otonomi daerah memberi keleluasaan untuk para pembuat kebijakan diwilayah tersebut dalam mengelola keuangannya sendiri dengan diawasi oleh anggota legislatif di daerah. Badan legislatif daerah yang terdiri dari macam-macam unsur partai politik ini mempunyai peranan penting dalam pembuatan kebijakan pemerintah di daerah. tapi, sejauh mana akibat dari dinamika multipartai yang terlihat pada kekuatan pemerintah daerah dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut masih belum jelas.

Catur Sugianto (2013: 120) berpendapat bahwa semakin terkonsentrasi serta semakin kuat anggota parlemen dalam suatu partai politik tertentu menguasai parlemen, memberi pengaruh pada alokasi anggaran sampai pada akhirnya memberi pengaruh negatif pada pertumbuhan ekonomi di wilayah. fenomena tersebut memberi informasi jika terkonsentrasinya parlemen di suatu partai politik tertentu dapat memengaruhi bagaimana alokasi anggaran daerah atau APBD. Alokasi yang cuma memperhatikan konstituen partai politik

yang menguasai parlemen pada suatu daerah saja dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi wilayah yang rendah. untuk wilayah yang perekenomiannya tergantung sekali pada APBD, maka konsentrasi partai politik di parlemen dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Oleh sebab itu, mekanisme alokasi anggaran yang cenderung menuruti kehendak parlemen perlu dihindari. Perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan pusat serta manajemen pembangunan regional yang baik, kemungkinan mampu mengurangi dampak negatif dari konsentrasi tersebut. Desentralisasi fiskal memberi keleluasaan untuk daerah agar dapat mengatur pengeluaran serta penerimaan daerah, memberikan dampak yang positif pada pertumbuhan ekonomi daerah. kenyataan ini sejalan dengan ruh otonomi yang memberi kemungkinan yang paling besar pada daerah dalam memilih prioritas pembangunan daerahnya. sehingga, pertumbuhan ekonomi daerah jadi terpacu.

Kunci pertumbuhan ekonomi daerah yang lainnya adalah kualitas SDM. Kualitas SDM yang bagus menghasilkan proses produksi menjadi efektif, yang nantinya tenaga kerja efektif ini mendorong pertumbuhan ekonomi pada daerah.

## I. Peran Partai Politik dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

Kegiatan partai politik bukan hanya menjelang saat pemilihan umum saja, tetapi partai politik juga mempunyai kewajiban dalam melakukan aktivitas pemberdayaan konstituen partai juga masyarakat umum. Kinerja politik dalam suatu partai harus diimbangi oleh peningkatankualitas hidup masyarakatnya. Tujuan yang ingin dicapai adalah rakyat desa bisa mandiri secara sosial, juga ekonomi.

Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang menyertakan semua lapisan masyarakat pada proses pembangunan. Sistem ekonomi kerakyatan mencakup administrasi pembangunan nasional yang mulai dari sistem perencanaan sampai pemantauan serta pelaporan. Sesungguhnya ekonomi kerakyatan ialah demokrasi ekonomi yang dikembangkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 terutama Pasal 33 dan penjelasannya yang menyatakan bahwa “dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi

ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota- anggota masyarakat". Yang diutamakan adalah kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran perorangan.

Oleh karena itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama sesuai dengan asas kekeluargaan. menurut Swasono, jika pemberdayaan ekonomi kerakyatan mengandung arti pembangunan ekonomi sebagian besar masyarakat di Indonesia sebagai agenda utama pembangunan nasional, jadi langkah- langkah yang nyata perlu diupayakan supaya pertumbuhan ekonomi masyarakat berlangsung secara cepat. Adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat diharapkanbisa meningkatkan kehidupan rakyat menuju arah kehidupan yang lebih baik.

Menurut Goulet, kehidupan yang lebih baik pada dasarnya meliputi: kebutuhan hidup, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan kebebasan. oleh sebab itu, pakar ekonomi mengemukakan jika target pemberdayaan ekonomi masyarakat yang minimal serta harus mengutamakan keperluan mutlak, syarat minimum dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar.

Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan berdiri tahun 2017 adalah program dari DPD Partai Perjuangan Demokrasi Indonesia Sumatera Utara. Badan Ekonomi Kerakyatan disebut juga "Sekolah Lapang". BPEK ini dibuat untuk tujuan dalam memperjuangkan perekonomian kaumMarhaen atau wong cilik yang menjadi roh dari partai tersebut. dalam rangka semangat serta komitmen itu, PDIP lewat Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (BPEK) bisa membantu masyarakat yang kecil seperti petani serta peternak agar bisa meningkatkan kehidupan mereka, jadi sebagai partai bisa memperlihatkan wajah yang berpihak pada masyarakat.

Inilah fungsi dari partai PDI perjuangan, yang melalui Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, dapat melakukan perkerjaan yang berhubungan dengan ekonomi kerakyatan. Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan ini didirikan oleh PDIP sebab adanya perhatian partai pada masyarakat yang berpendapatan kecil khususnya peternak serta petani. Maka dari itu, dengan Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan ini melaliu program operasional

yang nyata serta bisa merangsang aktivitas ekonomi produktif sekaligusmemupuk jiwa kewirausahaan serta mengajari masyarakat kecil agar bisa meningkatkan penghasilan mereka.

BPEK ini terbuka bagi umum dan disana semuanya saling membutuhkan satu sama lain atausimbiosis mutualisme yaitu antara pertanian, peternakan serta perikanan. PDIP juga mempunyai kendala dalam mendirikan BPEK, diantaranya kesadaran dari kader-kader partai politik sendiri yang tidak setinggi perkiraan, pentingnya melihat petani serta peternak menjadi orangkaya itu belum ada di pikiran orang-orang.

Peran serta strategi PDIP pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan yaitu:

Menjadi wadah

Peran menjadi wadah yang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia perjuangan pada Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan adalah agar meningatnya perekonomian petani serta peternak. dalam menjalankankan perannya menjadi wadah, BPEK ini mencarijuga yang terbaik bagi rakyat serta tidak merugikan pemerintah. Badan Pemberdayaan ini adalah wadah untuk belajar terutama untuk petani-petani serta peternak-peternak, seperti halnya mengajarkan beberapa konsep tentang pertanian serta memanfaatkan limbah dari sisa-sisa produksi yang berasal BUMN serta beberapa pabrik swasta yang dijual murah atau bahkan diberikan langsung pada masyarakat.

Menjadi penghubung

PDIP berperan menjadi penghubung antara masyarakatkecil dengan pemilik modal maupun pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. pada perspektif kelembagaan, parpol merupakan penghubung mata rantai antara masyarakat serta pemerintah. Partai politik adalah jembatan antara warga negara dengan pemerintah.

PDIP melalui BPEK berperan menjadi penghubung karena partai mempunyai akses berkomunikasi dengan pemerintah supaya masyarakat menerima kemudahan untuk menjual hasil tani yang mereka punya serta berperan jugadalam memberi pelajaran kepada masyarakat tentang bagaimana cara meningkatkan hasil produksi petani supaya mempunyai daya saing pada kuantitas serta kualitas.

Maka, dapat meningkatkan perindustrian serta mengurangi impor dari luar negeri,yang kemudian bisa berdampak pada tingkat pengangguran karena saat warga bisa mereformasi cara berfikir mereka tentang pertanian,nantinya bisa mengurangi pengangguran.

# BAB VII
# PERANAN PARTAI POLITIK DALAM PENDIDIKAN

## A. Pendidikan di Indonesia

Pendidikan ialah suatu sistem serta tata cara meningkatkan kualitas hidup seseorang di dalam aspek kehidupannya di dunia. Dalam pembentukan suatu bangsa, pendidikan menjadi nilai penting untuk dimasa mendatang. Pendidikan juga berpengaruh dalam keberlangsungan kehidupannya seseorang, di dalam pendidikan seseorang dituntun untuk menjadi *how to be* atau menjadi seseorang yang impiannya akan terwujud. Menurut Hanson dan Brembeck dalam Hadiyanto (2004:29) mengatakan bahwa pendidikan juga menjadi bagian investasi seseorang dalam melakukan pengembangannya demi menjalankan pertumbuhan ekonomi.

Aturan yang baku dalam pendidikan harus dimiliki agar pendidikan mempunyai arah tujuan yang jelas untuk kedepannya. Pendidikan dijalankan dengan tujuan untuk suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Proses tersebut tentunya membutuhkan tenaga pendidik yang mengarahkan memberi keteladanan, mengembangkan kemauan dan kreativitas peserta didik, memberikan pelajaran baik yang bersifat akademik maupun non akademik.

Pembelajaran dalam suatu pendidikan ialah proses interaksi antara tenaga pendidik dengan peserta didik di lingkungan belajar. Proses pembelajaran perlu dibuat rencana, dilaksanakan, dinilai serta diawasi agar proses pembelajaran di suatu pendidikan berjalan efektif dan efisien. Pendikan melalui proses pembelajaran yang berkualitas juga akan menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten. Upaya peningkatan pendidikan tidak dapat dipandang sebelah mata demi menciptakan generasi yang bisa bersaing di Indonesia maupun di Dunia. Beberapa orang mengatakan bahwa sumber daya manusia di Indonesia terbilang yang memiliki kualitas rendah untuk ikut bersaing di dunia.

Kemajuan dalam sektor pendikan pada suatu bangsa nantinya akan menentukan kemajuan pada sektor lainnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pendidikan yang melakukan pembelajaran berkualitas maupun memberikan keterampilan keterampilan yang baik

sehingga menjadi modal dalam peningkatan pendidikan khususnya di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa: "Sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sedemikian rupa supaya peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif supaya memiliki pengendalian diri, kecerdasan, keterampilan dalam bermasyarakat, kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian serta akhlak mulia. Pendidikan merupakan suatu proses yang bermakna untuk membangun masyarakat".

Pendidikan bukan hanya yang bersifat normal dilakukan dalam suatu sekolah maupun universitas, namun pendidikan juga dapat dimulai dari ruang lingkup kecil, yaitu keluarga. Pendidikan di dalam keluarga mengajarkan bagaimana untuk menjadi seseorang yang memiliki sifat sopan dan santun baik ke sesama maupun ke yang lebih tua, disiplin dalam melakukan kegiatan sehari-hari serta saling membantu atau peduli ke sesama. Menurut Dewantara dalam Sujana (2019:29) menyebutkan ada beberapa hal dalam pendidikan yang harus digunakan yaitu *ngerti-ngroso-ngelakoni* (menyadari, menginsyafi, serta melakukan). Hal tersebut juga sesuai dengan ungkapan orang-orang yang berasal dari suku sunda di Jawa Barat bahwa pendidikan harus sesuai dengan keselarasan yaitu *tekad-ucap-lampah* (niat, ucapan dan pembuatan).

**1. Fungsi Pendidikan**

Fungsi dan tujuan pendidikan terbagi menjadi beberapa macam, menurut Sujana (2019:30) ada 3 macam fungsi pendidikan, yaitu:

a. Fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional

Fungsi pendidikan di Indonesia telah diatur dalam suatu peraturan yaitu Undang-Undang No. 20 Tahus 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Di dalam peraturan tersebut terdapat beberapa hal yang bersangkutan dengan pendidikan diantaranya pengertian pendidikan, jenis-jenis pendidikan, standar pendidikan dan lain-lain. Pada pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 berisi bahwa "Pendidikan nasional berfungsi dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa agar berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab serta demokratis. Dari pernyataan tersebut bahwa fungsi pendidikan khususnya di Indonesia mengutamakan pembangunan sikap, karakter dan transformasi nilai-nilai filosofis negara Indonesia yang tujuannya untuk meningkatkan nasionalisme seseorang dan mampu bersaing di ruang lingkup dunia.

**b.** Fungsi dan tujuan Pendidikan Masyarakat

Berkembangnya masyarakat menurut Idi (2014:60) dipengaruhi dari sektor/bidang pendidikan yang mempersiapkan sumber daya manusia sesuai dengan perkembangan zaman namun tidak lepas dari undang-undang yang berlaku. Menurut Idi (2001:32) Fungsi pendidikan masyarakat terbagi menjadi enam macam, yakni:

c. Fungsi dan tujuan pendidikan sebagai sosialisasi

Kehidupan yang saat ini sedang berlangsung tentunya berbeda dengan kehidupan yang telah lalu. Saat ini untuk menempuh pendidikan tentunya dilakukan melalui lembaga pendidikan yang ada yaitu sekolah dan lain sebagainya. Namun pendidikan zaman dulu dilakukan oleh generasi bangsa melalui peniruan dengan cara melihat, mengamati dan mempraktekan yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Hal tersebut menjadi fungsi pendidikan sebagai sosialisasi dimana orang-orang sebelumnya melakukan sosialisasi secara tidak langsung ditiru oleh orang-orang selanjutnya yang melihat serta mengamatinya.

d. Fungsi dan tujuan pendidikan sebagai kontrol sosial

Melalui pendidikan yang dimiliki, setiap individu akan berupaya untuk menerapkan nilai-nilai yang didapatkan didalam kehidupan sehari-harinya yaitu di ruang lingkup masyarakat. Individu yang menempuh pendidikan di lembaga pendidikan sekolah apabila telah berada di suatu lingkungan maka menjadi bagian dari masyarakat dimana bisa mendukung dan berusaha mempertahankan tatanan sosial yang akhirnya nanti menjadi kontrol sosial di lingkungan tersebut.

e. Fungsi dan tujuan pendidikan sebagai pelestari budaya

Budaya di Indonesia memiliki beraneka ragam, dan pendidikan

menjadi peran penting dalam melestarikan budaya dan mempertahankannnya. Contohnya bahasa daerah, seni, budi pekerti dan lain sebagainya. Lembaga sekolah menjadi fungsi dalam menjaga nilai-nilai budaya daerah diantaranya sekolah dijadikan masyarakat dalam mempertahankan budaya tradisional dan sekolah mempunyai tugas untuk mempertahankan nilai budaya serta menyatukan nilai yang beraneka ragam menjadi satu kesatuan.

f. Fungsi dan tujuan pendidikan sebagai seleksi

Kedepannya seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan nya akan mencari pekerjaan maupun membuka pekerjaan. Hal tersebut menjadi kebutuhan dalam tenaga kerja dimana adanya proses seleksi, pelatihan, dan lain sebagainya. Selain dalam pekerjaan, lembaga sekolah juga mempunyai fungsi dalam seleksi ini contohnya untuk calon peserta didik yang akan masuk ke sekolah tersebut akan diseleksi berdasarkan nilai tes atau umur sesuai yang berlaku.

g. Fungsi dan tujuan pendidikan sebagai perubahan sosial

Selain memiliki fungsi sebagai seleksi, pendidikan juga memiliki fungsi sebagai perubahan sosial, diantaranya melakukan reproduksi budaya. Maksudnya ialah di dalam pendidikan peserta didik akan diajarkan dengan kebiasaan baru sesuai perkembangan zaman sehingga merubah kebiasaan lamanya menjadi lebih modern contohnya ekonomi, kemandirian, kompetensi dan lain sebagainya. Kedua ialah pendidikan sebagai defusi budaya. Sekolah mempunyai peran untuk memperkenakan budaya-budaya yang ada sehingga nantinya peserta didik akan mudah bergaul di kalangan masyarakat.

h. Fungsi dan tujuan pendidikan sebagai partner masyarakat

Lembaga pendidikan yaitu sekolah tentunya saling berkaitan dengan masyarakat. Dapat dilihat bersama dari kelima macam diatas fungsi pendidikan tersebut yang akhirnya selalu tertuju dengan kerjasama antara pendidikan dengan masyarakat. Hal ini tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan, sekolah menjadi dasar utama peserta didik untuk belajar cara bermasyarakat dan masyarakat pun tentunya membutuhkan pendidikan untuk

meningkatkan kualitas nya demi menjadi individu yang berkualitas berguna baik diri pribadi, masyarakat maupun negaranya.

i. Fungsi dan Tujuan Pendidikan bagi Pemerintah

Pendidikan berfungsi untuk melakukan penyelarasan dan proses pembentukan bangsa dimana hal tersebut juga menjadi program utama pemerintah agar menjadi bangsa yang maju kedepannya. Apabila sumber daya yang dimiliki kompeten khususnya dalam pendidikan maka bangsa tersebut juga mampu untuk bersaing dilingkup internasional. Maka pendidikan juga digunakan sebagai motor dalam berbagai kepentingan mulai dari politik hingga kepentingan sosial. Banyak dari pejabat yang akan mencalonkan dirinya untuk menduduki suatu jabatan menjadikan pendidikan sebagai wacana atau kepentingan utama yang dijadikan modal untuk mendapatkan suara dari masyarakat contohnya adanya program pendidikan gratis wajib selama 6 tahun dan lain sebagainya. Akan teteapi tidak banyak juga pejabat yang berhasil mendapatkan suara dari masyarakat lalu mengabaikan dan lupa terhadap janji nya yang telah di suarakan sebelumnya. Fungsi dan tujuan pendidikan bagi pemerintah selain itu ialah mempersiapkan generasi bangsa untuk menciptakan generasi yang unggul dan kompetitif, diantaranya:

a. Menciptakan generasi penerus bangsa

Tujuan dari adanya pendidikan bagi pemerintah ialah agar menciptakan generasi yang ahli atau mampu dalam segala bidang. Hal ini ditunjang dengan adanya berbagai ketersediaan pendidikan kejuruan yang ada yang diharapkan akan menghasilkan generasi muda yang berguna bagi banyak orang.

b. Pendidikan sebagai alat untuk mengukur kepedulian terhadap generasi bangsa

Sesuai dengan adanya peraturan perundang-undangan No. 20 Tahun 2003 ayat 6 berisi tentang masyarakat mempunyai tanggung jawab atas pelaksanaan di Indonesia. Adanya kontribusi dari masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pendidikan diharapkan masyarakat sadar akan pentingnya

untuk mengembangkan dan memelihara generasi bangsa untuk siap dalam perubahan sosial kedepannya. Selain itu adanya kesadaran masyarakat dalam pendidikan juga mempermudah lembaga pendidikan untuk mendapatkan generasi yang unggul dan intelektual.

c. Sebagai alat transformasi nilai

Pendidikan bukan hanya mengenai pengasahan kepintaran saja tetapi juga pendidikan harus menekankan nilai, norma, dan budaya masyarakat dimana hal ini selaras dengan adanya peraturan UU No.20 Tahun 2003 ayat 4. Adanya norma serta nilai yang dimiliki peserta didik nantinya akan berpengaruh dalam terjun di masyarakat, maka lembaga pendidikan menjadi peran penting dalam mempertahankan nilai norma dan budaya masyarakat yang ada.

d. Memberikan informasi dan pemahaman

Meningkatkan pemahaman serta memberikan informasi merupakan tujuan utama dari jalannya pendidikan kepada peserta didik. Peserta didik wajib mendapatkan apa yang harus didapatkan dalam pendidikannya sehingga tidak menyebabkan ketertinggalan perkembangan zaman.

e. Mencegah tindak kejahatan

Pemberian informasi dan pemahaman ke peserta didik akan berdampak bahwa hal tersebut boleh atau tidaknya dilakukan. Hal ini berpengaruh dalam tingkat tindak kejahatan, apabila peserta didik mendaptkan informasi dan pemahaman yang baik maka angka tindak kejahatan akan rendah.

f. Membentuk karakter bangsa

Membentuk karakter bangsa juga menjadi tujuan dari adanya pendidikan sehingga dari terbentuknya karakter bangsa yang baik nantinya juga akan berpengaruh terhadap kemajuan bangsa itu sendiri.

**2. Peran Partai Politik dalam Pendidikan**

Menurut Sarnoto (2012:30) mengartikan dasar pendidikan merupakan cita-cita kemanusiaan universal. Maksudnya ialah pendidikan saat ini telah menjadi cita-cita oleh semua manusia yang

memiliki keingin menjadi lebih maju kedepannya. Budaya politik seseorang itu berbanding lurus dengan tingkat pendidikan seseorang. Makin tingginya pendidikan yang ditempuh maka seseorang tersebut dapat kesempatan untuk membaca, membandingkan, mengevaluasi serta mengkritisi realita politik. Kunci dari pendidikan politik masyarakat ada pada politik pendidikan masyarakat.

Politik pendidikan yang diharapkan ialah politik pendidikan bagi rakyat kecil atau tidak mampu. Karena saat ini masih banyak orang tua yang tidak memberikan pendidikan yang layak untuk anaknya karena keterbatasan ekonomi. Namun juga di daerah masih banyak fasilitas pendidikan di sekolah belum memadai bahkan tidak memiliki gedung yang representatif atau ruang belajar yang nyaman. Selain fasilitas pendidikan, tenaga pendidik yang honorer yang dibayar sangat rendah hal ini juga menjadi bagian penyebab rendahnya motivasi untuk mengajar sehingga ada beberapa sekolah yang kekurangan tenaga pendidik.

Melihat keadaan realita yang terjadi khususnya di Indonesia seperti itu rasanya kemungkinan kecil Indonesia untuk menjadi negara yang maju terutama dalam bidang pendidikan. Dari pendidikan yang rendah, juga menjadi faktor dalam sektor politik dimana dengan keterbatasan pendidikan yang ada akan menyebabkan agenda pendidikan politik berjalan tidak lancar dari yang diharapkannya. Peran politik pendidikan untuk memberikan kesempatan yang luas kepada seluruh masyarakat untuk dapat belajar serta menjalankan pendidikan tanpa ada nya diskriminatif dan lain sebagainya.

Politik berasal dari kata *politic* yang asal katanya diambil dari bahasa Inggris yang artinya menunjukkan sikap pribadi atau perbuatan. Kata politik juga diambil dari bahasa Latin yaitu *politicus* yang memiliki arti kota. Dalam bahasa Indonesia politik ialah segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan di suatu negara atau terhadap negara lain. Menurut Noer (1982:11-12) mengartikan politik merupakan segala aktifitas atau sikap yang berhubungan dengan adanya kekuasaan untuk mempertahankan, mempengaruhi suatu bentuk macam masyarakat. Hal ini dapat dimaknai bahwa politik tidak hanya sebatas kegiatan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan atau kebijakan umum, tetapi politik juga mencakup kegiatan

yang bertujuan mengadakan perubahan struktur masyarakat contohnya seperti pergeseran kekuasaan politik.

Sejarah perkembangan partai politik di Indonesia berpengaruh dengan adanya perkembangan demokrasi di Indonesia. Awal dari lahirnya partai politik dari adanya keinginan merdeka dan mempertahankan kemerdekaan serta mengisi pembangunan partai politik menjadi wadah aspirasi masyarakat yang mempunyai keinginan untuk bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak muncul nya partai politik diharapkan dapat memberikan kesempatan masyarakat untuk menyalurkan pendapat serta aspirasinya dalam memperjuangkan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Sistem politik di Indonesia menjadikan partai politik sebagai pilar utama penyangga demokrasi, maksudnya ialah tidak ada demokrasi jika tidak ada partai politik. Pada Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang partai politik menyebutkan bahwa "Partai politik ialah organisasi politik yang dibentuk sekelompok warga negara Republik Indonesia atas dasar sukarela dan persamaan kehendak demi memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum". Masyarakat menganggap bahwa saat ini politik itu kotor, akan tetapi menurut Undang No. 31 Tahun 2002 bahwa politik merupakan sebuah cara dan strategi untuk mencapai tujuan, selama tujuan tersebut yang akan dicapai menghasilkan yang baik dan dengan cara yang baik maka tidak ada alasan untuk mengatakan politik itu kotor.

Keadaan realita yang ada memperlihatkan bahwa politik saat ini masih ada oknum-oknum yang membuat politik menjadi kotor dan tidak memiliki tujuan untuk berpihak kepada rakyat. Contohnya ialah *money politics* yang semakin merajalela, penggunaan kekuasaan untuk mengendalikan pemilih agar memilihnya di saat pemilihan umum berlangsung. Hal tersebut yang menyebabkan anggapan rakyat bahwa politik itu kotor. Partai Politik melalui pendidikan politik memiliki peran dan nilai strategis dalam pembangunan karakter bangsa karena semua partai politik memiliki dasar yang mengarah pada terwujudnya upaya demokratisasi yang bermartabat.

Adanya partai politik tentunya memiliki fungsi dalam negara tersebut, apabila fungsi partai politik tersebut berjalan dengan

semestinya maka tidak ada lagi keadaan yang menimbulkan konflik, kecurangan maupun pembodohan kepada masyarakat. Jumlah partai politik yang banyak akan menjadi percuma apabila fungsi partai politik tidak dijalankan. Menurut Sitepu (2016:2) partai politik memiliki fungsi diantaranya fungsi edukasi, fungsi agregasi dan fungsi artikulasi. Selain itu secara umum, partai politik mempunyai fungsi diantaranya:

a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat banyak agar menjadi warga negara yang sadar terhadap hak dan kewajibannya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
b. Penciptaan iklim (suasana) yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa demi kesejahteraan masyarakat.
c. Penyerap, penghimpun, perantara/penyalur aspirasi politik yang disampaikan oleh masyarakat untuk kemajuan negaranya.
d. Partisipasi warga negara Indonesia.
e. Rekrutmen politik dan proses pengisian jabatan melalui proses demokrasi yang memperhatikan kesetaraan serta keadilan.

Selain mempunyai fungsi nya, partai politik juga mempunyai tujuan umum berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 yaitu:

a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sesuai yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Menjaga dan memelihara kebutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan khusus partai politik terbagi menjadi 3 macam, yaitu:

a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
b. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

c. Membangun etika budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Peranan merupakan berasal dari kata “peran” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:667) memiliki arti yaitu seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki seseorang yang berkedudukan dimasyarakat kemudian peranan merupakan bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Peranan juga menjadi bagian dari sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai ketepatan waktu.

Kegiatan seseorang di dalam partai politik merupakan bagian dari suatu bentuk pasrtisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui nama seseorang. Peran masyarakat juga menjadi berpengaruh dalam perbaikan mekanisme penyelenggaraan negara. Kejadian persaingan dalam memenangkan suatu jabatan telah menjadi hal biasa di dalam partai politik. Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat ialah hal yang biasa. Jika perbedaan tersebut mengakibatkan konflik maka politik berusaha dalam mengatasinya. Menurut Sukarna (1994:84) menyebutkan bahwa pendidikan politik ialah suatu syarat yang mutlak mengingat dalam pendidikan politik mendidik dan memberikan pemaham terhadap kesadaran berbangsa dan bernegara.

Partai politik di negara-negara yang belum merdeka telah mengutamakan pendidikan politik agar anggota-anggota partai politik dapat mempunyai kader yang kompeten untuk mewujudkan negara nya dalam memerdekakannya. Akan tetapi jika negara nya telah merdeka, pendidikan politik juga harus tetap dilakukan agar kemerdekaan yang telah diraih tidak hilang maupun dijajah kembali dengan cara penjajahan yang tidak diketahui secara sadar.

Berbeda pendapat dengan Sukarna, pendidikan politik menurut Alfian dalam Kartono (2000:97) menjelaskan bahwa usaha sadar dalam mengubah proses pendidikan politik masyarakat sehingga dapat dipahami dan dihayati nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal. Hasil dari penghayatan nantinya jadi melahirkan sikap serta tingkah laku politik baru.

Politik bukan monopoli seorang pemimpin, politik ialah milik kebersamaan bagi setiap warga negara. Adanya kemunculan

pendidikan politik akan menambah wawasan politik terkait peristiwa yang terjadi didalam politik khususnya. Selain partai politik yang mempunyai tujuan, didalam pendidikan politik juga mempunyai beberapa tujuan, diantaranya:

a. Membentuk kepribadian politik
   Pembentukan kepribadian politik ini dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung, contoh dari langsung nya ialah memberikan pengajaran langsung tentang perpolitikan dan untuk contoh yang tidak langsung dengan cara adanya pelatihan-pelatihan serta sosialisasi.
b. Adanya kesadaran politik
   Menumbuhkan adanya kesadaran politik dilakukan dengan cara dialog dan pengajaran instruktif.
c. Meningkatkan partisipasi politik
   Adanya partisipasi politik diawali dengan adanya keikutsertaaan individu yang secara sukarela ikut dalam kehidupan politik masyarakatnya. Contoh dasar dari politik di dalam masyarakat ialah keluarga dan sekolah.

Pendidikan politik masyarakat ialah rangkaian usaha dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang. Partai politik tentunya memiliki peran yang penting dalam jalannya proses pendidikan politik. Masyarakat wajib mendapatkan pendidikan politik yang diselenggarakan oleh partai politik. Pendidikan politik disini bukan mengartikan proses berpihak dengan partai politik tersebut ketika adanya mobilisasi atau kegiatan partai politik tersebut untuk mendapatkan suara.

Kaderisasi merupakan bagian dari dampak adanya pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik, beda halnya antara kaderisasi dengan kampanye. Kaderisasi berasal dari orang-orang yang telah menjadi anggota di suatu partai tersebut. Kaderisasi dilakukan guna menyiapkan generasi/sumber daya manusia yang mampu membangun negara nya menjadi lebih baik untuk masa depan. Adanya kaderisasi juga agar semua partai politik dapat menjalankan serta melakukan fungsinya di dalam suatu negara. Hasil dari kaderisasi inilah yang disebut sebagai kader-kader yang akan menjalankan tugas-tugas badan negara. Kader dari partai politik harus

mempunyai wawasan luas khususnya dalam Ilmu Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan Keamanan Nasional. Jika tidak adanya wawasan yang dimiliki oleh para kader yang melakukan pendidikan politik di partai nya tersebut maka nantinya akan menyebabkan kegagalan dalam membangun serta mengendalikan negara.

Dari pendidikan politik yang dilakukan partai politik akan menghasilkan dampak yang postif apabila dalam pendidikan politik tersebut dilakukan secara baik. Menurut Siddiqi (1987:133-138) ada nilai-nilai pendidikan politik dalam Islam diantaranya:

a. Persaudaraan

Dalam islam persaudaraan terbagi dari beberapa macam, yaitu ukhuwah basyariyah dan ukhuwah Islamiyah. Proses jalannya pendidikan politik pastinya kita akan bertemu serta mengenal orang banyak. Mereka berasal dari agama, suku, kebudayaan serta kepercayaan yang berbeda-beda.

b. Persamaan

Pendidikan politik memberikan pengajaran serta pemahaman kepada seluruh masyarakat yang bersifat adil, tidak ada yang dibedakan melalui status sosialnya. Sesuai yang dijelaskan didalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 13:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ

"*Wahai manusia! Sungguh, Kami telah Menciptakan kamu dari seorang laki laki dan seorang perempuan, kemudian Kami Jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti*" (Q.S. Al-Hujurat: 13).

c. Kebebasan

Seseorang bebas melakukan apapun sesuai dengan kepentingannya namun tidak melanggar hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dalam pendidikan politik seseorang pun bebas dalam berpendapat dan menyampaikan aspirasinya.

d. Toleransi

Saling meghargai dan tidak memaksa orang lain merupakan wujud dari nilai islam dalam pendidikan politik. Sesuai dengan adanya firman Allah SWT yaitu:

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ - ٦

"Untukmu agamamu, dan untukku lah agamaku" (Q.S. Al Kafirun: 6).

e. Keberagaman

Setiap manusia mempunyai keberagamannya masing-masing akan tetapi didalam Islam dianjurkan untuk tidak membedakan perbedaan seseorang dalam saling mengenalnya. Hal ini telah dijelaskan didalam Surat Al-Hujurat ayat 13.

f. Tolong Menolong

Manusia merupakan makhluk sosial dimana makhluk sosial tidak bisa hidup dengan sendirinya, perlu mendapatkan bantuan dari sesama. Allah menganjurkan dan memerintahkan umatnya untuk saling tolong menolong dan bekerja sama sesuai dengan firman Nya dalam surat Al Maidah ayat 2:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَاۤىِٕرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَاۤىِٕدَ وَلَآ اٰۤمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗوَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗوَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۘوَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖوَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖوَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ - ٢

"*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah*

*sangat berat siksaan-Nya*" (Q.S. Al Maidah: 2).

g. Musyawarah

Setiap pengambilan keputusan dalam Islam dianjurkan untuk melakukan musyawarah atau berdiskusi untuk mencapai tujuan akhir yang tidak memihak satu sama lain. Sebagai negara yang demokratis, hal ini selaras dengan adanya nilai pendidikan politik dalam Islam. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ
لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ - ١٥٩

"*Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal*" (Q.S Ali Imran: 159).

h. Keadilan

Menempatkan sesuatun dengan adil dan sesuai hokum merupakan penjelasan dari keadilan. Hukum dijalankan dengan adil dan tidak memihak, hal ini diajarkan dalam pendidikan politik untuk bisa sesuai dengan aturan/hukum yang berlaku. Sesuai dengan firman Allah SWT yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ - ٨

"*Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan*" (Q.S Al Maidah: 8).

Peranan partai politik dalam menyalurkan pendapat yang di aspirasikan oleh rakyat dapat diatur dengan baik agar anggapan dari masyarakat pada partai politik yang tidak mau menyalurkan aspirasi rakyat nya menjadi berkurang. Pembangunan karakter bangsa merupakan tantangan masa depan untuk bangsa dimana khususnya partai politik yang menjadi tanggung jawab dalam merumuskan, menjalankan serta mengevaluasi jalannya pendidikan politik.

Anggapan masyarakat saat ini apabila partai politik yang telah menduduki jabatan pada anggota dewan biasanya lupa akan hal tugas dan perannya dalam pendidikan politik, maka dari itu sebaiknya partai politik untuk lebih fokus dalam menjalankan perannya serta memfokuskan pada hal partai khususnya menghasilkan kader-kader untuk kemajuan bangsa kedepannya.

Partai politik mengemban tugas yang mulia jika melakukan pendidikan politik terutama kepada masyarakat. Pendidikan politik dianggap sebagai pendidikan kebangsaan, yakni pendidikan yang mampu membangkitkan semangat kebangsaan, memperkuat ideologis dan dapat membentuk perilaku warga bangsa sesuai ideologi bangsa. Menyiapkan kader-kader yang kompeten tentunya juga harus mempunyai fasilitas yang memadai, salah satu nya ialah partai politik bisa membangun dan mendirikan sekolah kebangsaan hal ini akan jadi memberikan yang terbaik kepada rakyat dan bangsa. Hal ini dapat dijadikan juga menjadi sarana pendidikan politik yang strategis serta suasana politik yang kondusif.

Pilar demokrasi merupakan bagian dari partai politik dimana pentingnya peran partai politik dan sudah seharusnya untuk mampu menjamin demokratis yang sehat dan efektif. Tingginya angka partisipasi politik oleh masyarakat tentunya tidak lepas dari peran partai politik dalam menjalankan tugas fungsi nya terutama pada pendidikan politik. Dari fenomena yang muncul tidak sedikit dari masyarakat saat ini masih banyak yang belum memahami serta mengetahui hak dan kewajibannya dalam bidang politik. Masyarakat saat ini umumnya hanya dijadikan partai politik sebagai objek untuk mendapatkan suara. Sebagaimana aturan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 pasal 11 angka (1) huruf a bahwa partai politik harus menjalankan fungsinya secara konstitusional dengan

memberikan pendidikan yang layak bagi anggota masyarakat luas.

Penulis mengambil contoh dari salah satu partai politik yang telah melaksanakan perannya untuk memberikan pendidikan partai politik yaitu dari penelitian yang dilakukan oleh Afriansyah (2021:76) bahwa Partai Keadilan Sejahtera melakukan pendidikan politik di kalangan masyarakat Kota Padangsidimpuan. Partai Keadilan Sejahtera melakukan pendidikan politik nya dengan cara melakukan perekrutan kader partai, melakukan kajian pekanan dengan para kader PKS, membuat artikel di jejaring sosial.

## DAFTAR PUSTAKA


___ , Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta, Konpress, 2005.

____ , Pengantar IImu Hukum Tata Negara Jilid I, Jakarta, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.

A.H. (1987). *Studies In Islamic History*. Jakarta: Al-Ma'arif.

Abul Bari Azed dan`Makmur Amir. 2005, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta ; Pusat Studi Hukum tata Negara.

Afriansyah, A. (2021). *Peran Partai Keadilan Sejahtera Pada Pelaksanaan Pendidikan Politik Masyarakat Muslim Kota Padangsidimpuan.* Padangsidimpuan: IAIN Padangsidimpuan.

Afriansyah, A. *Peran Partai Keadilan Sejahtera Pada Pelaksanaan Pendidikan Politik Masyarakat Muslim Kota Padangsidimpuan*. Padangsidimpuan: IAIN Padangsidimpuan.

Ahmad Azizi, Qodri. 2003. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Kehidupan Berdemokrasi Di Indonesia. Jakarta: Lemhannas.

Alesina, A., Spolaore, E., & Wacziarg, R. (1997). Economic Integration and Political Disintegration. NBER Working Papers, 6163. National Bureau of Economic Research

Allesina, A. & Drazen, A. (1991). Why are Stabilizations Delayed? American EconomicReview, 81 (5), 1170-1188.

Anggara, S. (2013). *Sistem Politik Indonesia.* Bandung: CV Pustaka Setia.

Arianto, Henry (2004). *Peranan Partai Politik dalam Demokrasi di Indonesia*.Universitas Indonusa Esa Unggul.

Arief, Budiman. 1985. Pembangunan dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Jakarta:Rajawali,

Ariffin, M. (2019, Mei). Sejarah Konflik Partai Persatuan Pembangunan di Masa Orde Baru.*Candrasangkala : Pendidikan dan Sejarah, 5*, 12-22. Retrieved April 21, 2022, from https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Candrasangkala/article/view/6084/4286

Artis. (2012). EKSISTENSI PARTAI POLITIK DAN PEMILU LANGSUNG. *Jurnal Sosial Budaya*, 65.

Arwiyah, Muhammad Yahya. (2012). *Status Sosial Ekonomi dan Kualitas Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik*. Bandung:

Institut Telkom Indonesia.
Awad, E. M. (1979). *System Analysis and Design.* Genewa: Richard D Irwin.
Barro, R. J. (1996). Democracy and Growth. Journal of Economi Growth, 1, 1–27
Barro, R. J. (1999). Determinants of Democracy. Journal of Political Economy, 107 (S6), S158–S183.
Basalamah, F. (2018). Pengaruh Partai Politik Dalam Sistem Pemerintahan (Presidensial) Menurut Pasal 6A UUD 1945. *Lex Administratum, VI*, 81.
Bauw, Azies. (2013). Peranan Partai Politik dalam Membangun Proses Demokrasi di Indonesia (Kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik). Papua.
Budiardjo, M. (1982). Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta: Gramedia. Gaffar, Afa. (2006). Politik Indonesia. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
Budiardjo, Mariam. 1972. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Dian Rakyat. Suprihatini, Amin, *Partai Politik di Indonesia,* Klaten : Cempaka Putih, 2019. Fa'izia, Khilya, *Kekuasaan dan Politik Indonesia,* Klaten : Cempaka Putih 2016.
Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar IImu Politik, Jakalia, P.T. Gramedia, 1977.
Cornelis, Rintuh dan Miar. 2005. M.S, Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat. Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE.
Dahl, Robert a. 2001. *Perihal Demokrasi.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Ditjen PP Kemenkumham . (2022, April 21). PERAN PARTAI POLITIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU YANG ASPIRATIF DAN DEMOKRATIS. Jakarta, Jakarta, Indonesia.
Dr. Sahya Anggara, M. (2013). *Sistem Politik Indonesia.* (M. Drs. Beni Ahmad Saebani, Ed.)Bandung, Jawa Barat, Indonesia: CV Pustaka Setia. Retrieved April Rabu, 21, 2022
Edi, Suharto. 2002. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: Refika Aditama.
Eko, S. (2004). *Menuju Pemilu Transformatif.* Yogyakarta: IRE.
Emmerson, D. K. (2001). *Indonesia Beyond Soerharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat Transisi.* Jakarta: Gramedia Asia Foundation Indonesia.
Fachruddin, Fuad. 2006. *Agama dan Pendidikan Demokrasi.* Jakarta: Pustaka Alvabet.
Fadli, A. M. (2017). *Buku Ajar Sistem Politik Indonesia.* Yogyakarta:

Deepublish.
Fautanu, I. (2022). *Partai Politik Indonesia* (Vol. 2). (M. F. M. Taufiq Rahman, Ed.) Bandung, Jawa Barat, Indonesia: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati. RetrievedApril 21, 2022
Gaffar, A. (2000). *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ginting, Dian Oktaviana Br. (2019*). Peranan Partai Politik dalam PemberdayaanEkonomi Kerakyatan*. Sumatera Utara: Skripsi.
Haboddin, M. (2016). *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia.* Malang: UB Press. Haris, S. (2014). *Parta, Pemilu Era Reformasi* . Jakarta: YOI.
Hadiyanto. (2004). *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia.* Jakarta: Rineka Cipta.
Hidayat, C. (2021, November 15). Partai Politik. *Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia*,17.
Ichsan, Muhammad. 2014. *Demokrasi dan Syura: Perspektif Islam dan Barat*. Substantia,Vol 16 (1). 1-12.
Idi, A. (2014). *Pengembangan Kurikulum, Teori & Praktik.* Jakarta: Rajawali Pers.
K., K. (2000). *Hygiene Mental.* Jakarta: CV. Mandar Maju.
Kantraprawira, R. (2004). *System Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
Karim, M. R. (1995). *Pemilu Demokrasi Kompetitif* . Yogyakarta: Tiara Wacana.
Kartasasmita, Ginanjar. 1997. Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Lembaga PengabdianKepadaMasyarakat Universitas Gadjah Mada.
Labolo, Muhadam & Ilham, Teguh. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum diIndonesia.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Lee, J-H. & Hong, K. (2010). Economic Growth in Asia: Determinants and Prospects. ADB Economics Working Paper Series, 220. Asian Development Bank.
Ma'rif, Ahmad Syafi'i. 1996. *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa DemokrasiTerpimping (1959-1965).* Jakarta: Gema Insani.
MacAndrews, M. M. (1989). *Perbandingan Sistem Politik.* Yogyakarta: UGM
Mangkoesoebroto, G. (1998). Ekonomi Publik. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Mariyono, J. & Saputro, E. N. M. (2009). Political Determinants of Regional Economic Growthin Indonesia. The Asia Pacific Journal of Public Administration, 31 (1), 39–56.

Mayo, Henry & Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik.* Jakarta: Gramedia.

Meyer, Thomas. (2012). *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi:Sembilan Tesis.* Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)

Mubiina, F. A. (2019, November 17). Kedudukan Frasi di Dewan Perwakilan Rakyat PascaReformasi. *Jurnal Konstitusi*, 4 - 8. Retrieved April 21, 2022, from https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/17210/pdf

Nasional, D. P. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

Nasional, D.P. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

*Negeri Makassar*, 160-161.

Noer, D. (1982). *Pengantar ke Pemikiran Politik.* Jakarta: CV. Rajawali. Siddiqi,

Pasaribu, payerli. (2017). *Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik.*Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik. Medan.

Press.Safriani. (-). Sejarah Politik di Indonesia Masa Orde Baru dan Reformasi. *Makalah*.

Rahman, A. (n.d.). MASYUMI DALAM KONTESTASI POLITIK ORDE LAMA. *Universitas*

Rapar. 2001. *Filsafat Politik.* Jakarta: Raja Gravindo Persada.

Romli, L. (2011, November). REFORMASI PARTAI POLITIK DAN SISTEM KEPARTAIANDI INDONESIA. *2*, 202 - 210. Retrieved April 21, 2022

Rustiono, D. (2008). Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran PemerintahTerhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah. Tesis. Semarang: Universitas Dipenogoro.

Saefulloh, Eep. 2000. *Pengkhianatan Demokrasi Ala Orde Baru Cetakan 1.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Safa'at, M. A. (2019). Pembubaran Partai Politik. *Universitas Indonesia*.

Saleh, Zainal Abidin. 2008. *Demokrasi dan Partai Politik.* Jurnal Legislasi

IndonesiaVol. 5 (1). 56-80.

Schoorl, J. W. *Modernisasi Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang*, Penerjemah R.G. Soekadijo, Jakarta, PT. Gramedia, 1974.

Sitepu, E. (2016). Peranan Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Yang Berkarakter Terhadap Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Research Sains* .

Soekanto, Soerjono. 2002. Teori Peranan. Jakarta: Bumi Aksara.

Sujana, I Wayabg Song. (2019*). Fungsi dan Tujuan Pendidikan Indonesia*. JurnalPendidikan Dasar Volume 4, Nomer 1.

Sujana, I. W. (2019). Fungsi dan Tujuan Pendidikan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dasar*.

Sulaeman, Affan. 2015. *Demokrasi, Partai Politik, dan Pemilihan Kepala Daerah.* Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 1 (1). 12-24.

Sumidiningrat, Gunawan. 1999. Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial.Jakarta : Gramedia.

Sumodiningrat, Gunawan. 2002. Memberdayakan Masyarakat . Jakarta: Perencana kencanaNusadwina.

Sunggono, Bambang. 1992. Partai Politik Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia.Surabaya: PT Bina Ilmu.

Tahany Naggar. Laissez Faire Adam Smith's. The American Economist, Vol. 21, No. 2 (1977),p. 35-39

Undang-undang No. 2 Tahun 2008.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2011

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003

Undang-Undang No. 31 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik dan Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum, Tanpa tahun dan penerbit.

Undang-Undang UU Nomor 28 Tahun 1999 Tanggal 19 Mei 1999.

Wardana, Frans. (2019). *Partai Politik Sebagai Pilar Demokrasi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.* Medan. Skripsi.

Weingast, Barry and Donald A. Wittman. 2006. The Oxford Handbook of Political Economy.New York: Oxford University Press.

Yulisanti. A. I., (2000), Status Sosial Ekonomi dan Perilaku Konsumtif Kelas

Menengah Baru. Yogyakarta: APMD. (http://eprints.undip.ac.id/177736/1/Wiji-_Lestarini.pdf).

## BIOGRAFI PENULIS

Dr. H. Cecep Suryana, Drs. M.Si. Menamatkan pendidikan kesarjanaannya S1 di Fakultas ushuluddin IAIN SGD Bandung dengan mengambil spesial di Bidang Dakwah pada tahun 1991 dengan gelar Doktorandus {Drs}. Setelah mengikuti prosesi wisuda Sarjana Bulan Maret tahun 1992 berkesempatan menjadi dosen magang di almamaternya. Hingga pada tahun 1994 memperoleh kesempatan diangkat sebagai Dosen PNS. Pada tahun 2003 berhasil menyelesaikan pendidikan S2 nya dengan memperoleh gelar Magister Sains {M.Si.} dari Unpad Bandung dengan mengambil kajian Komunikasi. Merupakan pendidikan terakhirnya jenjang S3 diselesaikannya pada tahun 2016 di Uninus Bandung dengan Judul disertasi yang ditulisnya "Strategi Komunikasi Kebijakan Pendidikan" dengan mendapatkan gelar akademik sebagai Doktor bidang Manajemen Pendidikan. Kurang lebih 4 tahun belakangan ini mendapat kepercayaan dari pimpinan fakultasnya yaitu Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SGD Bandung untuk mengampu mata kuliah di S1 yaitu, : Komunikasi Politik, Pengantar Ilmu Politik, Dasar-dasar Ilmu Komunikasi, Sistem Politik Indonesia pada Prodi Jurnalistik,Hubungan Masyarakat, Bimbingan Konseling Islam, dan Komunikasi Penyiaran Islam. Adapun pada jenjang S2 di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam mengampu mata kuliah Komunikasi Politik. Penulis pun beberapa kali mendapatkan kesempatan menjadi narasumber pada kegiatan diskusi, seminar, workshop, perumusan dan pembuatan perda pendidikan yang diadakan Dinas Pendidikan.

Buku yang ada di hadapan pembaca ini merupakan buah dari kolaborasi terhadap penugasan pada mahasiswa Komunikasi penyiaran Islam

semester enam dan mahasiswa jurnalistik semester empat tahun 2022 bekerjasama dengan dosen pengampu Mata Kuliah Sistem politik Indonesia Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tentu saja, amat di sayangkan bila hasil dari penelitian mahasiswanya tidak sampai dibuat menjadi buku. Atas niat yang mulia itu ditambah kebaikan dari fihak penerbit, akhirnya buku ini bisa hadir dihadapan pembaca. Sebelumnya, Buku pertama yaitu : Komunikasi Politik : Teori dan Praktik yang diterbitkan pada tahun 2019 di terbitkan oleh CV. Mimbar Pustaka Bandung, Buku ke 2 yaitu : Pesan-pesan Pelatihan Terhadap Peningkatan Partisipasi Pembangunan di Kalangan Pegawai yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh Lufti Gilang Banyumas. Beberapa tulisannya pernah dimuat pada Jurnal Ilmu Dakwah, Jurnal Annida, Jurnal Communicatus, yang diterbitkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi tempat tugasnya mengabdi selama ini. Ada juga tulisannya yang telah terbit di jurnal internasional. Untuk lebih jelasnya lagi bisa dilihat pada akun Google Cendikia : Cecep Suryana. Beberapa kegiatannya sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat di posting pada akun face book dengan alamat cecep suryana majalengka dan akun instagram dengan alamat csuryana56.

| | |
|---|---|
| Nama lengkap | : Fariz Farghan Atalla |
| Nama panggilan | : Fariz |
| TTL | : Subang, 22 November 2000 |
| Umur | : 21 Tahun |
| Status | : Mahasiswa |
| Riwayat Pendidikan | |
| SD | : SDN 1 Kasomalang |
| SMP | : SMPN 1 Cisalak |
| SMA | : SMAN 1 Jalancagak |
| Motto | : “Terbarkanlah kebaikan di setiap sudut kehidupan, dan jangan lupa selalu bersyukur dan berusaha untuk bahagia” |

| | |
|---|---|
| Nama lengkap | : Fathiyyah Raisah Amani |
| Nama panggilan | : Raisa |
| TTL | : Bandung, 12 April 2001 |
| Umur | : 21 Tahun |
| Status | : Mahasiswa |
| Riwayat Pendidikan | |
| SD | : MI Asih Putera |
| SMP | : SMPIT Hikmah Teladan |
| SMA | : MA MT Asih Putera |
| Motto | : “Gak usah mati-matian untuk hal yang gak akan dibawa mati” |

Nama lengkap : Khairunnisa Al Fajri
Nama panggilan : Icha
TTL : Bandung, 6 Juni 2001
Umur : 21 Tahun
Status : Mahasiswa
Riwayat Pendidikan
SD : SDIT Nurul Ilmi
SMP : SMP Ar Risalah
SMA : SMAN 2 Pariaman
Motto : “Jangan takut sendirian, karena di kuburan nanti ujungnya juga sendirian”

Nama lengkap : Lu'lu Mar'atul Farhah
Nama panggilan : Lulu
TTL : Purwakarta, 31 Agustus 2001
Umur : 20 Tahun
Status : Mahasiswa
Riwayat Pendidikan
SD : SDN 1 Jatibarang
SMP : SMPIT Al-Multazam
SMA : SMAIT Al-Multazam
Motto : "Tidak ada kata terlambat untuk memulai sebuah kesuksesan”

Nama lengkap : M Fikri Saffanuramadhani
Nama panggilan : Fikri
TTL : Bandung, 07 Desember 2000
Umur : 21 Tahun
Status : Mahasiswa
Riwayat Pendidikan

SD : SDN Melong Mandiri 4
SMP : SMP 4 Cimahi
SMA : SMA 17 Bandung
Motto : “Jangan Malu Untuk berproses”

Nama lengkap : Maryam Al Hukmah Shabiyya
Nama panggilan : Biyya
TTL : Palembang, 30 Oktober 2001
Umur : 20 Tahun
Status : Mahasiswa
Riwayat Pendidikan
SD : Bina Warga Palembang
SMP : SMPN 50 Palembang
SMA : YPI Tunas Bangsa
Motto : “Petik apa yang kamu tanam hari ini”

Nama lengkap : Mayang Sri Pertiwi
Nama panggilan : Mayang
TTL : Bandung, 1 April 2001
Umur : 21 Tahun
Status : Mahasiswa / Belum menikah
Riwayat Pendidikan
SD : SDN Cipamokolan 4
SMP : SMPN 1 Bojongsoang
SMA : SMAN 1 Bojongsoang
Motto : “Jalani, Nikmati, Syukuri”

BHINNEKA TUNGGAL IKA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

BUKU INI SECARA UMUM BERISI TENTANG PARTAI POLITIK DAN KETERKAITANNYA DENGAN KEHIDUPAN MASYARAKAT. DI BAGIAN AWAL DIPAPARKAN TENTANG PARTAI POLITIK SECARA KESELURUHAN YANG DAPAT MENAMBAH WAWASAN SEPUTAR PARTAI POLITIK. PEMBAHASAN DILANJUTKAN DENGAN PERANAN PARPOL KEPADA MASYARAKAT SEPERTI EKONOMI, PENDIDIKAN, DAN PEMILU.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

ISBN 978-623-99506-7-5 (PDF)
9 786239 950675